

**HUBUNGAN INDONESIA AUSTRALIA
PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)
Jurusan Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asal	: Madrasah	Klasifikasi 327 KUR h
Terima Tgl:	: 14 DEK 2000	
No. Induk	: 16.200.26/2000	

Oleh :

Dyah Estu Kurniawati

NIM. 960910101182

Pembimbing :

Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, MA.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000**



HUBUNGAN INDONESIA AUSTRALIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)
Jurusan Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:

Dyah Estu Kurniawati

NIM. 960910101182

Pembimbing:

Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, MA.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000

PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan
Di hadapan Panitia Penguji Skripsi
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Hari : Rabu

Tanggal : 13 September 2000

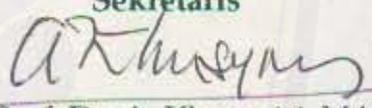
Jam : 08.00 WIB

Panitia Penguji,

Ketua Panitia

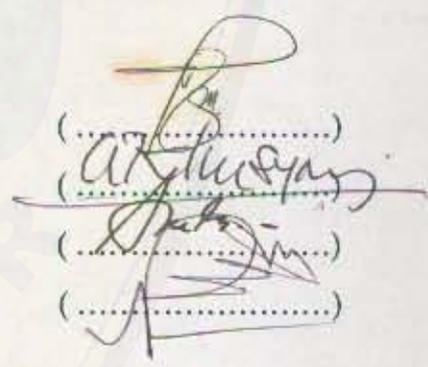

(Drs. Asrial Aziz)

Sekretaris


(Prof. Dr. A. Khusyairi, MA)

Anggota :

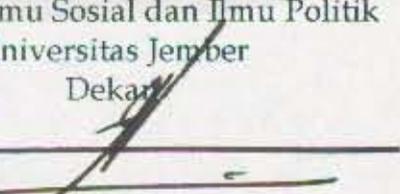
1. Drs. Asrial Aziz
2. Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, MA
3. Drs. Sjoekron Sjah, SU
4. Drs. Nuruddin M. Yasin


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan




Prof. Drs. H. Bariman
NIP. 130350709

Karya ini kupersembahkan untuk:

- *Ibu dan Bapakku tercinta yang selalu melumuri jiwa dan ragaku dengan kasih sayang dan do'a*
- *Kakak-kakakku tersayang yang selalu memberikan motivasi dan do'a*
- *Sahabat-sahabatku yang setia....*

Semoga Allah senantiasa memberkahi dan melindungi langkah kita...

Amien.

Karya ini kupersembahkan untuk:

- *Ibu dan Bapakku tercinta yang selalu melumuri jiwa dan ragaku dengan kasih sayang dan do'a*
- *Kakak-kakakku tersayang yang selalu memberikan motivasi dan do'a*
- *Sahabat-sahabatku yang setia....*

Semoga Allah senantiasa memberkahi dan melindungi langkah kita...

Amien.

MOTTO

....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri...¹

(Surat AR Ra'd : 11)

....Jadikanlah Sabar dan Shalat sebagai Penolongmu...²

(Surat Al Baqarah : 153)

There is a way if you have a will.

(Dy's 2000)

¹ Dikutip dari *Alqur'an dan Terjemahannya*, Depag, RI, Jakarta, 1971, hal. 370.

² *Ibid*, hal. 38.

KATA PENGANTAR

Hanya puji syukur Kehadirat Allah SWT. lah yang patut penulis ucapkan, karena berkat Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya tugas akhir berupa penulisan skripsi guna memperoleh gelar S1 Jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ini dapat penulis selesaikan.

Proses penulisan skripsi dengan judul HUBUNGAN INDONESIA AUSTRALIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR ini penulis selesaikan dalam waktu yang relatif lama. Rasa lelah, penat dan jenuh terkadang memang menghampiri penulis, namun dengan tekad dan kesungguhan bahwa tugas ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan, maka dengan penuh kesadaran dan kesabaran penulis mencoba membuang rasa tersebut jauh-jauh.

Satu hal yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu adanya motivasi dan bantuan dari berbagai pihak yang penulis rasakan sangat besar artinya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dr. Akhmad Khusyairi, MA. Yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini,
2. Bapak Prof. Dr. H. Bariman selaku Dekan FISIP UNEJ,
3. Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU. selaku Ketua Jurusan HI FISIP UNEJ,
4. Bapak Drs. Pra Adi S. Selaku Dosen Wali penulis,
5. Bapak Agus Tri Hartono yang telah banyak memberi wawasan dan meminjamkan buku kepada penulis,
6. Seluruh Staf Pengajar FISIP UNEJ,

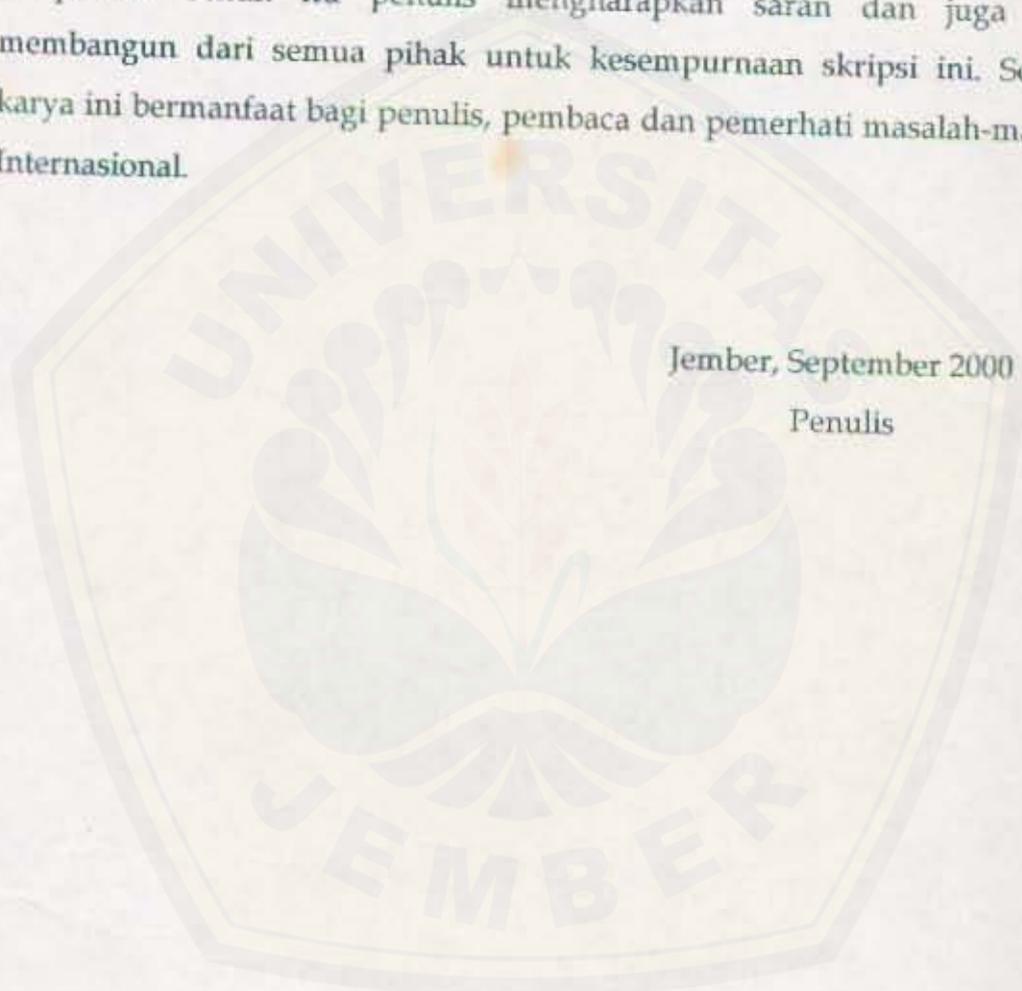
7. Seluruh Karyawan FISIP UNEJ,
8. Ibu Renni Winata, Kepala Pusat Kajian Australia dan Bapak Ikrar Nusa Bhakti yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dan memberi masukan-masukan yang berarti bagi penulis,
9. Seluruh karyawan dari perpustakaan-perpustakaan yang telah penulis kunjungi, dan juga Bapak Sulis serta Ibu Emy dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam pengumpulan data-data skripsi,
10. Yang tak pernah dan tak akan pernah penulis lupakan untuk selalu berterima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Kusnuljakin, BA dan Ibu Sulastri yang senantiasa memberikan dukungan baik moril, materiil maupun spirituil kepada penulis,
11. Kakak-kakak penulis Mbak Rini dan Mas Yoyok, Mas Bachtiar dan Mbak Yuli, Mas Chanif dan Mbak Indah atas motifasi dan do'anya,
12. Keponakan-keponakanku Linggar, Rizky, Nadifa dan 'adiknya' yang telah memberikan keceriaan kepada penulis,
13. Sahabat dan Saudaraku Ndut, Chenille serta "Someone", thanks atas motifasi, kasih sayang dan do'anya. You're my everything.
14. Teman-teman HI'96, I love you all. Thanks juga untuk Nhana, Nurul, Lian, Ely, Ayu, Irman atas bukunya dan juga dik Rina (HI'97) atas klipingnya,
15. Teman-teman kost di "Green House" Jawa IV/15B, Mbak Nisma, Ida, Yanti, Wati, Iche, Mbak Tri, Epha, Lilis and semuanya aja atas persaudaraan dan kekompakannya selama ini,
16. Rekan-rekan se-Himpunan dan Keluarga Besar *Veritas*, thanks atas dukungan dan masukan-masukannya,

17. Teman-teman KKN Kelompok 58, thanks atas "nice memories" nya.
18. Kru B-Com dan Sigma-Com yang telah banyak membantu dalam pengetikan skripsi ini, serta seluruh pihak yang telah banyak membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan juga kritik membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pemerhati masalah-masalah Internasional.

Jember, September 2000

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.2.1 Batasan Waktu	7
1.2.2 Batasan Materi	7
1.3 Permasalahan	8
1.4 Kerangka Dasar Teori	10
1.5 Hipotesis	13
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	17
1.6.2 Metode Analisa Data	17
1.7 Pendekatan	18
BAB II GAMBARAN UMUM INDONESIA AUSTRALIA	20
2.1 Kondisi Geografis	20
2.2 Latar Belakang Sejarah	23
2.3 Sistem Politik	26
2.4 Sistem Sosial Budaya	31
2.5 Sistem Pertahanan dan Keamanan	34

BAB III FLUKTUASI HUBUNGAN INDONESIA AUSTRALIA	40
3.1 Masalah Kemerdekaan RI	41
3.2 Masalah Irian Barat	47
3.3 Masalah PRRI/Permesta	50
3.4 Masalah Konfrontasi Indonesia Malaysia	51
3.5 Masalah Timor Timur	53
3.5.1 Masalah Integrasi Timor Timur ke Wilayah NKRI	53
3.5.2 Jajak Pendapat sebagai Pemecahan Masalah	57
3.5.3 Masalah Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur	59
BAB IV PROSPEK HUBUNGAN INDONESIA AUSTRALIA	66
4.1 Faktor-faktor yang Memperburuk Hubungan Indonesia Australia Pasca Jajak Pendapat	67
4.1.1 Faktor Internal	67
a. Perbedaan Sistem Nilai	67
b. Perubahan Kebijakan Australia di bawah John Howard dari Partai Liberal terhadap Masalah Timor Timur	72
4.1.2 Faktor Eksternal: Pengaruh Amerika dalam Hubungan Indonesia Australia	77
4.2 Perkembangan Hubungan Indonesia Australia	82
4.2.1 Perubahan Politik Dalam Negeri Indonesia	82
4.2.2 Kebijakan Australia terhadap Indonesia Pasca Timor Timur	86
4.3 Prospek Hubungan Indonesia Australia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur	89
BAB V KESIMPULAN	91

DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	102



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Alasan Pemilihan Judul

Hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral tidak selalu harmonis dan seringkali mengalami pasang surut. Ini merupakan bagian dari kehidupan politik internasional yang wajar. Peristiwa semacam ini bahkan dapat terjadi pada negara-negara yang merupakan sahabat dekat, sekutu, maupun antara negara tetangga dekat.

Indonesia dan Australia secara geografis merupakan dua negara yang saling berdekatan, akan tetapi hubungan kedua negara tersebut secara alamiah pada dasarnya sangat unik. Bahkan sering disebut, tidak ada dua bangsa bertetangga di dunia yang begitu kontras perbedaannya baik dalam latar belakang sejarah, bahasa, budaya, agama, sistem politik, sosial maupun budayanya seperti Indonesia dengan Australia. Seperti yang dinyatakan oleh Gareth Evans:

*Australia and Indonesia are most unusual neighbours. More than other two countries in the world living along side each other, we are different in history, language, cultures, religions, , ethnicity, population size, and in political, legal and social system. We might as well be half a world apart.*¹

Dari segi latar belakang sejarah, walaupun Indonesia dan Australia sama-sama bekas daerah jajahan, tetapi pengalaman kedua negara tersebut berbeda. Australia diberi kemerdekaan oleh bekas penjajahnya sedang Indonesia berjuang untuk merebutnya.

¹ Gareth Evans, "Australia and Indonesia: Partnership in Diversity", dalam Hadi Soesastro, Tim MacDonald (eds), *Indonesia-Australia Relations: Diverse Cultures, Converging Interest* (CSIS, Jakarta, 1995), hal. 3.

Penduduk Australia secara etnis berbeda dengan Indonesia, walaupun dalam perkembangannya Australia sudah lebih banyak menerima imigran dari Asia pada akhir-akhir ini. Disamping itu, ciri-ciri sosial dari masyarakat Australia juga memiliki peran yang besar dalam menentukan sikap Australia. Australia walaupun secara geografis ada di kawasan Samudera Pasifik, akan tetapi mayoritas penduduk serta sejarah budayanya didominasi oleh Eropa. Dalam hal ini tampaknya ada sisa-sisa kebudayaan Eropa yang masih sangat melekat pada penduduk Australia, yang kemudian terekspresikan dalam menanggapi kasus-kasus yang terjadi di negaranya, baik pada dimensi dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan terkesan yang muncul kemudian adalah sikap Australia yang sangat arogan oleh karena "perasaan Eropanya" yang begitu dominan. Sikap "ke-Eropaan" itu pada gilirannya menimbulkan gejala kecurigaan terhadap negara lain disekelilingnya yang bukan Eropa. Dan Australia lebih banyak berkiblat pada negara-negara Barat dalam menentukan segala kebijakan luar negerinya.

Nilai-nilai demokrasi liberal telah menjadi ciri sosio-politik dari Australia dengan mengutamakan individu dan dengan sistem kebebasan pers yang hampir tidak terbatas, sedang Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila di mana kepentingan individu dan kepentingan umum berjalan seimbang dan dengan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Perbedaan-perbedaan ini sering disebut sebagai perbedaan nilai dan kerap kali menyebabkan terjadinya perbenturan antara kedua negara yang bertetangga.² Perbenturan ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman antara satu sama lain. Bahkan Australia dan Indonesia tampaknya masih

² Hasjim Djalal, *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa 1990* (CSIS, Jakarta, 1997), hal. 32.

merupakan dua tetangga yang asing (*strange neighbours*).³ Meskipun hubungan bilateral telah terjalin sejak tahun 1945, namun seringkali terjadi perbedaan persepsi dalam memandang suatu permasalahan diantara mereka sehingga grafik pasang surut selalu mewarnai perjalanan hubungan bilateral Australia dan Indonesia.

Hubungan yang sangat baik antara Indonesia Australia terlihat pada saat Bangsa Indonesia sedang berjuang merebut kemerdekaannya dan juga pada tahun-tahun pertama kemerdekaan Indonesia yaitu ketika Indonesia menghadapi Agresi Belanda I pada tahun 1947. Pada waktu itu Australia bersama India berusaha mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB. Selain itu, adanya usaha pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang dilakukan oleh Buruh Australia telah menjadikan Australia sebagai "kawan" Indonesia.⁴

Kurun waktu 1950 hingga 1966 merupakan masa ketegangan hubungan Indonesia Australia. Program Presiden Soekarno yang ingin mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam negara kesatuan RI dinilai pihak Australia sebagai tindakan agresor. Selanjutnya, politik Indonesia di bawah Presiden Soekarno yang berkonfrontasi dengan Malaysia oleh Australia juga dinilai sebagai agresifitas Indonesia yang dapat membahayakan Australia. Karena kedua program Presiden Soekarno di atas Indonesia masuk ke dalam agenda Australia sebagai "ancaman dari Utara".

Sejak tahun 1970-an, hubungan bilateral Australia-Indonesia banyak dipengaruhi oleh masalah Timor Timur. Pada awalnya, Australia begitu mendukung ketika Indonesia masuk ke Timor Timur pada tahun 1975. Australia juga salah satu dari negara yang mengakui secara *de facto* dan *de*

³ Ikrar Nusa Bakti, "Kanguru dan Loro Sa'e", *TEMPO*, 26 september 1999, hal. 32.

⁴ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia* (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999), hal. 419.

jure integrasi Timor Timur ke Indonesia. Namun, permasalahan selalu timbul walaupun pada akhirnya permasalahan tersebut dapat diatasi. Misalnya, dengan adanya Peristiwa Dili pada 12 Nopember 1991 yang sempat menimbulkan ketegangan diantara kedua negara karena Australia mengecam keras peristiwa tersebut.

Di akhir era 1990-an, fokus perhatian masalah Timor Timur tertuju pada keputusan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Habibie. Pada tanggal 27 Januari 1999 pemerintah Indonesia menawarkan dua opsi kepada rakyat Timor Timur, yaitu merdeka atau otonomi khusus tetapi masih tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Jajak pendapat bagi rakyat Timor Timur pun dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999, diselenggarakan oleh PBB dengan misi khususnya, UNAMET (*United Nations Mission in East Timor*) yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1246 tahun 1999.⁶

Jajak pendapat dengan hasil kemerdekaan, bagi rakyat Timor Timur khususnya yang pro kemerdekaan merupakan suatu kemenangan dan merupakan lembar sejarah baru dalam perjuangan mereka. Namun bagi Indonesia, urusan Timor Timur tampaknya tidak serta merta selesai usai jajak pendapat. Segera sesudah hasil itu diumumkan, kerusuhan terjadi di Bumi Loro Sae, ketegangan terjadi antara kelompok pro kemerdekaan dengan kelompok pro otonomi sehingga menciptakan situasi krisis.

Krisis Timor Timur mengundang berbagai kecaman dari dunia Internasional terhadap Indonesia, yang dianggap tidak mampu mengendalikan situasi keamanan di Timor Timur. Dan dalam kenyataannya,

⁵ TEMPO, 8 Februari 1999, hal. 18.

⁶ Forum Keadilan: No. 23, 12 September 1999, hal. 17.

kecaman yang paling keras ternyata justru datang dari Australia, negara tetangga Indonesia.

Ungkapan dan tindakan Australia, baik dari masyarakat maupun pemerintahnya, sangat keras. Aksi demonstrasi anti Indonesia disertai dengan pembakaran bendera dan kecaman-kecaman keras, pemboikotan terhadap berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Indonesia banyak terjadi di Australia. Pemerintah Australia bahkan tidak ragu-ragu menggalang kekuatan internasional untuk menekan Indonesia, mengusulkan diri - dan akhirnya disetujui PBB - menjadi pemimpin pasukan perdamaian PBB di Timor Timur (*Interfet*) dan mengirimkan pasukan dengan jumlah terbesar dalam misi tersebut.

Di mata Indonesia, kesan arogan sangat nampak dalam sikap Australia dalam menanggapi masalah Timor Timur pasca jajak pendapat. Bangsa Indonesia merasa sangat kecewa dengan sikap pemerintah dan masyarakat Australia tersebut sehingga reaksi yang dilakukan sebagai protes juga tidak kalah keras. Demonstrasi, nota protes, penurunan bendera di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, serta ancaman boikot dari para eksportir dan importir merupakan beberapa respons yang dapat disebutkan.⁷ Indonesia juga membatalkan Perjanjian Keamanan yang disepakati oleh kedua negara di tahun 1995 sebagai reaksi terhadap keputusan Australia yang membatalkan kerjasama militernya Indonesia. Sikap Australia dianggap tidak selaras dengan isi perjanjian tersebut.⁸

⁷ "Meluas, Sentimen Anti Australia", *Kompas*, 23 September 1999.

⁸ "Jakarta Putuskan Perjanjian Keamanan: Australia Tak Risau", *Kompas*, 17 September 1999 dan "RI 'Balas' Batalkan Sepihak Perjanjian dengan Australia", *Suara Karya*, 17 September 1999.

Reaksi bangsa Indonesia ini sempat merisaukan pemerintah Australia. PM Australia John Howard langsung membela diri dan memberikan klarifikasi atas sikap yang dipilih negerinya. Sebagai kawan Indonesia, katanya, Australia justru ingin membantu menyelesaikan krisis Timor Timur secepatnya, agar Indonesia tidak diisolasi oleh dunia internasional.⁹

Akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut hubungan Indonesia Australia menjadi sangat buruk, bahkan terburuk dalam catatan sejarah hubungan Indonesia Australia.¹⁰ Hubungan baik yang terjalin selama satu dekade sebelumnya berubah drastis menjadi sangat buruk dalam waktu yang singkat, mencapai puncaknya pada bulan September-Oktober 1999.¹¹

Meskipun konflik secara terbuka dan formal masih bisa dihindari namun ketidakharmonisan hubungan kedua negara dapat dilihat dari aksi reaksi yang datang dari kedua belah pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakatnya dalam menanggapi masalah Timor Timur pasca jajak pendapat.

Melihat keunikan hubungan bilateral antara Australia-Indonesia yang seringkali mengalami fluktuasi atau pasang surut, dan bahkan telah mencapai titik terendah pada masa pasca jajak pendapat di Timor Timur, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih mendalam masalah tersebut dalam penulisan ini. Dan untuk itu penulis mengambil judul: "HUBUNGAN INDONESIA AUSTRALIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR".

⁹ Ganewati Wuryandari, "Agenda Tersembunyi Australia", *Forum Keadilan*: No. 25, 26 September 1999, hal. 13.

¹⁰ Ikrar Nusa Bakti *loc.cit.*, hal., 32.

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam membahas permasalahan, harus ditentukan ruang lingkup pembahasan, agar pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang tepat dan tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan.

Berdasarkan tujuan dari adanya ruang lingkup pembahasan di atas serta sesuai dengan judul yang telah penulis tetapkan, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan dua pembatasan, yaitu pembatasan waktu dan pembatasan materi.

1.2.1 Batasan Waktu

Pembatasan waktu dalam penulisan ini dimulai sejak terjadinya krisis di Timor Timur usai jajak pendapat hingga saat ini, walaupun tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan waktu-waktu yang lain yang dapat mendukung.

Dipilih kurun waktu tersebut karena sejak saat itulah hubungan Indonesia dan Australia berubah menjadi sangat buruk berbeda dengan sebelumnya. Dan untuk melihat perkembangan dari hubungan kedua negara tersebut apakah akan membaik atau bahkan memburuk maka penulis akan menganalisisnya hingga saat ini, dan juga akan memprediksikannya untuk masa yang akan datang.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diberikan pula dengan mengambil pokok permasalahan tentang sikap Australia dalam menanggapi kasus Timor Timur pasca jajak pendapat, karena dalam peristiwa ini sikap Australia terlihat *ambivalen*. Di satu pihak mereka menyatakan diri sebagai kawan atau sahabat Indonesia, namun di pihak lain mereka bersikap arogan dalam

¹¹ Hall Hill & Chris Manning, "RI-Australia: What Went Wrong?", *The Indonesian Quarterly*, Vol. XXVII, No. 4, Fourth Quarter 1999, hal. 284.



menanggapi permasalahan Timor Timur. Ungkapan dan tindakan Australia sangat agresif, bahkan tidak ragu-ragu menggalang kekuatan internasional untuk menekan Indonesia, melontarkan kecaman keras, dan mengambil langkah-langkah pemboikotan terhadap berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Indonesia.

Reaksi balik bangsa Indonesia terhadap sikap pemerintah dan masyarakat Australia itu tidak kalah keras antara lain dengan demonstrasi, nota protes, penurunan bendera di Kedutaan Australia di Jakarta, serta ancaman boikot dari para eksportir dan importir.

Oleh karena itu, pembahasan penulisan ini lebih ditekankan pada masalah sikap kedua negara, utamanya sikap Australia dalam menanggapi masalah krisis Timor Timur dan faktor-faktor yang menjadi penyebab memburuknya hubungan Australia-Indonesia pasca jajak pendapat. Akan dibahas juga tentang prospek hubungan Indonesia Australia di masa depan setelah memburuknya hubungan kedua negara tersebut pasca jajak pendapat di Timor Timur.

1.3. Permasalahan

Setiap penelitian atau analisis terhadap suatu peristiwa, pada suatu titik tertentu akan terbentur pada suatu permasalahan yang menuntut jawaban. Permasalahan ini, merupakan inti atau fokus dari sebuah peristiwa yang mengantarkan seorang peneliti menuju pada upaya pemecahan dalam sebuah pembahasan ilmiah.

Sebelum penulis merumuskan permasalahan dalam tulisan ini, berikut ini beberapa pendapat dari para pakar yang memiliki kompetensi dalam penulisan karya ilmiah.

The Liang Gie mengemukakan,

"Masalah ialah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan hanya melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui terlebih mendalam. Masalah berhubungan dengan ilmu. Ilmu senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya."¹²

Sedangkan Winarno Surachmad dalam buku Pengantar Methodologi Ilmiah memberikan pengertian permasalahan sebagai berikut:

"Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dianalisa sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui atau (dengan jalan mengatasinya) apabila ingin berjalan terus."¹³

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia sangat erat kaitannya dengan posisi atau letak geografis masing-masing negara serta pengaruh yang berhubungan dengan perbedaan latar belakang sejarah, sistem politik, sosial-budaya dan juga tingkat ekonomi kedua negara.

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan hubungan kedua negara menjadi lebih dinamis, dan bahkan dapat dikatakan mempunyai keunikan tersendiri. Hal ini dapat ditunjukkan dari ambivalensi sikap Australia yang terkadang begitu dekat dengan Indonesia, dan dilain kesempatan bersikap memusuhi Indonesia sehingga grafik pasang surut mewarnai perjalanan hubungan bilateral kedua negara.

Australia yang dalam satu dekade terakhir dikenal bersahabat ternyata bersikap amat berbeda dalam menanggapi permasalahan di Timor Timur pasca jajak pendapat. Sehingga hubungan baik yang terjalin sebelumnya berubah secara drastis utamanya pada bulan September-Oktober

¹² The Liang Gie, *Ilmu Politik* (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1974), hal 47.

¹³ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Transito Bandung, 1994), hal. 34.

1999. Ungkapan dan tindakan Australia sangat agresif dan asertif bahkan tidak ragu-ragu menggalang kekuatan internasional untuk menekan Indonesia, melontarkan kecaman keras, dan mengambil langkah-langkah pemboikotan terhadap berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Indonesia. Sikap ini dinilai bangsa Indonesia sebagai tindakan yang sangat arogan dan terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Sehingga reaksi balik yang tidak kalah keras pun datang dari bangsa Indonesia, antara lain dengan demonstrasi, nota protes, penurunan bendera di Kedutaan Besar Australia di Jakarta serta ancaman boikot dari para eksportir dan importir. Hal ini berdampak pada hubungan Indonesia-Australia yang mencapai titik terendah pada masa pasca jajak pendapat di Timor Timur.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimanakah prospek hubungan Indonesia Australia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur?”

Permasalahan ini menjadi penting karena bagaimanapun juga Indonesia dan Australia adalah dua negara yang letaknya saling berdekatan, disamping itu kedua negara juga merupakan dua negara yang memiliki kekuatan dominan di kawasan.

1.4. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah landasan berpijak dalam pemikiran mengenai isu atau pendapat dengan menggunakan teori-teori untuk memecahkan dan menganalisa permasalahan. Landasan teori digunakan untuk menjembatani antara problematika dengan hipotesa yang penulis ajukan.

Pada tingkat awal, pengertian teori adalah :

"Teori adalah suatu cara mengorganisasikan pengetahuan kita sedemikian rupa, sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pantas dicarikan jawabannya dan membimbing riset kita ke arah jawaban yang valid."¹⁴

Sedangkan pada tingkat *advance* terdapat pengertian bermacam-macam teori, antara lain sebagai berikut:

1. Teori merupakan rangka dasar untuk mengatur fakta-fakta.
2. Teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
3. Teori merupakan seperangkat pernyataan untuk atau mengenai kegiatan keadaan yang diharapkan.
4. Teori merupakan pikiran spekulatif, bebas dari ikatan dengan dunia nyata.¹⁵

Ditinjau dari kedua macam pengertian teori tersebut, keberadaan teori amatlah dibutuhkan di dalam menganalisa prospek hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia karena teori digunakan sebagai dasar kerangka berpikir yang mengandung ramalan ataupun anjuran serta membimbing ke arah jawaban yang valid.

Dalam hubungannya dengan penulisan karya ilmiah tentang hubungan Indonesia-Australia ini, Penulis menggunakan kerangka berpikir Analisa Sistem (*System Analisis*).

Menurut Kamus Analisa Politik:

Analisa Sistem adalah suatu pendekatan, kadang-kadang disebut dengan Teori Sistem, yang menganggap politik sebagai suatu perangkat interaksi yang terjadi di dalam, tetapi secara analitis berbeda dari lingkungan sosial yang lebih besar. Analisa sistem memberikan sejumlah kategori konseptual untuk menguraikan dan menganalisa perilaku politik *Sistem* merupakan interaksi yang

¹⁴ James E. Dougherty dan Robert L. Pfallaggarf, Jr., *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, terjemahan Amien Rais (FISIP UGM, Jogjakarta, 1983), hlm. 28.

¹⁵ Charles A. Mc. Cleland, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, terjemahan Mien Jobhaar dan Iskak Zakir (CV. Rajawali, Jakarta, 1986), hal. 10.

terpola atau hubungan yang terus menerus di antara satuan-satuan politik yang ada. Sistem yang melahirkan suatu unsur dari sistem yang lebih besar disebut *subsistem*. Lingkup di mana sistem itu terbentuk disebut *lingkungan*. Garis analitis yang memisahkan sistem dari lingkungannya disebut *batas* sistem. Suatu sistem menerima *masukan* dari lingkungannya dalam bentuk *tuntutan* terhadap sistem dan *dukungan* bagi *fungsi* sistem. Melalui jaringan sistem, masukan tergantung pada *proses perubahan*, sehingga *keluaran* sistem mencakup peraturan untuk dijalankan dan kebijaksanaan untuk dilaksanakan.¹⁶

Dengan demikian, teori atau analisis sistem ditujukan secara khusus pada persoalan-persoalan seperti hubungan sistem dengan lingkungannya. Analisis sistem ini menerangkan adanya hubungan timbal balik antara berbagai bagian proses politik, dan interaksi yang terjadi antara sistem dengan lingkungannya.

Adapun yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah keadaan yang hidup disekitar suatu obyek, kegiatan atau sistem. Dalam sistem politik, lingkungan mencakup faktor-faktor manusia dan bukan manusia, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dengan demikian faktor geografi, sistem sosial dan budaya, ideologi, adat istiadat dan juga lembaga semuanya dapat menjadi ciri-ciri lingkungan.

Dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia-Australia, persoalan yang melandasi proses dan isi hubungan kedua negara sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya perbedaan sistem nilai baik sistem politik, sosial maupun budaya masing-masing negara. Hal ini meliputi juga perbedaan perkembangan sejarah, warisan tradisi sosial politik, tingkat kemakmuran ekonomi, letak negara beserta bentuknya juga perbedaan dalam jumlah penduduk. Sampai taraf tertentu, adanya perbedaan ini ikut

¹⁶ Jack C. Plano, Robert E. Riggs, Helenan S. Robin, *Kamus Analisa Politik* (CV. Rajawali, Jakarta, 1985), hal. 260.

membentuk pola sikap dan tingkah laku suatu negara. Kurangnya pengertian tentang perbedaan dalam faktor-faktor tersebut di atas dapat menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antara bangsa-bangsa.

Contoh konkrit dari teori ini misalnya dalam penerapan budaya demokrasi. Di negara Australia yang telah lama menganut tradisi demokrasi liberal, kritik atau ketidaksepakatan dengan pemerintah atau kebijaksanaannya biasa dinyatakan dengan terbuka, bahkan dengan cara-cara yang keras. Tapi apabila cara semacam ini dinyatakan oleh sementara kalangan atau kelompok di Australia terhadap pemerintah Indonesia dan kebijaksanaannya, maka orang sering melihat hal tidak terduga sebagai respon dari pihak Indonesia. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan sistem sosial dan budaya dari bangsa Indonesia yang melahirkan tata nilai yang berbeda dengan Australia. Pengertian seperti ini selayaknya dipegang teguh sebagai dasar dalam menjalankan hubungan antar negara, agar tidak terjadi kerenggangan hubungan.

Dengan demikian prospek hubungan antara Indonesia dengan Australia tergantung pula pada sampai seberapa jauh masing-masing pihak dalam sistem ini beradaptasi dengan lingkungan yang ada pada sistem lainnya.

I.5 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, serta melalui kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, hipotesa ini diuji secara empiris untuk membuktikan kebenaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Winarno Surakhmad, sebagai berikut:

Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap sesuatu hal yang dimaksudkan sebagai suatu tuntunan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Hipotesis tersebut tidak perlu selalu merupakan jawaban yang mutlak benar atau yang harus dapat dibenarkan untuk penyelidikan, walaupun selalu diharapkan dapat menjadi demikian.¹⁷

Selanjutnya Soetrisno Hadi memberikan pengertian hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat tergantung terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan.¹⁸

Dengan demikian hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang dijadikan pedoman dalam suatu penulisan, karena bersifat sementara dan berupa perkiraan maka hipotesis ini mungkin bisa benar dan mungkin juga bisa salah.

Hubungan baik antara Indonesia dengan Australia sebenarnya sudah terjalin sejak lama, dan mempunyai peranan yang cukup berarti dalam perjuangan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaannya di masa revolusi. Hubungan kedua negara didasari oleh arti penting masing-masing negara.

Di mata Australia, dipandang dari segi geografis, Indonesia dapat digunakan sebagai tameng atau buffer state oleh Australia. Kecuali itu juga posisi Indonesia yang cukup disegani di Asia Tenggara menjadi pertimbangan bagi Australia untuk menjalin hubungan yang harmonis. Sebaliknya Indonesia memandang Australia sebagai negara yang relatif penting baik dari segi politik, ekonomi, militer dan sebagainya yang mempunyai pengaruh besar dalam konstelasi politik di kawasan Asia

¹⁷ Winarno Surakhmad, *op. cit.*, hal. 39.

Pasifik. Walaupun begitu ternyata hubungan bilateral antara keduanya tidak selalu harmonis. Kadang timbul ketegangan-ketegangan yang mengganggu hubungan tersebut.

Faktor internal yang mempengaruhi baik buruknya hubungan bilateral Australia-Indonesia antara lain adalah karena adanya perbedaan sistem nilai yang dianut oleh masing masing negara meliputi sistem politik, sistem sosial dan budaya yang berhubungan erat dengan sejarah negara yang bersangkutan.

Disamping itu, faktor siapa yang berkuasa di dalam pemerintahan, terutama di Australia, juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan baik antara kedua negara. Apabila di Australia yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah dari Partai Buruh maka kemungkinan besar hubungan Australia dengan Indonesia khususnya dan dengan Asia pada umumnya akan berjalan baik jika dibandingkan apabila partai Liberal yang berkuasa. Hal ini disebabkan oleh orientasi kebijakan luar negeri (*eksternal policy*) yang berbeda dari kedua partai. Partai Buruh dalam menjalankan politik luar negerinya lebih mengutamakan kerjasama dengan Asia dan sifatnya lebih independent, artinya tidak mau terlalu tergantung pada Inggris dan Amerika. Sedangkan partai liberal hubungannya lebih dekat dengan Inggris dan Amerika. Kebijakan mereka dalam menanggapi suatu permasalahan sangat tergantung pada sikap dan kebijakan kedua negara terutama yang menyangkut masalah demokrasi, hak asasi manusia, liberalisasi perdagangan dan juga lingkungan hidup. Dengan demikian keberadaan serta sikap Inggris dan Amerika bisa menjadi faktor eksternal yang berpengaruh terhadap baik buruknya hubungan Australia-Indonesia, terutama pada saat partai Liberal berkuasa di Australia.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I (Andi Offset, Yogyakarta, 1993), hlm. 8.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

"Prospek hubungan Indonesia Australia pasca jajak pendapat di Timor Timur sangat tergantung pada upaya dari masing-masing pihak untuk memperbaiki hubungan kedua negara dengan saling memahami perbedaan masing-masing, dan juga sangat tergantung pada perkembangan situasi politik, ekonomi dan pertahanan keamanan yang melibatkan negara-negara besar di Asia Pasifik, terutama apabila Partai Liberal berkuasa di Australia."

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian. Penerapan metode bermanfaat untuk mendapatkan kerangka berpikir dan data-data yang dibutuhkan, dengan tujuan agar karya tulis menjadi ilmiah, sistematis dan kronologis.

Agar suatu penelitian dapat terarah dan mendapat hasil yang optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode yang tepat. Jack C. Plano, memberikan pengertian metode dan metodologi sebagai berikut:

"Suatu kerangka pengetahuan dan teknik yang berkaitan dengan prospek dan asumsi penelitian ilmiah dalam suatu disiplin. Metodologi menyangkut pengumpulan analisa, pengukuran, evaluasi dan pemakaian data."¹⁹

Dari pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa metode merupakan suatu kerangka konseptual yang diterapkan pada penelitian yang dinilai dari proses pengumpulan data sampai dengan penganalisaan data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan ini ada 2 kategori, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

¹⁹ Jack C. Plano, *op. Cit.* Hal. 126.

1.6.1 Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber datanya. Dengan demikian data-data yang didapatkan seluruhnya merupakan data sekunder. Penelitian kepustakaan ini telah penulis lakukan di beberapa perpustakaan, antara lain:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
3. Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga, Surabaya
4. Perpustakaan FISIP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
5. Perpustakaan FISIP Universitas Indonesia, Jakarta
6. Perpustakaan Pusat Kajian Australia, Universitas Indonesia, Jakarta
7. Perpustakaan CSIS, Jakarta
8. Perpustakaan LIPI, Jakarta.

Dari kunjungan-kunjungan tersebut penulis berhasil memperoleh data-data sekunder dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, dokumentasi, kliping-kliping dan surat kabar.

1.6.2 Metode Analisis data

Sebagaimana dalam penelitian, untuk mendapatkan hasil yang baik maka harus menggunakan proses berpikir yang baik pula. Berpikir adalah suatu proses mencari korelasi diantara berbagai ilmu pengetahuan untuk mengorganisasikan dan mereorganisasikan, sehingga dapat menginstruksikan yang terdapat dalam tataran tertentu, dan nantinya dapat dikembangkan kembali.

¹⁹ Jack C. Plano, op. Cit. Hal. 126.

Dalam penulisan ini penulis mempergunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir dari prinsip umum menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah. Sesudah itu masing-masing proposisi diuji dengan menelaah peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus-kasus khusus itu bisa dijelaskan atau bahkan bisa diramalkan berdasarkan teori yang dipergunakan.²⁰

Cara berpikir deduktif menurut Komaruddin adalah sebagai berikut:

“Metode deduktif yang diterapkan dalam karangan dimulai dengan bab yang menjelaskan dalil-dalil umum atau generalisasi-generalisasi atau teori-teori umum sebagai dasar pikiran untuk disetujui atau ditolak. Dari bab yang menjelaskan dalil-dalil, generalisasi-generalisasi dan teori-teori umum itu karangan akan maju selangkah demi selangkah kepada bab-bab yang menjelaskan kenyataan yang diperoleh dari kehidupan praktis melalui riset.”²¹

Dengan menggunakan pendekatan deduktif ini penulis akan menganalisa hubungan Indonesia Australia berkaitan dengan prospeknya di masa depan dengan menggunakan generalisasi-generalisasi pengalaman masa lalu untuk melihat kemungkinan di masa depan.

1.7 Pendekatan

Penulisan ilmiah tidak bisa dipisahkan dengan pendekatan yang dilakukan. Pendekatan tersebut diperlukan agar pembahasan yang dilakukan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah diterapkan.

²⁰ Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (LP3ES, Jakarta, 1990), hal. 80.

²¹ Drs. Komaruddin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis* (Penerbit Angkasa, Bandung, 1987), hal. 140.

Pendekatan menurut The Liang Gie, yaitu:

“keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati sasaran untuk memasuki suatu bidang ilmu pengetahuan dan memahami pengetahuan yang teratur bulat mengenai sasaran yang ditelaah ilmu tersebut.”²²

Sebagai usaha untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diajukan dan bertitik tolak dari pengertian diatas, maka pendekatan yang dipergunakan penulis adalah pendekatan sejarah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Charles Eisemen:

*“Political history is... the cronological discription of political fact of every kind, whether institusional, in the life a state (or a political society). Consider separately (internal policy) or in the relation between several states (or societies).”*²³

Dengan demikian sejarah politik merupakan penggambaran fakta-fakta politik secara kronologis, baik peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dalam suatu negara, maupun yang terjadi dalam hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Dalam penulisan ini akan digambarkan secara kronologis fakta-fakta politik yang berkaitan dengan hubungan Indonesia dan Australia.

²² The Liang Gie, *Ilmu Politik* (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1981), hal. 104.

²³ *Ibid.* hal. 87

BAB II

GAMBARAN UMUM INDONESIA-AUSTRALIA

Indonesia dan Australia dilihat dari letak geografisnya adalah dua negara yang saling berdekatan. Meskipun letaknya secara geografis saling berdekatan, namun Indonesia dan Australia adalah dua negara bertetangga yang sangat unik karena dalam segala hal keduanya saling berbeda.

Perbedaan-perbedaan antara Indonesia dan Australia antara lain terletak pada kondisi geografis, latar belakang sejarahnya, sistem politik, sistem sosial budayanya, serta sistem pertahanan dan keamanannya. Perbedaan-perbedaan ini biasa disebut sistem nilai¹, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan antara dua negara, khususnya Indonesia dan Australia.

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum antara Indonesia dan Australia yang mencakup perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kedua negara.

2.1 Kondisi geografis

Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, merupakan negara kepulauan terdiri atas kurang lebih 13.667 pulau dan gugusan pulau-pulau besar dan kecil, berada di sekitar khatulistiwa di 6⁰LU, 11⁰ LS, dan 94⁰ BT, 141⁰ BT. Sedangkan wilayah Australia berupa sebuah benua, merupakan satu kesatuan yang luas kecuali daerah negara bagian

¹ Hashim Jalal, *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa 1990*, (CSIS, Jakarta, 1997), hal. 32.

Tasmania yang berupa pulau kecil di sudut tenggara dan beribu-ribu pulau kecil membentang di samping landasan.

Australia terletak di belahan bumi selatan di sebelah tenggara kepulauan Indonesia tepatnya pada posisi antara 110°BT , 153°BT , $10,41^{\circ}\text{LU}$, $43,39^{\circ}\text{LS}$. Dari Inggris, Australia terletak di timur jauh bagian selatan pojok dunia.

Persamaan antara Indonesia dan Australia terletak pada kedekatan geografisnya. Indonesia merupakan tetangga Australia di Asia yang terdekat dengan Darwin, Ibukota Northern Territory yang letaknya hanya 670 km di sebelah tenggara Timor. Laut Timor lebarnya hanya 450 km antara Pulau Roti dan Pantai Kimberly di Australia Barat.

Walaupun dekat, namun keduanya saling berbeda dari segi kondisi geografisnya. Wilayah Indonesia didominasi oleh lautan, sedangkan Australia wilayahnya didominasi oleh daratan dengan luas $7.682.300 \text{ km}^2$ dan panjang garis pantainya 36.735 km. Luas Australia kira-kira empat kali luas Indonesia yang terbagi menjadi enam daerah negara bagian dan dua national territory, yaitu Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, Australia Selatan, Australia Barat, Australia Barat (Northern Territory) dan Wilayah Ibukota Australia (Australia Capital Territory).²

Wilayah Australia dikelilingi oleh lautan. Di sebelah barat dibatasi oleh Lautan Hindia, di sebelah selatan oleh Lautan Timor dan Laut Arafura, sebelah timurnya adalah Laut Coral dan Laut Tasman sedangkan sebelah selatan dibatasi oleh Laut Selatan. Jadi Australia tidak berbatasan darat dengan sebuah negarapun di dunia.

² Australia Selayang Pandang, hal. *iii*

Jarak merupakan hambatan utama bagi Australia di dalam maupun ke luar negeri sehingga sering disebut sebagai *Tyranny of Distance*.³ Jarak terdekat antar state adalah Sydney-Canberra, 294 km. Namun dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi berupa transportasi darat, udara, dan laut serta jaringan sarana dan prasarana informasi yang memadai, hambatan jarak yang dianggap sebagai *tyranny of distance* tersebut dapat diatasi dan jaringan Australia mampu menjangkau seluruh wilayah tidak hanya di dalam negeri tetapi ke seluruh belahan dunia.

Keunikan lain dari Australia adalah jumlah penduduknya yang sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya sehingga sering dijuluki sebagai *The Quite Continent*.⁴ Penduduknya hanya berjumlah 18,3 juta jiwa dan sebagian besar bertempat tinggal di kota-kota besar.⁵ Jumlah penduduk Australia ini sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa. Indonesia adalah negara tetangga Australia terdekat dan terbesar dalam arti wilayah dan jumlah penduduknya.

Dalam hubungan luar negeri ada persamaan antara Indonesia dan Australia. Mereka selalu memandang ke utara, barat laut dan timur laut karena disitulah letak pusat konsentrasi manusia. Mereka memperhatikan perkembangan negara-negara di daratan Asia bahkan Eropa dan Amerika Serikat yang terletak jauh di barat laut dan kurang memperhatikan negara-negara di bagian selatan dan tenggara kecuali dua dekade terakhir.⁶

³ Akhmad Khusyairi, *Politik Luar Negeri Australia di bawah PM Gough Whitlam dan Hubungannya dengan Indonesia*, dalam Disertasi S3 Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1995, hal. 51.

⁴ Philips Kitley (eds), *Australia di mata Indonesia* (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989), hal. 155.

⁵ *Australia Selayang Pandang*, hal. lii.

⁶ Prof. Dr.A.Khusyairi, MA., *Pasang Surut Hubungan Indonesia Australia*, dalam Argapura, hal 2.

Persamaan arah pandang seperti ini menyebabkan hubungan antara kedua negara menjadi kurang seimbang. Artinya, posisi Indonesia lebih penting bagi Australia daripada posisi Australia bagi Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, pernah mengatakan bahwa Australia bagi Indonesia seperti *apendik* (usus buntu) yang kalau terganggu rasanya sakit tetapi kalau di buang, tidak apa-apa. Ungkapan ini tentu saja kurang menyenangkan bagi Australia.

2.2 Latar Belakang Sejarah

Indonesia dan Australia memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Indonesia adalah bekas negara jajahan Belanda selama 350 tahun, dan dulu bernama Hindia Belanda. Setelah Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun yang kemudian merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang tapi direbut oleh Bangsa Indonesia sendiri melalui perang kemerdekaan. Harta dan nyawa dikorbankan oleh pahlawan-pahlawan bangsa untuk mencapai kata merdeka. Muncul semboyan "Merdeka atau Mati".

Setelah kemerdekaan dicapai, Bangsa Indonesia ternyata masih harus berjuang kembali untuk mempertahankan kemerdekaannya karena Belanda beserta sekutunya berusaha untuk menjajah Indonesia kembali dengan melakukan Agresi Militer Belanda I dan II.

Perjalanan panjang Bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaannya menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi dikalangan rakyatnya, terutama pada golongan tua, yang telah merasakan perjuangan tersebut. Juga membentuk orientasi luar negeri

Indonesia bersifat *non-aligned*. Sejarah pertumbuhannya sebagai negara muda telah memperkuat naluri bebas dan *non aligned* ini karena ketiga negara besar - US pada peristiwa pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948, AS pada peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta di tahun 1958, dan RRC pada peristiwa G 30 S/PKI, yaitu kup gagal di tahun 1965 - dianggap telah mencoba melakukan intervensi ke dalam negeri Indonesia.⁷ Karena itu tantangan yang besar yang akan dihadapi Indonesia adalah bagaimana menginternasionalkan jati dirinya di masa depan karena tuntutan dari perubahan-perubahan di bidang strategis dan ekonomi global maupun regional di kawasan Asia Pasifik.

Pengalaman sejarah Australia berbeda dengan Indonesia. Australia merupakan negara persemakmuran Inggris sehingga tidak pernah melakukan perjuangan atau pertempuran untuk memperoleh kemerdekaan. Masyarakat Australia juga tidak pernah mengangkat senjata untuk membela negaranya di tanahnya sendiri dalam menghadapi musuh yang datang.

Menurut sudut pandang Inggris, Australia resmi menjadi milik Kerajaan Inggris tanggal 22 Agustus 1770, diproklamasikan oleh Kapten James Cook di Teluk Botany, dengan pengertian bahwa bumi Australia bukan milik siapa-siapa (*terra nullius*). Daerah ini dinamai oleh Kapten Cook sebagai New South Wales (NSW).⁸

⁷ Jusuf Wanandi, *Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia*, dalam Analisis CSIS, No. 5, 1992, hal. 431.

⁸ Ratih Hardjono, *Suku Putihnya Asia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992), hal.

Pada tahun 1780 Benua Australia mulai dibuka sebagai tempat pembuangan narapidana Inggris karena penjara di Inggris tidak mampu menampung narapidana yang jumlahnya semakin besar akibat revolusi industri.

Pelayaran pertama narapidana dari Inggris ke Australia di bawah pimpinan Kapten Arthur Philip, tiba di pelabuhan Jackson (sekarang Sydney) pada tanggal 20 Januari 1788. Pelayaran tersebut membawa 736 tahanan dan 300 orang pegawai penjara. Dalam tahun-tahun berikutnya upaya menambah jumlah pemukim di Australia tidak hanya melalui pengiriman narapidana tetapi juga imigran bebas dari Inggris. Dan pada tahun 1850, dengan ditemukannya emas di tanah Australia yang tandus, imigran yang datang tidak hanya dari Inggris tetapi juga dari negara-negara lain seperti dari Eropa, Timur Tengah, Asia terutama dari Cina.⁹

Sejalan dengan semakin banyaknya pemukim, maka bermunculan pula daerah-daerah koloni baru. Daerah Van Diemen's (sekarang Tasmania) melepaskan diri dari New South Wales pada tahun 1825, Australia Barat (*Western Australia*) dibuka tahun 1829, Australia Selatan (*South Australia*) tahun 1836, Victoria tahun 1851 dan Queensland tahun 1859.¹⁰

Dalam masa-masa selanjutnya, terjadi permasalahan-permasalahan yang hanya bisa dipecahkan secara bersama oleh keenam daerah koloni, misalnya menyangkut hubungan perdagangan antar daerah koloni dan masalah pertahanan terhadap berbagai ancaman dari luar. Oleh karena itu akhirnya melalui perundingan yang cukup lama muncul kesepakatan untuk membentuk federasi seperti usul Sir Henry Parkes, yang dikenal sebagai Bapak

⁹ Ibid, hal. 64-72.

¹⁰ Ibid,

Australia. Kesepakatan yang tertuang dalam *The Commonwealth of Australian Constitution Act* itu mendapat persetujuan dari Inggris pada bulan Juli 1900, dan berlaku sejak 1 Januari 1901. Itulah yang menandai berdirinya Australia sebagai negara merdeka dengan nama *The Commonwealth of Australian*.¹¹

2.3 Sistem Politik

Sistem Politik adalah suatu sistem yang mempunyai ruang lingkup di bidang politik, meliputi bagian-bagian, lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaannya.¹²

Indonesia menganut sistem politik yang masih dikembangkan berdasarkan Pancasila. Kekuasaan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga tertinggi negara, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Di samping lembaga tertinggi negara, Indonesia memiliki lembaga tinggi negara yang antara lain terdiri atas Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPA (Dewan Pertimbangan Agung), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan MA (Mahkamah Agung).

Dalam sistem politik Indonesia tidak dikenal adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang tegas dan jelas namun yang ada adalah pembagian kekuasaan (*distribution of power*) di mana masing-masing lembaga tinggi negara berhubungan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga diharapkan akan terjadi

¹¹ Ibid, hal. 226.

koordinasi dengan adanya saling keterkaitan di antara lembaga-lembaga tinggi negara.¹³

Sistem politik Indonesia menganut sistem presidensial yang unik. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden bekerja sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif (parlemen) akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi kepada MPR yang anggotanya juga berasal dari DPR ditambah utusan daerah dan golongan. Dari sini dapat dilihat bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak parlementer namun juga tidak sepenuhnya presidensial.¹⁴

Sistem politik yang dianut oleh Australia adalah sistem politik liberal dengan cirinya yang mengutamakan hal-hal yang sifatnya individual dan kebebasan.

Sistem politik dalam negeri Australia merefleksikan suatu sistem campuran antara warisan Inggris dan pengalaman yang diadopsi dari Amerika Serikat. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen seperti halnya di Inggris. Sedangkan bentuk negaranya federal, yakni satu pemerintahan federasi, yakni satu pemerintahan federal dengan enam negara bagian ditambah dua daerah teritory merupakan pengaruh dari Amerika Serikat.

Dari sistem campuran tersebut muncullah dua pengaturan konstitusi. Australia seperti di Amerika Serikat, mempunyai konstitusi tertulis untuk menentukan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Seperti di Inggris, praktek-praktek politik

¹² Mochtar Mas'od & Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, 1997, hal. 24.

¹³ Drs. Inu Kencana Syafei, *Sistem Politik Indonesia*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994), hal. 63-72.

Australia sangat dipengaruhi oleh konvensi yang walaupun bukan merupakan bagian dari konstitusi tetapi diterima dan dipatuhi oleh para politisi.¹⁴

Secara garis besar, sistem pemerintahan federal di Australia dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. *Commonwealth of Australian* didasarkan pada konstitusi tertulis yang hanya bisa diubah melalui referendum.
2. Kepala negara, yang resminya memegang kedaulatan atas Australia, adalah Gubernur Jendral, sebagai wakil dari Raja/Ratu Inggris. Dalam pemerintahan sehari-hari, berdasarkan konvensi yang bertanggung jawab, Gubernur Jendral hanya sebagai lambang, karena pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Perdana Menteri yang disebut Dewan Eksekutif Federal.
3. Parlemen terdiri atas Senate dan House of Representative. Senate merupakan wakil dari negara-negara bagian, House of Representative merupakan wakil dari seluruh rakyat.

Konstitusi Persemakmuran Australia (*The Commonwealth of Australian Constitution Act*) merupakan kerangka kerja sistem politik negeri itu. Konstitusi tersebut menciptakan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kekuasaan eksklusif yang hanya bisa dijalankan oleh pemerintah federal. Contohnya adalah masalah luar negeri dan pertahanan, imigrasi, bea cukai dan pajak.

¹⁴ Ibid, hal. 93-98

¹⁵ Richard H. Chauvel, *Budaya dan Politik Australia* (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992), hal 5.

2. Kekuasaan bersama yang dapat dijalankan baik oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian. Bila terjadi konflik antara Undang-undang negara bagian dan Undang-undang negara federal, yang menang adalah yang terakhir. Contoh kekuasaan bersama adalah pajak dan bank.
3. Kekuasaan sisa adalah semua kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi dan dijalankan oleh pemerintah negara bagian. Yang paling penting dari kekuasaan ini antara lain pendidikan, kesenian, perumahan dan polisi.¹⁷

Di Australia, satu hal yang menjadi ciri khas kehidupan politiknya yaitu adanya kelugasan dalam pengertian politik dan tanpa adat istiadat yang menghalangi. Hal ini dapat dilihat dari perdebatan dalam parlemen yang seringkali diwarnai dengan lontaran kata-kata keras dan kasar.¹⁸ Tampaknya hal itu sebagai perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh Australia yaitu Demokrasi Liberal. Kebebasan individu yang menyangkut kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat didefinisikan secara lugas. Orang-orang Australia cenderung melihat proses politik dengan sikap penuh curiga yang mendekati sinisme. Para pemimpin politik Australia jarang yang dihormati, ataupun disenangi, bahkan oleh pendukung partai mereka sendiri.¹⁹

Seperti dalam negara demokrasi pada umumnya kehidupan politik Australia dilengkapi dengan sarana untuk menyalurkan aspirasi melalui partai-partai politik serta kelompok-kelompok penekan. Sepanjang sejarah kehidupan politik Australia meskipun terdapat beberapa partai politik tetapi hanya ada dua yang merupakan partai politik utama, yaitu Partai Buruh dan

¹⁷ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia* (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999), hal. 62.

¹⁸ Ratih Hardjono, *op.cit.*, hal. 216.

Partai Liberal. Kedua partai umum tersebut yang saling bersaing untuk merebut mayoritas dalam *House of Representatif*.

Kelompok-kelompok penekan yang ada di Australia secara umum dapat dibedakan atas dua kelompok besar. Jenis pertama adalah kelompok-kelompok yang bersifat *sectional*. Kelompok ini mewakili salah satu golongan dan atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam masyarakat, seperti golongan buruh, pengusaha, petani, agama dan lain-lain. Eksistensi organisasi penekan semacam ini dapat bertahan lama, selama kebutuhan kelompok yang diwakilinya terpenuhi. Jenis kelompok kedua adalah *promotional*. Kelompok ini terbentuk untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu, seperti kelompok-kelompok yang memperjuangkan masalah lingkungan, masalah binatang, hak asasi dan lain-lain.²⁰

Selain partai politik dan kelompok penekan, media massa juga memegang peranan penting dalam kehidupan politik Australia. Peran media massa baik cetak maupun elektronik tidak hanya menjadi sarana pendidikan, hiburan, informasi, tetapi menyediakan forum perdebatan, kritik, menyampaikan pengumuman dan memberikan saran. Apalagi sebagian rakyat Australia bukanlah anggota partai politik dan mereka bergantung pada media massa untuk memperoleh pengetahuan mengenai berita-berita dan komentar-komentar politik.²¹

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi liberal, Australia menjunjung tinggi kebebasan pers yang dianggap sebagai bagian dari hak untuk mengeluarkan pendapat dan informasi. Media massa Australia menganut paham kebebasan pers liberal (*libertarian theory of press freedom*),

¹⁹ Richard Chauvel, op. Cit. hal. 31.

²⁰ Zulfikri Hamid, op. cit., hlm. 299.

artinya pers memiliki kebebasan absolut.²² Pers bebas menulis apa saja yang menurutnya patut ditulis, kecuali fitnah pribadi dan hasutan melakukan *desersi* waktu perang. Teori kebebasan pers ini juga tidak mengenal lembaga ijin terbit dan sensor. Siapa saja yang mampu boleh menerbitkan surat kabar dan pemerintah sama sekali tidak mempunyai hak untuk membatasinya.

Adanya pers bebas seperti demokrasi di atas ternyata tidak jarang justru membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi Australia. Berita-berita media massa seringkali menyulut terjadinya ketegangan hubungan antara Australia dengan negara-negara tetangganya. Pemberitaan pers Australia tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri tetangga seringkali dinilai kurang proporsional, menyinggung perasaan dan bahkan cenderung mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Itulah fenomena kehidupan politik di Australia yang bersifat kompetitif, konfrontatif, dan penuh pertentangan dalam gayanya, pragmatis dalam perumusan ide-ide kebijaksanaan. Proses politik dijalankan dalam kerangka kelembagaan yang diwarisi dari Inggris dan dipinjam dari Amerika.

2.4 Sistem Sosial Budaya

Indonesia masyarakatnya pluralistik yang terintegrasi menjadi satu kesatuan sebagai satu bangsa yang kaya akan ragam budaya, seperti Jawa, Madura, Sunda, Batak, Asmat dan lain-lain. Beragam kelompok yang ada

²¹ Ibid., hlm 325

²² Tjipta Lesmana, *Kasus The Sydney Morning Herald Kebebasan Amerika Serikat dan Pers Liberal*, dalam Philips Khitley, David Reeve, Richard Chauvel, *Australia di Mata Indonesia* (PT. Gramedia, Jakarta, 1986), hal. 295-299.

mempunyai nilai budaya bersama yang diwarisi dan dibina sepanjang sejarah dengan sinkretisme merupakan karakteristik utama. Bersifat communalist, dimana peran bersama atau community lebih penting dari peran individu, atau minimal mencari suatu keseimbangan di antara keduanya. Karena itu pendekatannya lebih bersifat konsensus dan bukan mencari siapa yang menang.²³

Sebaliknya, Australia adalah bangsa yang menganut paham liberalisme dimana hak hak individu sangat penting artinya. Perdebatan, kecaman serta kritik langsung dan tajam untuk mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang merupakan hal yang biasa dalam masyarakat Australia.

Australia dalam kategori yang sangat umum termasuk "Barat" dalam tata nilai kemasyarakatannya. Secara fisik (geografis) letak Australia memang sangat dekat dengan Benua Asia, atau tepatnya di pojok Asia. Tetapi secara psikologis antara bangsa Australia dengan bangsa-bangsa di Asia memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Australia merupakan benua orang "kulit putih" karena latar belakang sejarahnya terkait dengan Eropa (terutama Inggris). Sedangkan benua Asia merupakan lingkungan bangsa kulit "berwarna".

Sebagai bangsa yang mempunyai keturunan biologis dan kebudayaan ras kulit putih, bangsa Australia mempunyai sikap sosial tertentu terhadap bangsa-bangsa kulit berwarna, sikap yang sombong (arrogant), sok tahu dan sok pemimpin. Sebagai bangsa yang maju yang hidup dalam lingkungan kurang maju Australia merasa superior dalam segala hal yang seringkali membuatnya memaksakan nilai-nilai dan persepsinya sebagai bangsa yang

²³ Jusuf Wanandi, *op. Cit.*, hal. 433.

benar dan agar diterima oleh negara-negara tetangganya. Perasaan rasial dan keunggulan kulit putih ini masih terasa di kalangan masyarakatnya²⁴, dan seringkali menjadi masalah bagi Australia dalam bergaul dengan negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia.

Dalam kaitannya dengan sistem sosial dan budaya, kondisi fisik, yaitu letak geografis Australia, juga membentuk sikap sosial tertentu bangsa Australia. Benua Australia merupakan kawasan yang terletak jauh di selatan. Dikelilingi oleh samudera yang luas, jauh dari pusat keramaian dunia dan dekat dengan daerah kutub bumi yang tidak berpenghuni. Kondisi seperti ini menjadikan Australia merasa menjadi bangsa terpencil dan karenanya secara psikologis cenderung bertindak berlebihan supaya kehadirannya diperhitungkan oleh bangsa lain, khususnya bangsa Asia Tenggara. Keinginan diakui sebagai pemiimpin di lingkungannya juga didukung oleh adanya kenyataan pahit sebagai ras kulit putih yang hidup tersediri dalam lingkungan berwarna.

Masyarakat Australia sebenarnya adalah masyarakat yang *inward looking*, sebagian besar karena kondisi geografisnya yang berupa sebuah benua dengan tingkat kepadatan yang rendah.²⁵ Fokus ke dalam merupakan keharusan demi kelangsungan hidup mereka dalam usaha mengolah alamnya karena letaknya yang terpencil, sekaligus jauh dari naagara induknya, yaitu Inggris. Dengan demikian letak dan kondisi lingkungan fisik telah ikut pula membentuk sistem sosial dan budaya Australia.

²⁴ Wahyono S.K., *Australia dan Persepsi Ancaman dari Utara*, dalam Philips Kitley (eds), *op. cit.*, hlm. 291.

²⁵ Jusuf Wanandi, *op.cit*, hal. 428.

2.5 Sistem Pertahanan dan Keamanan

Sistem pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Australia memiliki perbedaan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sistem hankamrata) yaitu suatu upaya pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh seluruh kekuatan nasionalnya, dengan TNI sebagai intinya. Hankamrata mencakup segenap kegiatan, persiapan dan penggunaan seluruh rakyat dan wilayah nasional termasuk segala daya mampu yang mereda di atas dan didalamnya untuk pertahanan dan keamanan negara dan bangsa. Politik pertahanan dan keamanan lebih bersifat defensif aktif diarahkan pada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dalam penanggulangan segala macam hambatan, tantangan ancaman dan gangguan. Hal ini berarti sistem pertahanan dan keamanan Indonesia bersifat mandiri.

Berbeda dengan Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan yang dianut Australia sejak berdirinya adalah menggantungkan diri pada sekutunya. Sejak menjadi koloni, kemudian menjadi negara merdeka tahun 1901 sampai dengan Perang Dunia II, pertahanan dan keamanan Australia sebagian besar tanggungjawabnya diserahkan kepada *British Navy*. Setelah Perang Dunia II saat kemampuan Inggris mulai menurun, Australia mulai memalingkan diri ke Amerika Serikat.

Kekhawatiran akan terjadinya invasi asing terus ada sepanjang sejarah Australia seperti dikatakan oleh **Werner Levi**:

Dalam semua debat di Australia mengenai hubungan luar negeri selalu terasa adanya kekhawatiran yang akan segera meledak bila mendapat provokasi sekecil apapun. Rasa khawatir merupakan *leitmotif* pemikiran Australia mengenai politik luar negeri, dan orang

Australia selalu merasa menghadapi banyak *agressor* potensial. Pada awal sejarah negeri inipun Perancis dan Amerika Serikat sudah dicurigai. Pada paruh kedua abad sembilan belas Rusia dan Jerman ikut dicurigai.... Kemudian Cina, dan kemudian sekali Jepang menggantikan negara-negara Barat. Sekarang Indonesia, India, Cina dan Jepang pun dikhawatirkan sebagai *agressor* potensial.²⁶

Persepsi Australia tentang ancaman memang sangat dipengaruhi oleh pengalaman pahit Australia menghadapi konflik-konflik bersenjata dengan pihak lain. Secara historis, persepsi Australia terhadap ancaman selalu berubah pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Australia sangat takut pada Perancis di bawah Napoleon. Setelah Napoleon jatuh, persepsi ancaman Australia berubah kepada Rusia. Setelah Kekaisaran runtuh, Australia menganggap Jepang sebagai ancaman utama. Ancaman dari Jepang ternyata kemudian menjadi kenyataan pada Perang Dunia II tahun 1941-1945 Jepang menyerang Australia lewat Darwin.

Setelah Jepang kalah karena di bom atom oleh AS pada 1945, persepsi ancaman Australia berganti lagi menjadi ancaman dari Cina. Ketakutan akan ancaman Cina muncul akibat kemenangan komunis pada Revolusi di Cina dan terlibatnya Cina dalam Perang Korea pada awal tahun 1950-an. Persepsi ancaman dari Cina ini bertahan cukup lama sampai tahun 1970-an.

²⁶ Werner Levi, *Australian Foreign Policy*, dalam Hilman Adil, *Kebijaksanaan Australia terhadap Indonesia 1962-1966* (CSIS, Jakarta, 1997), hal. 6.

Indonesia juga dianggap sebagai ancaman oleh Australia pada zaman kepemimpinan Soekarno karena kedekatannya dengan blok komunis dan pada masa ini terjadi masalah Irian Jaya dan Konfrontasi Indonesia Malaysia.¹⁵ Dari tinjauan historis di atas, kemudian timbul persepsi dari Australia terhadap ancaman dari utara.

Ancaman dari utara timbul oleh dua hal: yaitu *pertama*, secara historis Australia pada Perang Dunia II diserang oleh Jepang lewat utara, yaitu Darwin, dan *kedua*, karena alasan geografis dimana ancaman yang ada pasti datang dari daerah utara dan tidak mungkin datang dari selatan.²⁷ Musuh tidak akan mungkin datang dari Antartika di selatan (karena tidak ada penduduk di Kutub Selatan) dan juga dari arah timur yaitu dari negara-negara di Kepulauan Pasifik (karena terhalang oleh Samudera Pasifik dan negara-negara kecil di kawasan itu yang telah diikat dengan kerjasama South Pacific Forum ditambah dengan ANZUS Pact = Australia, New Zealand and United States Pact, yaitu perjanjian keamanan bersama antara negara Australia, New Zealand dan Amerika Serikat). Musuh juga tidak mungkin datang dari barat, dari lautan Hindia Belanda yang luas dan ganas. Maka satu-satunya arah datangnya musuh adalah dari utara.²⁸

Citra bahaya dari utara didasari oleh beberapa pertimbangan: pertama, standar kehidupan Australia yang tinggi dibandingkan "musuh kuning"nya dari Asia. Asia dianggap berniat mengambil alih Australia walau tanpa disertai alasan yang jelas. Rasa takut terhadap "bahaya kuning" mulai

¹⁵ Robert J. Oneil, *Australians Perceptions of Threats to Their Security*, dalam Charles E. Marrison (eds.), *Threats to Security in Asia Pasific* (Asia Pasific Book, 1983), hal. 185-187.

²⁷ Kim Beazley, *Australia Defence Policy*, dalam Desmond Bell (eds.), *Australia And The World: Prolouge And prospect*, Strategic and Defence Studies Center, ANU, Canberra, Australia, 1990, hal. 348.

²⁸ Wahyono S.K., *op. Cit.* Hal. 292-293.

ada sejak tahun 1860-an saat buruh Inggris berhadapan untuk pertama kalinya dengan buruh Asia (Cina) di pertambangan emas, dimana buruh-buruh Cina bekerja lebih keras dan lebih efisien serta mau menerima upah yang rendah. Hal ini mengancam pekerjaan buruh-buruh Inggris, sehingga pemikiran “bahaya kuning” ini berdasarkan perasaan rasial orang-orang Australia.²⁹ Kedua, rasa takut terhadap “bahaya kuning” ini adalah perasaan terancam melihat jumlah penduduknya yang sangat kecil dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk dan luas negara-negara Asia yang berada di utara negara ini. Ketakutan terhadap “bahaya kuning” erat hubungannya dengan kepercayaan Australia yang tidak mampu menguasai alamnya, rasa takut karena faktor geografis, rasa takut Australia “putih” kepada Asia “luning”. Faktor geografi dan demografi inilah yang menjadi perhitungan Australia dan mendasari rasa takut itu. Restrukturisasi pertahanan Australia harus mampu menghilangkan ancaman terhadap “bahaya kuning” itu dan memberikan rasa aman. Ketakutan akan “bahaya kuning” dari utara merupakan obsesi masyarakat Australia yang seringkali dibesar-besarkan oleh kelompok konservatif yang ingin mempertahankan ikatan batin dengan Inggris.³⁰

Hal-hal di atas menyebabkan lahirnya konsep *defence in depth*, artinya lini pertama pertahanan harus ditarik sejauh mungkin dari Benua Australia.³¹ Konsep strategi ini menentang dikuasainya wilayah disekeliling Australia oleh pihak-pihak yang tidak bersahabat.

²⁹ Ratih Hardjono, *op.cit.*, hal. 180.

³⁰ *Ibid*, hal. 183-203.

³¹ Hilman Adil, *op.cit.* hal. 6.

Segi pertahanan yang dikembangkan Australia selanjutnya diarahkan untuk menghadapi musuh dari barat laut dan utara, baik ketika masih menggunakan doktrin *Forward Defence* sampai pertengahan tahun 1970-an, maupun atas dasar doktrin *Continental Defence* yang mulai berlaku tahun 1976 (*Australian Defence Paper 1976*).³³

Arti Doktrin *Forward Defence* adalah bahwa keamanan Australia tergantung pada kekuatan AS dan negara Eropa Barat lainnya, sedangkan ancaman potensial untuk Australia adalah seharusnya dihadapi di wilayah-wilayah lain seperti Asia, jauh sebelum masuk ke daratan Australia.

Untuk masa sekarang, ciri-ciri utama kebijakan pertahanan Australia adalah:

- Mempertahankan kemampuan pertahanan nasional yang tangguh. Suatu Angkatan Bersenjata Australia (*Australian Defence Force-ADF*) yang kuat dan kapabel adalah hal yang fundamental bagi keamanan Australia.
- Hubungan Aliansi Anzus (*Anzus Alliance*) dengan Amerika Serikat. Pentingnya Aliansi Anzus ini ditegaskan kembali oleh Deklarasi Sydney (*Sydney Declaration*) yang dibuat pada tahun 1996 dalam pertemuan Menteri Australia-Amerika Serikat (*Australia-United States Ministerial meeting*).
- Memperluas hubungan keamanan Australia yang bilateral, regional dan multilateral (termasuk melalui dialog keamanan yang diperluas). Australia telah menggalang berbagai jenis hubungan pertahanan dan keamanan yang telah berlangsung lama dengan kebanyakan negara regional.

³³ Wahyono S.K., , op. cit., hlm. 233.

Hubungan-hubungan ini meletakkan dasar bagi upaya perdamaian dan keamanan regional.

- Bersama dengan Malaysia, Singapura, Selandia Baru dan Inggris, Australia adalah anggota Five Power Defence Arrangement (Pengaturan Pertahanan Lima Negara). Pengaturan pertahanan ini tetap merupakan unsur penting dari kehadiran pertahanan regional Australia. Australia juga menjadi anggota satu-satunya forum keamanan kawasan ini, ASEAN Regional Forum (Forum Regional ASEAN) yang menghimpun sebagian besar negara Asia Pasifik untuk membicarakan masalah keamanan regional.³⁴

Dua tugas sentral dan langgeng inti kebijakan pertahanan dan keamanan Australia adalah memusatkan perhatiannya pada pertahanan wilayah dan kepentingan strategisnya, serta mengakui bahwa keamanannya terkait dengan perdamaian dan stabilitas regional yang lebih luas.³⁵

Oleh karena itu Australia berupaya untuk meningkatkan keamanan Asia Pasifik dengan bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memastikan kawasan ini tetap aman. Australia melakukan hal ini melalui hubungan bilateralnya dan hubungan aliansi yang penting bagi keamanan regional, juga melalui kelompok-kelompok seperti Five Power Defence Arrangement - FPDA (Pengaturan Pertahanan Lima Negara) dan ASEAN Regional Forum - ARF (Forum Regional ASEAN).

³⁴ Australia, *Selayang Pandang*, hal. 97

³⁵ *Ibid.*

BAB III

FLUKTUASI HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA

Indonesia adalah negara tetangga yang terbesar bagi Australia dari sudut luas wilayah dan jumlah penduduknya. Dengan posisi geografis yang menghubungkan Australia dengan negara-negara di Benua Asia, Indonesia menempati posisi strategis dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri Australia. Takdir geografis yang demikian tidak pernah dapat ditolak, kecuali kedua bangsa harus mampu menciptakan suatu kemitraan yang harmonis yang dapat menjamin kestabilan kawasan mereka.

Hubungan kemitraan yang harmonis, memang, dibangun oleh kedua negara, namun dalam perkembangannya hubungan Indonesia-Australia banyak diwarnai oleh masalah-masalah yang memperburuk hubungan tersebut sehingga pola hubungan yang terjadi antara Indonesia dan Australia bersifat fluktuatif.

Untuk dapat memprediksikan bagaimana prospek hubungan Indonesia-Australia pasca jajak pendapat di Timor Timur, 30 Agustus 1999, maka dalam bab ini akan dikaji beberapa masalah yang berpengaruh terhadap fluktuasi hubungan kedua negara. Pertama, adalah masalah kemerdekaan Indonesia; kedua, masalah Irian Jaya; ketiga, masalah pemberontakan PRRI di Indonesia; keempat, konfrontasi antara Indonesia-Malaysia; dan kelima, adalah masalah Timor Timur.

3.1 Masalah Kemerdekaan Republik Indonesia

Sampai dengan Perang Dunia II Australia tidak menaruh perhatian pada Hindia Belanda (Indonesia) karena beberapa alasan.¹ *Pertama*, Australia percaya pada kemampuan Belanda dalam menjaga keamanan wilayahnya yang sampai Perang Dunia II tidak pernah memberikan gangguan terhadap keamanan Australia. *Kedua*, Australia tidak pernah mengurus politik luar negerinya sendiri (Australia mulai mengurus politik luar negerinya sendiri sejak awal Perang Dunia II dengan dibukanya perwakilan Australia di Washington, Tokyo dan Ottawa). Baru pada Perang Dunia II Australia mulai memberikan perhatian setelah Indonesia diduduki Jepang. Dari pangkalan di Indonesia dan Papua New Guinea, Jepang melakukan serangan udara terhadap wilayah Australia bagian Utara. Darwin, Broome, dan Wyndham berkali-kali di bom, bahkan New Castle dan Sydney pernah mendapat serangan Torpedo.² Peristiwa ini baru pertama kali dialami dan sebelumnya belum pernah wilayah Australia terlibat peperangan secara langsung.

Kejadian ini merupakan pelajaran bagi Australia akan pentingnya daerah di sebelah utara dan barat laut sebagai penyangga keamanannya. Sebelumnya Australia percaya kepada kekuatan Inggris dan Belanda sebagai pelindung yang berpangkalan di Singapura. Setelah jatuhnya Singapura kemudian Indonesia ke tangan Jepang, Australia menjadi sasaran terbuka bagi invasi Jepang ke selatan. Kejadian di atas mendasari pemikiran politik luar negeri Australia ke Indonesia pada masa-masa selanjutnya.

¹ Akhmad Khusyairi, *Pasang Surut Hubungan Australia-Indonesia*, dalam *Argapura*, Vol. 18 No. 1 dan 2, 1998, hal. 3.

Pada waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Partai Buruh sedang berkuasa di Australia. Pemerintahan PM Chieflly dengan Menteri Luar Negerinya Evatt dari Partai Buruh dihadapkan pada persoalan rumit dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi, secara ideologi, para pemimpin Partai Buruh menentang kolonialisme, karenanya mereka tampak cukup bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka secara pribadi menghargai adanya Prinsip Piagam Atlantik yang menyebutkan bahwa hak setiap orang untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Sebagai konsekuensinya mereka bersimpati terhadap segala perjuangan kemerdekaan setiap negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.³ Taksiran jangka panjang mereka mengenai situasi politik Indonesia adalah, bahwa kekuatan nasionalisme akhirnya akan tampil sebagai unsur dominan pengendali Indonesia, termasuk dalam mencegah menjalarnya komunisme.⁴

Namun disisi lain, berdasarkan pertimbangan keamanan mereka menginginkan kembalinya kekuasaan Belanda ke Hindia Indonesia, karena hilangnya kekuasaan kolonial Belanda dari Kepulauan Indonesia akan melahirkan ancaman dari utara - *Horde from Asia* dan *Yellow Peril* - muncul kembali.⁵ Ada juga pertimbangan aspek hukum dalam masalah Indonesia. Belanda masih diakui secara *de jure* sebagai penguasa yang berdaulat, dan

² T.B. Millar, *Australia in Peace and War, External Relation 1788-1977*, Canberra, 1978, dalam *ibid*.

³ Hilman Adil, *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962*, terj. ILV-LIPI, (Djambatan, Jakarta, 1993), hal. 33-34.

⁴ *Ibid*, hal. 11

⁵ Hilman Adil, *Beberapa Segi Politik Bertetangga Baik antara Indonesia dan Australia*, dalam *Prisma*, No. 9, September 1997, hal. 21.

karena itu masih dipandang sebagai penguasa sah yang mengendalikan kepulauan itu.⁶

Fakta di atas menimbulkan suatu keraguan Australia terhadap Indonesia yang merdeka dan berdaulat antara rasa simpati dan kekhawatiran terhadap keamanannya. Sehingga pada waktu itu pemerintah Australia belum ingin terlibat terlalu jauh dalam persoalan kolonial di Indonesia dan berusaha memberikan simpati kepada usaha-usaha menyelesaikan persoalan kemerdekaan, yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan para nasionalis Indonesia.⁷ Rasa simpati tersebut pernah diungkapkan Menteri Luar Negeri Australia, Dr. Herbert Vere Evatt, pada April 1943 dalam kunjungannya ke AS, yang menyarankan agar "Hindia Belanda dan Australia dapat menjadi mitra erat dalam mengembangkan dan mendatangkan cara hidup yang lebih baik bagi rakyat Indonesia."⁸

Pada tanggal 17 Agustus 1945, kaum nasionalis Indonesia, dibawah pimpinan Soekarno-Hatta, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sementara pemerintah Australia masih dilanda keraguan atas sikapnya, kaum buruh galangan kapal Australia mewujudkan dukungan dan simpati mereka dengan melarang semua kapal Belanda memasuki perairan Australia. Hal ini disebabkan Belanda menggunakan Australia sebagai pelabuhan untuk menguasai kembali Republik Indonesia, yang kala itu belum terbentuk, melalui tindakan militer.

⁶ Hilman Adil, *Kebijakan Australia Terhadap Indonesia 1962-1966*, (CSIS, Jakarta, 1997), hal. 10.

⁷ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999), hal. 419.

⁸ Susan Critchley, *Hubungan Australia dengan Indonesia: Faktor Geografi, Politik dan Strategi Keamanan* (Terjemahan Sugiarta Sriwibawa; Jakarta: Penerbit UL, 1995), hal. 13.

Dukungan untuk kemerdekaan Indonesia juga datang dari tentara Australia.⁹ Sejak bulan Agustus 1945 sampai sekitar bulan Januari 1946, 50.000 tentara Australia terlibat dalam administrasi pasca perang di seluruh Indonesia kecuali di Jawa dan Sumatera. Tugas-tugas mereka adalah menerima penyerahan tentara Jepang, membebaskan tentara sekutu yang menjadi tawanan perang, dan mempersiapkan kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda. Di tengah berkecamuknya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, ada kemungkinan tugas yang terakhir ini menimbulkan konflik antara bangsa Indonesia dan Australia. Tetapi yang terjadi tentara Australia dihargai oleh rakyat Indonesia karena mereka tidak menyukai kolonialisme Belanda dan menunjukkan rasa simpati pada perjuangan rakyat Indonesia.

Akhirnya Pemerintah Australia menunjukkan rasa simpatinya kepada Indonesia dengan keyakinan bahwa kekuatan nasionalis di Indonesia pada akhirnya akan naik menjadi kekuatan utama sebagai pengendali negara dan tameng komunisme.¹⁰ Selain itu Chiefley juga berkeyakinan cepat atau lambat Belanda harus angkat kaki dari Indonesia.¹¹

Dukungan Australia terhadap Indonesia ditunjukkan dengan keikutsertaannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum internasional. Australia melalui wakil tetapnya di PBB, Sir Richard Kirby dan Tom Chrithley, terus mengikuti perkembangan di Indonesia setelah terjadinya penandatanganan Perjanjian Linggarjati antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia. Perjanjian yang disetujui pada tanggal 15

⁹ Martin O'Hare dan Anthonie Reid, *Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal. 33.

¹⁰ Hilman Adil, *Beberapa Segi Politik Bertetangga Baik Antara Indonesia dan Australia*, op.cit. hal. 22.

¹¹ Ibid.



November 1946, berlanjut dengan pengakuan Belanda secara *de facto* atas kemerdekaan Indonesia terhadap wilayah-wilayah Jawa, Madura dan Sumatera pada 25 Maret 1947. Oleh karena itu Australia, yang ketika itu menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, mengecam aksi militer Belanda pada 20 Juli 1947 yang berusaha merebut kembali kekuasaan Republik Indonesia di Jawa. Serikat buruh pelabuhan Australia, terutama *Waterside Worker Federation* (WWF), kembali mengadakan boikot dan pelarangan terhadap kapal-kapal Belanda yang membawa persenjataan untuk dikirim kepada militer Belanda di Indonesia.

Sejak itu Australia mulai memasuki secara langsung ke dalam persoalan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 30 Juli 1947 India dan Australia mengajukan sengketa Indonesia-Belanda ke PBB. India mengajukan permasalahan tersebut ke Dewan Keamanan PBB, dengan alasan masalah Indonesia "membahayakan perdamaian dunia" (pasal 34 Piagam PBB). Australia, juga segera mengajukan masalah itu ke Dewan Keamanan dengan alasan "Pelanggaran Perdamaian" (pasal 39 Piagam PBB), yang dalam hal ini Dewan Keamanan dalam waktu 24 jam harus bertindak memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.¹² Peristiwa ini mengandung arti penting sekali karena dengan itu pertikaian Indonesia-Belanda itu diakui oleh dunia internasional dan bukan semata-mata sebagai masalah dalam negeri Hindia Belanda. Australia mengajukan argumen bahwa Republik sudah merupakan suatu negara dalam hukum internasional, dan PBB harus menengahi sengketanya dengan negari Belanda. Wakil-wakil Australia di PBB mengusulkan dan mengajukan negaranya untuk bertindak sebagai arbitrase di dalam persoalan Indonesia dan Belanda. Usul itu ditolak, dan

¹² Akhmad Khusyairi, *op. cit.*, hal. 5

yang diterima DK PBB adalah usul Amerika Serikat untuk membentuk Komisi Jasa-jasa Baik yang terdiri dari tiga anggota Dewan Keamanan. Kedua pihak dalam sengketa itu harus memilih satu anggota, dan anggota yang ketiga dipilih kedua anggota yang telah terpilih.¹³ Walaupun usulnya ditolak, namun Australia memperoleh kepuasan karena dipilih RI menjadi anggota Komisi Jasa-jasa Baik (*Good Offices Committee*).¹⁴ Pihak Belanda memilih Belgia dan kedua anggota memilih Amerika Serikat untuk melengkapi komite ini. Peran Australia dalam Komisi Jasa-jasa Baik sangat kritis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tercermin dengan disepakatinya Perjanjian Renville 17 Januari 1948 antara RI dan Belanda. Melalui keanggotaannya di dalam *United Nations Committee on Indonesia (UNCI)*, Australia mendesak dua negara anggota negara lainnya, terutama AS, agar menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Belanda agar segera merundingkan penyelesaian terakhir sesuai dengan persetujuan tersebut. Akhirnya kedaulatan Indonesia diserahkan dari Belanda ke RI melalui Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada masalah kemerdekaan Indonesia hubungan Indonesia-Australia sangat baik meskipun pada awalnya terjadi sikap ambivalensi Australia. Namun secara umum dari pihak tentara Australia, masyarakat Australia khususnya dan pemerintah Australia pada saat itu mendukung kemerdekaan Indonesia sekalipun oposisi kurang sependapat. Pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan RI atas wilayah-wilayahnya juga tidak lepas

¹³ Martin O'Hare dan Anthony Reid, *op.cit*, hal. 26.

¹⁴ Critchley, *loc. cit.* hal 13.

dari peranan Australia. Selanjutnya Australia juga yang mensponsori Indonesia untuk menjadi anggota PBB yang ke-60.

3.2 Masalah Irian Barat

Pergantian pemerintahan di Australia dari Partai Buruh kepada koalisi Partai Liberal-Country sejak Desember 1949 hingga tahun 1966, membawa perubahan pula dalam hubungan Australia dengan Indonesia¹⁵, dan hubungan kedua negara sejak saat itu didominasi oleh masalah Irian Barat (Irian Jaya)¹⁶.

Pemerintahan Koalisi Liberal-Country di bawah PM Menzies menjalankan kebijakan luar negeri berbeda di bawah komando Menteri Luar Negeri Percy C. Spender. Pendekatan PM Menzies terhadap Asia pada waktu itu tertuju pada masalah keamanan dan sikap anti komunis. Politik luar negeri Australia yang mendasarkan diri pada sikap anti komunis diperlihatkan dengan masuk menjadi anggota SEATO, suatu organisasi pertahanan yang mempunyai tujuan membendung ekspansi komunis. Keikutsertaan Australia dalam SEATO oleh Indonesia dipandang sebagai berpihak ke dalam kubu kapitalis (pro Barat), sedangkan Indonesia mengambil sikap yang tidak memihak dengan adanya pertentangan antara dua blok yang ada. Indonesia bersama-sama dengan negara-negara lain yang baru merdeka menjalankan politik *non-alignment* dan anti kapitalis-kolonialisme.¹⁷ Memperjelas sikap pro-Baratnya, Pemerintah Australia menyatakan keinginan agar Belanda tetap menguasai Irian Barat.

¹⁵ Zulkifli Hamid, *op. cit.*, hal. 421.

¹⁶ Akhmad Khusyairi, *op. cit.*, hal. 6.

¹⁷ Akhmad Khusyairi, *Politik Luar Negeri Indonesia*, dalam Disertasi S-3, Universitas Gajahmada, Jogjakarta, 1995, hal. 208.

Masalah Irian Barat merupakan salah satu persoalan yang masih mengganjal dalam penyelesaian kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Masalah itu muncul setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang memberikan pengakuan terhadap berdirinya negara Republik Indonesia Serikat¹⁸. Namun, penyelesaian masih belum menyeluruh dengan penolakan Belanda pada kedaulatan RIS atas Irian Barat. Dalam KMB dinyatakan bahwa Irian Barat akan dirundingkan dalam waktu setahun setelah KMB disetujui.

Sebelum waktu satu tahun habis, Indonesia berusaha merundingkan kembali masalah Irian Barat tetapi belum bisa diperoleh penyelesaian. Keinginan Belanda untuk tetap mempertahankan Irian Barat sebagai wilayahnya antara lain karena mendapat dorongan Menteri Luar Negeri Australia, Percy Spender.¹⁹ Spender lebih percaya kepada Belanda yang menguasai wilayah itu daripada diserahkan kepada Indonesia bagi masa depan keamanan Australia. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan yang mendasar, karena setelah invasi Jepang ke pulau New Guinea (Irian Barat dan Irian Timur) menjelang Perang Dunia II, masyarakat dan pemerintah Australia lebih meyakini bahwa pulau tersebut sangat penting bagi keamanan Australia.

Irian memiliki makna strategis bahkan vital bagi Australia, merupakan lingkaran terakhir dalam konsep defence in depth suatu konsep strategis yang menentang dikuasainya wilayah disekeliling Australia oleh pihak-pihak yang tidak bersahabat.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Akhmad Khusyairi, *ibid.*, hal. 7.

²⁰ Hilman Adil, *Beberapa Segi*, hal. 24.

Sebagai bangsa yang sama-sama berkulit putih, Australia lebih mengenal bangsa Belanda yang berada dalam satu kubu bangsa Barat, daripada bangsa Indonesia yang baru merdeka itu. Situasi dalam negeri Indonesia yang masih belum stabil dalam kerangka proses nation building-nya, dan meningkatnya pengaruh Partai Komunis di Indonesia menambah kekhawatiran Australia.²¹ Oleh sebab itu, Australia merasa keamanan wilayahnya akan lebih terjamin bila pulau tersebut berada di bawah kekuasaan Belanda.

Kebijakan pemerintah Australia pada saat itu menyebabkan hubungan Indonesia dan Australia menjadi tegang. Di Australia, pendapat umum sangat anti Indonesia. Begitu pula dikalangan kedua Partai politik utama. Di Indonesia politik Australia mengenai Irian Barat sulit dimengerti oleh Bangsa Indonesia. Pernyataan-pernyataan Pemerintah Australia dirasakan lebih keras dari sikap Belanda sendiri pada klaim Indonesia atas Irian Barat, padahal tidak ada sangkut pautnya dengan Australia. Indonesia tidak berniat sedikitpun mengganggu gugat wilayah Australia di Irian Timur (PNG). Akibatnya, timbul perasaan emosional dari Bangsa Indonesia yang disebabkan oleh setidaknya tiga hal. *Pertama*, penundaan Belanda tentang penyerahan Irian Barat kepada Indonesia semakin lama semakin tidak masuk akal. *Kedua*, Belanda melontarkan ide untuk menyatukan Irian Barat dengan PNG. *Ketiga*, Australia berdiri di pihak Belanda.²² Sikap Australia menunjukkan ketidaktunggalannya akan tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan perasaan khawatir yang terlalu berlebihan dari Australia terhadap Indonesia.

²¹ Edib Muslim, *Politik Luar Negeri Australia terhadap Indonesia dari Whitlam sampai Hawke*, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No.6, (PT. Gramedia, Jakarta, 1995), hal. 79.

Kebijakan Australia terhadap Indonesia baru mulai berubah setelah Amerika Serikat yang semula pro Belanda dalam masalah Irian Barat berubah mendukung Indonesia pada tahun 1958, dan pada tahun 1961-1962.²³ Ditambah lagi dengan kunjungan beberapa pemimpin Indonesia ke Australia, yaitu Menteri Luar Negeri Subardjo kemudian disusul dengan kunjungan Jendral A.H. Nasution.²⁴ Dari penjelasan kedua pimpinan tadi Australia mendapat penjelasan dari tangan pertama tentang tuntutan Indonesia atas Irian Barat. Akhirnya Australia tidak punya pilihan lain ketika Irian Barat diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia pada. Sejak itu Australia berusaha menyesuaikan dengan situasi baru dalam hubungannya dengan Indonesia. Perubahan kebijakan ini di Australia mendapat kritikan keras dari masyarakatnya.

3.3 Masalah Pemberontakan PRRI/Permesta

Ketika terjadi pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Australia dan Amerika Serikat bersimpati pada pemberontak. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi dingin lebih-lebih setelah pemerintah memakai pilot Amerika Serikat. Bulan Mei 1957 hubungan membaik kembali setelah Amerika Serikat mengubah politik mendukung Soekarno.²⁵ Amerika Serikat mempertimbangkan kembali penolakan pembelian senjata kepada

²² Jusuf Wanandi, *Kerjasama Indonesia Australia*, dalam *Analisis CSIS*, Th. XXI, No. 5, 1992, hal. 426.

²³ Akhmad Khusyairi, *op. cit.*, hal. 8.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Beddie, *The Australian Foreign Policy Towards Indonesia*, *The Australian Outlook (AO)*, Vol. 22 Nomor 2 August 1968, dalam Akhmad Khusyairi, *op. cit.* hal. 9.

pemerintah Indonesia. Pertimbangan yang paling utama bagi Amerika Serikat adalah kegagalan-kegagalan militer pemberontak.

Meskipun Amerika sudah berubah pikiran, Australia masih tetap belum menyesuaikan diri dengan situasi, dan percaya bahwa pemberontak masih berada pada posisi yang lebih menguntungkan, bahkan Dr. Evatt berkali-kali di parlemen menanyakan apakah pemerintah Australia sudah mempertimbangkan untuk menjadi penengah antara pemberontak dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Australia lebih cenderung untuk tetap menjalankan kebijaksanaan tidak ikut campur tangan.

Pada pertengahan tahun 1958 Australia mulai mengikuti kebijaksanaan Amerika Serikat, tetapi masih tetap tidak percaya bahwa pembelian senjata Indonesia tidak dipakai untuk melakukan invasi ke Irian Barat.

3.4 Masalah Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Setelah masalah Irian Barat selesai, timbul gangguan baru hubungan Australia-Indonesia dengan adanya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dalam masa konfrontasi ini posisi Australia sangat sulit. Di satu sisi Australia mendukung usulan Tengku Abdul Rachman tentang Federasi Malaysia yang ditentang Indonesia. Sekali lagi, seperti halnya Irian Barat di bawah Belanda, Federasi Malaysia dianggap oleh Australia sebagai pilar yang mendukung strategi defense in depth dan dianggap dapat membantu menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Juga keterikatan Australia dalam British Commonwealth dan Pakta Anglo Malaysia merupakan faktor lain yang mendorongnya mendukung terbentuknya Federasi Malaysia.²⁶

²⁶ Edib Muslim, *op. cit.*, hal. 80.

Di sisi lain, Australia tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Hal ini banyak didorong oleh dua hal. *Pertama*, seberapa jauh Inggris akan tetap berdiri di belakang Malaysia setelah negara tersebut terbentuk. Hal ini dipersoalkan karena dalam realitanya Australia memiliki kepentingan yang lebih besar untuk menjalin hubungan yang lebih bersahabat dengan Indonesia bila dibandingkan dengan Inggris yang secara geografis jauh dari Australia. Kedua, Australia dan Inggris kembali menemui kegagalan untuk melibatkan Amerika Serikat dan ANZUS ke dalam krisis tersebut. Amerika Serikat, yang mulai disibukkan di Indocina, enggan melibatkan diri secara langsung di Malaya.²⁷

Berbicara tentang dilema utama yang dihadapi Canberra itu, Perdana Menteri Barwick menyatakan:

"... Kita ada hubungan khusus dengan Malaya... sebagai negara Persemakmuran.... Kita juga ada kepentingan khusus dalam hal persahabatan dengan Indonesia."²⁸

Dikejanya kedua tujuan yang secara potensial saling bertentangan itu menunjukkan bahwa Australia bersikap ambivalen terhadap politik Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, dan sikap itu boleh dikatakan terus bertahan sampai turunnya Pemerintah Soekarno tahun 1966.²⁹

Pada masa konfrontasi, Australia sempat mengirim tentaranya ke Serawak, bahkan sempat terjadi kontak senjata dengan pasukan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan kesungguhan Australia untuk membantu Malaysia dan memusuhi Indonesia. Sekalipun demikian, hubungan dengan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hilman Adil, *Kebijaksanaan Australia terhadap Indonesia 1962-1966*, op.cit., hal. 28.

²⁹ *Ibid.*

Indonesia tetap terpelihara. Rupa-rupanya setelah Irian Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia tidak ada pilihan lain bagi Australia untuk membina hubungan baik dengan Indonesia. Dengan dikuasainya Irian Barat posisi Indonesia makin kuat bagi kepentingan keamanan Australia. Indonesia membentengi sebagian besar wilayah Australia dari utara, dan PNG membentengi sebagian yang lain.

Setelah jatuhnya Presiden Soekarno dan mundurnya Menzies sebagai Perdana Menteri Australia hubungan Indonesia-Australia semakin baik. Ada antusiasme baru di Australia untuk menggalang kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia sebagai sesama negara yang anti komunis. Hubungan baik yang sudah mulai terbina ini makin ditingkatkan oleh Pemerintah Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Whitlam yang mulai berkuasa Desember 1972.

3.5 Masalah Timor Timur

3.5.1. Masalah Integrasi Timor Timur ke dalam NKRI

Sejak tahun 1974, hubungan Indonesia Australia banyak dipengaruhi masalah Timor Timur.³⁰ Pada awalnya masalah Timor Timur bukanlah isu yang menarik bagi Australia, sampai kemudian ada berita bahwa Perdana Menteri Australia, Whitlam, dalam pertemuannya di Wonosobo menyetujui Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, adanya perang saudara di Timor Timur, dan kemudian penyerbuan Indonesia ke Timor Timur pada 7 Desember 1975. Kejadian-kejadian tersebut akhirnya berkembang dengan terbunuhnya lima wartawan Australia di Timor Timur.³¹

³⁰ Bantarto Bandoro, *Dimensi Internasional Timor Timur, Analisis No. 11* (CSIS, Jakarta, 1986) hal. 976.

³¹ Akhmad Khusyairi, *op.cit.*, hlm 13..

Bagi Australia arti strategis Timor Timur sudah tidak ada lagi setelah Irian Barat masuk menjadi wilayah Indonesia. Karena itu ketika terjadi *coup* di Portugal tahun 1974 Timor Timur tetap di luar perhatian Australia. Secara umum mereka menganggap Timor Timur tidak penting sekalipun dari segi keamanan. Apalah artinya wilayah sekecil itu bagi Australia dibanding dengan Indonesia secara keseluruhan.³² Karena itu, wajar bila Perdana Menteri Whitlam yang memerintah Australia pada waktu itu mengatakan bahwa yang terbaik bagi rakyat Timor Timur adalah berintegrasi dengan Indonesia.³³

Pandangan di Australia pada umumnya mengenai masalah Timor Timur dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: yang lebih menitikberatkan pada integrasi, yang lebih menitikberatkan pada *self determination*, dan yang menginginkan kemerdekaan. Pengelompokan ini tidak berdasar atas organisasi politik atau kemasyarakatan tetapi *crossparty and organization line*. Artinya dalam satu partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang lain bisa ada sikap yang berbeda terhadap masalah Timor Timur.³⁴

Hubungan baik Australia Indonesia yang telah terjalin di masa Whitlam menjadi agak terganggu terutama oleh adanya suara-suara lantang dari pihak-pihak yang menginginkan Timor Timur merdeka.³⁵ Dan mereka mendapat dukungan dari media masa-media masa yang telah kehilangan

³² *Ibid*

³³ Lihat juga Michael Salla, "Australian Foreign Policy and East Timor", dalam *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 49, No. 2, November 1995, hal 210

³⁴ Akhmad Khusyairi, *op. Cit.* hal. 13.

³⁵ Kelompok-kelompok atau organisasi tersebut antara lain *Campaign for an Independent East Timor (CIET)*, *Australia East Timor Association (AETA)*, *The Friend of East Timor*, beberapa gereja Katolik dan Protestan, *The Victorian Trade Hall Council*, *Australian Union of Student (AUS)* dan *Australian Council for overseas Aid (ACFOA)*. Lihat *Ibid*.

lima wartawannya di Timor Timur.³⁶ Fraser dari Partai Liberal, pengganti Whitlam, mau tidak mau harus mengambil sikap anti Indonesia dalam sidang awal Dewan Keamanan PBB mengenai masalah Timor Timur pada bulan Desember 1975.³⁷ Walaupun demikian pada bulan September 1976, dalam kunjungannya ke Indonesia, Fraser memberikan pengakuan *de facto* Australia terhadap integrasi Timor Timur.

Perubahan sikap Fraser terhadap masalah Timor Timur (*de jure*) banyak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan Amerika Serikat yang tidak menginginkan rusaknya hubungan Australia dengan Indonesia.³⁸ Perubahan sikap tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kepentingan Amerika yang lebih luas terhadap Indonesia sebagai stabilisator kawasan dan strategisnya beberapa selat Indonesia bagi perlintasan kapal selam nuklirnya.
2. Menguatnya posisi Fraser setelah pemilihan umum 1977, membuatnya tidak perlu mempertahankan gantungan politik dari kelompok yang mempersalahkan integrasi Timor Timur.
3. Membaiknya ekonomi dalam negeri, dimana inflasi dan defisit anggaran belanja berhasil ditekan.
4. Peranan masalah Timor Gap mendapat perhatian. Wilayah yang menjadi sengketa antara Australia dan Indonesia, tampaknya menjadi suatu yang bersifat ekonomis politis.³⁹

Masalah Timor Timur dipersoalkan lagi sejak berkuasanya Partai Buruh dibawah pimpinan PM. Bob Hawke tahun 1983. Kemenangan Buruh menimbulkan usaha untuk mementahkan persoalan Timor Timur.

Ketika Partai Buruh berhasil memenagnkan pemilihan umum pada bulan Maret 1983, Pemerintahan Robert Hawke mewarisi dari pemerintahan Partai Liberal sebelumnya, suatu kebijakan yang

³⁶ Dunn, *Timor A People Betrayed*, dalam *Ibid.*.

³⁷ Michael Salla, *op. Cit.* hal 213

³⁸ *Ibid.* hal. 214

³⁹ Edib Muslim, *Politik Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Dari Whitlam sampai Hawke*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* No. 6, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hal. 84.

mengakui integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Hal ini bertentangan dengan program Partai Buruh yang menuntut supaya pemerintah Hawke mendesak Indonesia untuk melakukan suatu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur, mengurangi bantuan militer sampai pasukan Indonesia ditarik dari Timor Timur di PBB. Program Partai Buruh yang keras itu, menimbulkan masalah pelik bagi pemerintah Australia dan Indonesia.⁴⁰

Sejak Timor Timur memilih berintegrasi dengan Republik Indonesia, sikap Pemerintah Australia seringkali nampak tidak jelas, terombang-ambing oleh perkembangan dalam negeri sendiri.

Menghadapi perkembangan yang terjadi di Timor Timur, Presiden Soeharto dengan resmi menyatakan sikap dasar Indonesia terhadap masalah Timor Timur sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai ambisi teritorial;
- b. Menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri;
- c. Bila rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, maka tidak mungkin digabung sebagai negara, melainkan akan menjadi sebagian wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Usaha Australia untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia terus dilakukan. Hal ini terutama terlihat pada konferensi nasional Partai Buruh Australia ke-36 tahun 1984. Dalam perdebatan mengenai program politik baru Partai Buruh kelompok Heyden Hawke berhasil memenangkan suatu resolusi yang nadanya lebih lunak daripada program politik sebelumnya. Dalam resolusi baru itu yang diterima melalui pemungutan suara 55 berbanding 43, tuntutan untuk melaksanakan nasib sendiri di Timor Timur dan penyelesaian antar integrasi wilayah itu dengan Indonesia berhasil

⁴⁰ AMW, Pranarka, *Kebijakan Australia terhadap Masalah Timor Timur*, dalam Analisa No. 8, CSIS, Jakarta, 1985, hal. 694.

⁴¹ Harry Tjan Silalahi, "Indonesia dan Timor Timur di Forum Internasional", *Analisa* No. 11, (CSIS, Jakarta, 1986), hal. 933.

dihapuskan.⁴² Dan pada tahun 1985, Partai Buruh Australia secara resmi mengakui integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia secara *de facto* maupun *de jure*.

Pada tanggal 12 November 1991 hubungan Indonesia Australia sempat terganggu dengan adanya peristiwa yang dikenal dengan nama Insiden Dili. Peristiwa yang banyak menimbulkan korban baik luka-luka maupun meninggal tersebut sebenarnya juga masih berhubungan dengan masalah integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Ada dua kelompok rakyat Timor Timur yang saling berbeda pendapat, ada yang ingin merdeka dan ada yang masih tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Peristiwa ini menjadi sorotan tajam dari dunia Internasional, tidak terkecuali dari Australia. Namun dengan upaya diplomasi dari pihak Indonesia dan tampilnya Paul Keating sebagai Perdana Menteri Australia menggantikan Bob Hawke, hubungan kedua negara membaik kembali. Bahkan pada tahun 1995 diadakan Perjajian keamanan antara Indonesia dan Australia.

3.5.2 Jajak Pendapat sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Timor Timur

Di akhir era 1990-an, fokus perhatian masalah Timor Timur tertuju pada keputusan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Habibie, yang pada tanggal 27 Januari 1999 melontarkan dua opsi penyelesaian masalah Timor Timur, yaitu pemberian otonomi khusus bagi Timor Timur tetapi masih tetap menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau merdeka.⁴³ Jajak pendapat bagi rakyat Timor Timur pun dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Penyelenggara jajak pendapat adalah PBB dengan misi khususnya UNAMET (United Nations Missions in East Timor) yang

⁴² Bantarto Bandoro, *op. cit.*, hal. 979.

⁴³ *Tempo*, 8 Februari 1999, hal. 18.

dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1246 tahun 1999.⁴⁴

Peran Australia dalam jajak pendapat di Timor Timur antara lain dengan keikutsertaannya dalam UNAMET dan Australia banyak memfasilitasi pelaksanaan jajak pendapat tersebut.⁴⁵

Hasil jajak pendapat yang diumumkan pada tanggal 4 September menyebutkan bahwa dari 451.792 pemilih, 344.580 (78,5%) suara rakyat bekas jajahan Portugis di sepotong tanah kepulauan Nusa Tenggara itu memilih opsi merdeka sedangkan 94.388 suara (21,5%) memilih otonomi khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁶ Dengan demikian Timor Timur yang pada tahun 1976 berintegrasi dengan Indonesia dan menjadi Propinsi termuda berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur⁴⁷, akhirnya menjadi negara merdeka lepas dari negara Kesatuan republik Indonesia. Keputusan ini disahkan dengan TAP MPR No. V/MPR/1999 pada 25 Oktober 1999 mengenai pengakuan hasil jajak pendapat 30 Agustus 1999.⁴⁸

⁴⁴ *Forum Keadilan*: No, 23, 12 September 1999, hal. 13

⁴⁵ "Jangan Boikot Jajak Pendapat: Australia Siap Jadi Fasilitator", *Media Indonesia*, 24 Mei 1999.

⁴⁶ *Forum Keadilan*, No. 23, 12 September 1999, hal. 14.

⁴⁷ J. Kristiadi, "Dekolonisasi Timor Timur", *Analisa*, No. 11 tahun 1986 hal. 959. Lihat lampiran.

⁴⁸ "Indonesia Resmi Serahkan Timor Timur ke PBB", *Republika*, 29 Oktober 1999

3.5.3. Masa Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur

Jajak pendapat dengan hasil kemerdekaan, bagi rakyat Timor Timur khususnya yang pro kemerdekaan merupakan suatu kemenangan dan merupakan lembar sejarah baru dalam perjuangan mereka. Sebaliknya, hal tersebut menimbulkan kekecewaan bagi kelompok pro-otonomi yang ingin tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketegangan pun terjadi antara kelompok pro kemerdekaan dengan kelompok pro otonomi sehingga situasi krisis dan tidak aman tercipta di Bumi Loro Sae pasca jajak pendapat. Sebab utama dari situasi ini adalah disebabkan oleh ketidaksiapan mental dari masyarakat Timor Timur itu yang sesungguhnya belum siap mental untuk bersikap dan bertindak demokratis, menerima kekalahan ataupun kemenangan. Apalagi selama 24 tahun terakhir mereka terbiasa hidup dalam suatu iklim perseteruan dan pertentangan. Oleh sebab itu kerusuhan banyak terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat.⁴⁹

Aksi protes banyak dilakukan oleh kelompok pro otonomi karena menganggap bahwa jajak pendapat yang telah dilaksanakan tidak *fair*, dan UNAMET sendiri dianggap lebih memihak kelompok pro kemerdekaan.⁵⁰

Memang sejak awal, pihak pro otonomi meragukan obyektivitas dan netralitas UNAMET dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari perekrutan staf lokalnya yang banyak diambil dari kelompok pro kemerdekaan, banyaknya pengintimidasian yang dilakukan kepada rakyat agar menolak opsi otonomi, dan kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan sebelum dan pada saat pelaksanaan jajak pendapat. Menurut kelompok pro otonomi, UNAMET lebih berpihak pada kelompok pro

⁴⁹ Fransisco Fernandes da Silva, "Timor Timur antara Harapan dan Kenyataan", *Gatra*, 18 September 1999, hal. 37.

⁵⁰ *Forum Keadilan*: No. 23, 12 September 1999, hal. 17.

kemerdekaan. Sebaliknya, kubu pro kemerdekaan justru menilai UNAMET sudah bertindak jujur dan netral.⁵¹

Situasi Timor Timur menjadi semakin tidak menentu. Pertikaian kelompok pro integrasi dengan pro kemerdekaan semakin meningkat sehingga banyak korban berjatuh dari kedua belah pihak.⁵² Pembunuhan, pembakaran dan penjarahan hampir terjadi di setiap sudut kota Dili pasca jajak pendapat. Akibatnya, banyak warga dan wartawan asing yang memilih meninggalkan Dili dengan truk polisi dan TNI lewat darat ke Kupang, juga dengan kapal-kapal milik TNI AL, pesawat TNI dan sebagian lain meninggalkan Dili dengan pesawat reguler.⁵³

Dengan tidak amannya Timor Timur pasca jajak pendapat ini, bagi Indonesia, urusan Timor Timur ternyata tidak serta merta selesai seperti yang diharapkan. Indonesia banyak mendapat kecaman dan dianggap tidak mampu melaksanakan perjanjian tripartit antara Indonesia-PBB-Portugal pada tanggal 5 Mei 1999 yang antara lain menyebutkan bahwa keamanan di Timor Timur sebelum, selama dan sesudah jajak pendapat merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia.⁵⁴ Bahkan opini yang terbentuk secara internasional militer Indonesia membela pro integrasi dan sebenarnya tidak menginginkan Timor Timur merdeka. Hal ini terjadi karena dalam siaran pers, kekuatan keamanan Indonesia yang biasanya hanya berjaga-jaga, dalam beberapa peristiwa nampak bergabung dalam amukan sehingga muncul anggapan bahwa kerusuhan yang terjadi digerakkan oleh militer Indonesia.⁵⁵

⁵¹ *Ibid.*

⁵² "Perang Saudara Pecah di Timor Timur, *Jatna Pos*, 6 September 1999

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Isi Perjanjian selengkapnya, lihat Lampiran

⁵⁵ "Timtim di Mata Pers Asing", *Kompas*, 8 September 1999

Banyak kecaman ditujukan ke Indonesia berkaitan dengan krisis yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat, antara lain berasal dari Amerika, Inggris, Selandia Baru, negara-negara Eropa, bahkan negara-negara ASEAN dan PBB.⁵⁶ Namun kecaman yang paling keras datang dari Australia, baik dari masyarakat maupun pemerintahannya.

Di Australia, dua Konsulat Indonesia di Darwin dan Perth serta Kantor Kedubes RI di Canberra didemo, diserang dan dirusak. Di seluruh ibukota negara bagian dan teritori Australia demonstrasi anti-Indonesia mendukung Timor Timur dan mengkritik atau menuntut Pemerintah Australia supaya segera bertindak terjadi terus menerus dan dalam berbagai bentuk. Bendera Indonesia dibakar di beberapa tempat. Surat kabar *The Australian Financial Review* menyamakan militer Indonesia di Timtim dengan Khmer merah di Kamboja, Pasukan Serbia di Kosovo, dan tentara Irak di Kuwait. Terjadi aksi boikot, Pesawat Garuda yang mendarat di Australia atau barang dari Indonesia tidak dilayani pekerja bandara atau pelabuhan. Jose Ramos Horta, waktu diwawancarai televisi menuduh bahwa yang terjadi di Timor Timur adalah pembunuhan terhadap umat Katolik oleh orang yang bukan Katolik. Geoffrey Barker menyebut, kejadian di Timtim sebagai *Dili holocaust*, istilah yang biasa digunakan untuk menyebut pembunuhan massal kaum Yahudi oleh Hitler. Suster Anne Forbes di televisi menyatakan bahwa Indonesia seharusnya dienyahkan dari masyarakat manusia.⁵⁷

⁵⁶ "Dunia Internasional Kecam Indonesia", *Kompas*, 3 September 1999 juga dalam "Reaksi Internasional atas Timtim, *Media Indonesia*, 9 September 1999

⁵⁷ "Krisis Timor Timur dan Hubungan Indonesia-Australia", *Kompas* 17 September 1999.

Luapan emosi mengancam Indonesia di Australia begitu besar, boleh dikatakan hampir di setiap lapisan masyarakat. Hal ini mendorong Perdana Menteri John Howard untuk melakukan suatu tindakan untuk memprakarsai pengiriman pasukan perdamaian PBB ke Timor Timur.⁵⁸

Australia terus mendesak PBB dan AS untuk segera mengirimkan pasukan perdamaian ke Timor Timur. Australia sendiri telah menyiapkan pasukannya di Darwin yang letaknya < 500 mil dari Timor Timur dalam keadaan siaga sebagai pasukan perdamaian.⁵⁹ Bagi Australia, kebijakannya di Timor Timur tersebut merupakan suatu komitmen untuk menciptakan perdamaian kawasan dan untuk membantu masyarakat Timor Timur dalam menentukan masa depannya.⁶⁰

Laporan tentang kerusuhan dan kekejaman di Timor Timur meningkatkan tekanan bagi PBB untuk melakukan intervensi bersenjata dalam rangka menciptakan perdamaian. Akhirnya PBB mengirim pasukan multinasional ke Timor Timur dan tanggung jawab keamanan wilayah Timor Timur diambil alih oleh pasukan multinasional yang diterjunkan pada tanggal 15 September 1999. Penerjungan pasukan multinasional tersebut berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1264 tahun 1999 dengan nama Interfet (*International Force for East Timor*) yang isinya memberi mandat untuk "melakukan tindakan apapun" demi menghentikan kekerasan di Timtim, dan sebagai pemimpinnya, PBB menunjuk Australia.⁶¹

⁵⁸ "Australia Siap Masuk Timtim", *Kompas*, 16 September 1999.

⁵⁹ "Australia ngotot kirim Pasukan", *Jawa Pos*, 16 September 1999.

⁶⁰ "Alexander Downer, "East Timor Looking Back on 1999", *Australia Journal of International Affairs*, Vol. 54, No. 1, April 2000, hal.

⁶¹ "Australia Pimpin Pasukan PBB", *Kompas*, 16 September 1999. Isi Resolusi selengkapnya, lihat lampiran.

Penunjukan Australia sebagai pemimpin Interfet memunculkan sentimen nasionalisme rakyat Indonesia, tidak hanya di kalangan ultranasionalis tapi juga dikalangan pemerintah Indonesia meski secara resmi tidak menolak. Pihak Indonesia sendiri sebenarnya menghendaki negara ASEAN yang memimpin pasukan multinasional tersebut, tapi PBB mengabulkan permohonan Australia.⁶²

Hubungan Indonesia Australia semakin memburuk. Pada tanggal 16 September 1999, Pemerintah RI membatalkan perjanjian perdamaian yang pernah ditandatangani dengan pihak Australia di tahun 1995.⁶³ Pembatalan perjanjian ini menurut Feisal Tanjung, Menlu ad interim RI waktu itu, merupakan reaksi dari Indonesia terhadap sikap dan tindakan Australia yang tidak lagi sesuai dengan jiwa dan isi perjanjian tersebut. Dalam pandangan Indonesia, sikap dan tindakan Australia mengenai masalah Timtim sangat tidak membantu usaha memelihara hubungan bilateral dengan Indonesia atas dasar saling menghormati kedaulatan nasional, integritas wilayah, persamaan derajat dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Sikap Australia ini antara lain ditunjukkan dengan keputusannya untuk menghentikan kerja sama dan bantuan militer serta untuk meninjau kembali kerja sama di bidang keamanan dengan Indonesia.

Sentimen anti Australia di Indonesia semakin hari semakin meluas.⁶⁴ Aksi mahasiswa dan masyarakat yang menghujat arogansi Perdana Menteri John Howard tidak hanya terjadi di sekitar Kedutaan Besar Australia di Jakarta maupun di kota-kota besar lain, tapi bahkan terjadi di kota-kota yang

⁶² *Panji Masyarakat*, No. 24 Tahun III, 29 September 1999.

⁶³ "Jakarta Putuskan Perjanjian Keamanan: Australia tak Risau", *Kompas*, 17 September 1999, lihat juga "RI 'Balas' Batalkan Sepihak Perjanjian Dengan Australia", *Suara Karya*, 17 September 1999.

⁶⁴ "Meluas, Sentimen Anti Australia", *Kompas*, 23 September 1999.

tidak terdapat kantor perwakilan Australia seperti di Jambi dan Palembang. Aksi demonstrasi, pembakaran bendera Australia dilakukan sebagai simbol kemarahan mereka. Tujuannya adalah mengemukakan ancaman kepada pemerintah Australia yang telah ikut campur dalam urusan Timor Timur. Mereka juga mengecam aksi pembakaran bendera Merah Putih oleh warga Australia dan perusakan gedung-gedung Kedutaan RI di Australia.

Dalam menjalankan tugasnya, Australia juga dinilai terlalu *over acting* oleh Indonesia. Australia menyumbang 4500 pasukan dari 8000 pasukan Interfet, merupakan jumlah terbesar diantara sumbangan dari 15 negara lainnya. Pernyataan-pernyataan Perdana Menteri Australia, John Howard, yang dimuat oleh sebuah majalah Australia *The Bulletin* yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Howard juga mengundang reaksi keras, tidak hanya dari Indonesia, bahkan dari negara-negara Asia. Karena dalam pernyataannya, Howard menyatakan bahwa Australia memiliki "nilai" yang lebih tinggi dari negara-negara lainnya (Asia). Howard juga mengukuhkan Australia sebagai sebagai "wakil AS" dalam perannya sebagai "polisi internasional" di kawasan Asia Pasifik, dan kebijakan Australia di Timor Timur merupakan perwujudan dari doktrin ini.⁶⁵

Reaksi-reaksi keras yang diterima Howard atas kebijakannya di Timor Timur baik dari Indonesia maupun dari negara-negara Asia lainnya, membuat Howard "melunakkan" sikapnya.⁶⁶ John Howard menjelaskan bahwa terdapat pengartian yang salah dari media tentang pernyataannya, dan menurut Howard dalam kasus Timtim Australia tidak hanya bersikap "apa yang menurut Australia benar akan tetapi yang menurut pemimpin-pemimpin di kawasan benar". Tujuan Australia mengerahkan kekuatan yang

⁶⁵ Ismet Fanany, "Doktrin Howard dalam Konteks Sejarah", *Kompas*, 29 September 1999.

besar lebih dari negara manapun adalah untuk membantu menyelesaikan masalah Timor Timur secepatnya dan agar Indonesia tidak diisolasi oleh dunia internasional. Ini merupakan wujud dari komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan Asia Pasifik.⁶⁷

Krisis Timor Timur membawa dampak yang sangat buruk terhadap hubungan Indonesia dan Australia. Di masa lalu, hubungan yang buruk antara kedua negara hanya pada tingkatan elite politik, militer dan pemerintahan, tetapi tidak pada tataran masyarakat. Contohnya ialah ketika Indonesia berupaya merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda pada 1957-1963, Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1866, dan integrasi Timor Timur pada tahun 1975. Di masa kini, hubungan buruk itu sudah pada tataran pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, hubungan buruk itu bukan saja dalam kaitan antara "pemerintah dengan pemerintah" (Government to Government), tetapi juga antara "rakyat dengan rakyat" (people to people).

⁶⁶ "Sikap Howard mulai melunak", *Kompas*, 30 September 1999.

⁶⁷ Henry S. Albinski, "Issues in Australia Foreign Policy July-December 1999, dalam *Australia Journal of Politics and History*, Vol. 46, Issues 2, 2000, hal. 194-213.

BAB IV

PROSPEK HUBUNGAN INDONESIA AUSTRALIA

Berdasarkan pengalaman sejarah, hubungan bilateral Indonesia dan Australia selalu mengalami pasang surut. Hubungan baik terjalin pada saat Indonesia berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan hubungan yang kurang baik seringkali terjadi dengan latar belakang masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, misalnya masalah Irian Barat, masalah konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan masalah Timor Timur.

Sejak tahun 1974 hubungan Indonesia Australia seringkali diwarnai oleh berbagai masalah yang terjadi di Timor Timur. Dan hubungan yang sangat buruk, bahkan terburuk, antara Indonesia Australia justru terjadi pasca jajak pendapat di Timor Timur, karena telah mengikutsertakan emosi tidak hanya kedua pemerintahan tapi juga masyarakat kedua negara. Pendapat umum di Australia menunjukkan kemarahan atas kejadian di Timor Timur pasca jajak pendapat. Tindakan serupa juga terjadi di Indonesia untuk memprotes Australia yang mendesak masyarakat internasional untuk mengirim pasukan ke Timor Timur. Kemarahan antara kedua masyarakat bangsa yang bertetangga dekat itu merupakan masa terburuk hubungan Indonesia dan Australia. Hal ini diakui oleh Dubes RI untuk Australia Wirjono bahwa "Hubungan Indonesia Australia telah sering mengalami pasang surut tetapi belum pernah seburuk ini".¹

Berangkat dari kondisi memburuknya hubungan Indonesia Australia ini, maka dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai prospek

¹ Ucapan Wirjono pada tanggal 17 September 1999, dikutip dari Kompas 18 September 1999.

hubungan Indonesia-Australia di masa depan. Namun sebelumnya akan penulis bahas lebih dahulu mengenai hal-hal yang menjadi penyebab utama memburuknya hubungan kedua negara pasca jajak pendapat dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan Indonesia Australia.

4.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Memburuknya Hubungan Indonesia Australia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur

4.1.1 Faktor Internal

a. Perbedaan Sistem Nilai

Stabilitas suatu kawasan akan lebih mudah tercipta apabila terdapat kerjasama serta saling pengertian antara negara-negara yang ada di kawasan tersebut. Hal ini tidak saja berlaku bagi negara-negara yang mempunyai kekuatan relatif kuat, baik dari segi militer, ekonomi dan pertahanan, tetapi juga bagi negara-negara yang kuat dan yang lemah. Dengan demikian landasan hubungan antar negara tidak terletak pada seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara, melainkan pada naluri untuk menghargai eksistensi negara lain. Permasalahan naluri untuk menghargai negara lain berhubungan erat dengan sistem nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa. Koentjaraningrat mengemukakan sebuah pemikiran sebagai berikut:

Suatu kelompok atau bangsa mempunyai satu kepribadian dasar (*basic personality structure*) yang sama, yaitu unsur-unsur kepribadian yang dimiliki bersama oleh sebagian besar masyarakat.²

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 132.

Kemudian ditambahkan oleh Gerungan, bahwa:

Kepribadian dasar ini kemudian membentuk satu sikap yaitu cara berpikir dan bertindak yang sama dari suatu kelompok terhadap suatu obyek sosial.³

Dengan demikian *basic personality structure* memegang peranan yang cukup penting dalam melahirkan sikap-sikap tertentu. Perbedaan di dalam faktor ini melahirkan sikap yang berbeda pula.

Seperti yang telah digambarkan dalam bab sebelumnya (BAB II), perbedaan antara Indonesia dan Australia memang sangat mendalam di semua bidang kehidupan, walaupun keduanya terletak berdekatan. Indonesia dan Australia adalah dua negara yang mempunyai perbedaan latar belakang, baik dalam jumlah penduduk, kondisi geografis dan juga dalam sistem sosial budaya dan politiknya. Perbedaan inilah yang sering disebut sebagai perbedaan nilai dan pada akhirnya dapat menimbulkan persepsi yang berlainan dalam memandang suatu permasalahan dalam konteks hubungan Indonesia-Australia tersebut.

Australia merupakan negara dengan sistem politik liberal. Nilai-nilai liberal mengutamakan hal-hal yang sifatnya individual serta kebebasan. Tanggapan masyarakat Australia dalam masalah Timor Timur tidak lepas dari pengaruh sistem politik Australia yang bersifat 'bebas', bebas mengkritik, bebas menilai ataupun menuntut siapapun meskipun itu pada pemerintahannya sendiri maupun pihak lain, dalam hal ini Indonesia. Hal ini didukung pula oleh sorotan pers Australia yang umumnya kurang menguntungkan pihak Indonesia. Apalagi masalah yang dihadapi berkaitan

³ Gerungan, *Psikologi Sosial*, Jemmars, Bandung, 1980, hal. 152.

dengan masalah Timor Timur yang mengandung sensitifitas bagi pers Australia yang telah 'kehilangan' lima wartawannya pada tahun 1975.

Di bulan September 1999, setelah jajak pendapat dilakukan di Timor Timur, tayangan TV dan juga media massa lainnya di Australia setiap hari selalu menyajikan berita-berita tentang perlakuan buruk yang menimpa rakyat Timor Timur, khususnya yang pro kemerdekaan. Hal ini berbeda sekali dengan perlakuan yang diterima oleh kelompok pro-integrasi (milisi) dari TNI.⁴ Sajian-sajian media massa ini sangat berpengaruh terhadap opini publik yang terbentuk di Australia karena pers, TV, dan media lain memainkan peranan yang sangat penting dalam menyebarkan informasi dan citra yang ikut membentuk pandangan umum tentang suatu obyek, dalam hal ini Indonesia. Akibatnya, orang-orang Australia memandang Indonesia sebagai bangsa yang brutal, militeristik, 'pilih kasih' dalam memperlakukan rakyatnya dan tidak berperikemanusiaan.⁵

Dalam menanggapi permasalahan di Indonesia, Australia selalu memandang permasalahan tersebut dari 'kacamata' mereka yang dikaitkan dengan sistem nilai yang mereka anut. Dengan kata lain mereka mempunyai ukuran tersendiri dalam menanggapi peristiwa yang terjadi di Indonesia. Apalagi masalah yang dihadapi berkaitan dengan masalah Timor Timur yang sejak dulu telah menjadi *potential problems* dalam hubungan Indonesia Australia.

From the Australian side, there are four issues amongst others which, despite the healthy state of Government to Government relations, have the capacity to unsettle the bilateral relationship and nourish

⁴ Arif Budiman, *Catatan Seorang Indonesia di Australia*, dalam Kompas 28 September 1999.

⁵ Hal Hill & Chris Manning, *RI-Australia: What Went Wrong*, dalam *The Indonesian Quarterly* Vol. XXVII/1999, No. 4, CSIS, Jakarta, hal. 1.

further existing negative attitudes to Indonesia and which need watching. The first is Indonesia's handling of East Timor....⁶

Di lain pihak, Krisis Timor Timur merupakan ujian terberat bagi Bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaannya. Di satu sisi krisis tersebut terjadi pada saat Bangsa Indonesia sedang mengalami masa 'ketidakmenentuan' akibat krisis ekonomi dan krisis politik pasca Orde Baru. Disisi lain, iklim internasional sudah berubah menjadikan masalah-masalah HAM, demokrasi, liberalisasi perdagangan dan lingkungan hidup sebagai fokus utama sehingga sangat menyulitkan posisi Indonesia dalam mengatasi masalah pelanggaran HAM di Timor Timur, berbeda dengan situasi yang terjadi di era 1970-an.

Keadaan ini diperburuk oleh sikap Australia sebagai tetangga dekat Indonesia yang justru paling keras dalam menanggapi masalah Timor Timur sehingga berpengaruh terhadap hubungan kedua negara yang memang selalu mengalami pasang surut. Pernyataan-pernyataan dari pemerintah dan masyarakat Australia dalam menanggapi masalah Timor Timur menimbulkan kekecewaan masyarakat Indonesia. Negara yang paling dekat dan yang selama ini merupakan satu-satunya pendukung Indonesia di forum internasional tersebut, sekarang berubah sikap, terutama pada saat Indonesia membutuhkan bantuannya dalam menghadapi masalah nasional. Australia bahkan cenderung mempersalahkan Indonesia dalam masalah Timor Timur. Kesan kuat yang muncul dan 'dibaca' orang Indonesia terhadap sikap Australia adalah bahwa Australia yakin Indonesia tidak bersedia mengamankan Timor Timur bukan tidak bisa. Jadi harus dihukum dan diancam, bukan harus dibantu sebagai teman sekawasan. Dan reaksi orang di

⁶ Gareth Evans, op. Cit. Hal. 31.



Indonesia adalah memperlakukannya dengan cara yang sama.⁷ Muncul rasa nasionalisme yang menyebabkan apa saja yang 'berbau' Australia menimbulkan kemarahan masyarakat Indonesia.

Kekecewaan Bangsa Indonesia bertambah saat dalam wawancaranya dengan Fred Brenchley yang dimuat dalam Majalah *The Bulletin* tertanggal 28 September 1999, John Howard, Perdana Menteri Australia mengungkapkan pemikirannya yang kemudian dikenal sebagai 'Doktrin Howard'⁸ Inti dan dasar pemikiran John Howard adalah:

- a. Australia adalah Bangsa Eropa yang karenanya memiliki *special characteristic dan occupies a special place* di kawasan Asia. Ciri istimewa dan tempat istimewa ini dihubungkan Howard dengan "nilai" yang dimiliki Australia yang harus diperhatikan dan dipromosikan di kawasan tersebut.
- b. Untuk menjamin kehidupan nilai yang menjadi pedoman benar/salah dalam kebijakan dan perilaku kebijakan luar negerinya di kawasan tersebut, Howard menunjuk Australia sebagai wakil AS dalam peranannya sebagai "polisi" internasional di kawasan tersebut. Artinya, Australia akan memasuki setiap daerah di kawasan ini untuk memaksakan wawasan demokrasi dan HAM yang dianutnya. Kalau perlu dengan menggunakan senjata.⁹

⁷ *Kompas*, 17 September 1999.

⁸ Ismet Fanany, *Doktrin Howard dalam Konteks Sejarah*, dalam *Kompas*, 29 September 1999.

Walaupun pada akhirnya John Howard membantah bahwa apa ditulis media tidak seluruhnya sesuai dengan apa yang diucapkannya, namun kenyataannya hal tersebut semakin memperkuat sentimen anti-Australia di Indonesia. Apalagi Howard menyebutkan bahwa peranan Australia di Timtim sebagai contoh kebijakannya.¹⁰

Pernyataan-pernyataan Howard ini mendapatkan tanggapan serius tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari negara-negara Asia pada umumnya.¹¹ 'Doktrin Howard' telah mengedepankan perbedaan nilai antara Australia sebagai bangsa kulit putih dengan bangsa-bangsa disekitarnya (Asia) yang kulitnya berwarna dan 'terkesan' meremehkan, serta merendahkan negara-negara Asia.

Ketidaksejajaran pandangan antara satu dengan yang lain inilah yang memicu ketegangan hubungan antar negara yang bertetangga karena masing-masing pihak akan merasa bahwa dirinyalah yang paling benar.

b. Perubahan Kebijakan Australia di bawah John Howard dari Partai Liberal terhadap Masalah Timor Timur

Hubungan diplomatik antara Australia dengan Indonesia selalu mengalami pasang surut, menurut persepsi atas kepentingan nasional masing-masing pihak dalam periode pemerintahan yang berbeda-beda.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Henry S. Albinski, "Issues in Australian Foreign Policy July-December 1999, dalam *Australia Journal of Politics and History*, Volume 46, Issue 2, 2000, hal. 200.

¹² Margareth Geoge, *Australia and Indonesia Revolution*, Terjemahan Hermawan Sulistyono dan Wardah Havidz, Panca Simpati, Jakarta, 1986, hal. ix.

Dalam sistem politik Australia, terdapat dua partai politik dominan yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal yang berkoalisi dengan Partai Nasional.¹³ Namun jika diteliti lebih lanjut, hubungan kedua negara lebih 'mesra' saat pemerintah Buruh berkuasa di Canberra, yaitu pada masa PM Joseph Benedict Chieflly (1945-1949), masa PM Gough Whitlam (1972-1975), masa PM. Bob Hawke (1983-1991) dan masa pemerintahan Paul Keating (1991-1996).

Pengecualiannya, dimasa pemerintahan PM Malcolm Fraser dari Partai Liberal/Nasional, hubungan kedua negara cukup baik. Australia mengakui secara de facto dan de jure Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia dan Australia juga banyak membantu ekonomi dan pertahanan Indonesia. Namun hal ini terjadi tidak lepas dari pengaruh eksternal dalam konteks Perang Dingin.

Sejak tahun 1996, pemerintahan Australia 'dipegang' kembali oleh Partai Liberal dibawah John Howard. Pada dasarnya kebijakan pemerintah Australia terhadap Indonesia tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan kebijakan Partai Buruh sebelumnya, kecuali masalah Timor Timur.¹⁴

Australia di bawah John Howard tetap menyatakan komitmennya atas hubungan bilateral kedua negara. Buku putih tentang Perdagangan dan Kebijakan Luar Negeri yang diluncurkan tahun 1997 menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara terpenting bagi Australia, disamping Amerika Serikat, Jepang dan Cina.¹⁵ Australia juga merupakan salah satu negara pertama yang memberikan bantuan bagi krisis ekonomi Indonesia dan

¹³ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, PT. Rosda, Jakarta, 1999, hal.

¹⁴ Reni Winata, "Timtim dan Kebijakan Baru Australia", *Media Indonesia*, 30 September 1999.

¹⁵ Lihat White Paper: Australia's Foreign And Trade Policy, In *The National Interest*, 1997, hal. 57.

negara yang bersangkutan juga melobi IMF untuk mempercepat pencairan dana bantuan. Bahwasanya pemerintahan koalisi di bawah John Howard tetap bertekad untuk menjalin kerjasama AIDA (Australian-Indonesian Development Area) dalam bulan April 1997 di Ambon, Maluku. Berbagai program bantuan teknis untuk manajemen keuangan, pelatihan untuk pemberdayaan sumber daya Komnas HAM, konsultasi pendidikan, beasiswa, kerjasama kebudayaan dan sebagainya.¹⁶

Namun, terhadap masalah Timor Timur, kebijakan Pemerintah Australia berubah dari mendukung integrasi wilayah tersebut ke Indonesia menjadi mendukung kemerdekaan Timor Timur.¹⁷ Justru karena masalah inilah hubungan Indonesia Australia menjadi sangat buruk, bahkan terburuk dalam perkembangannya hingga saat ini.

Kemungkinan perubahan kebijakan Australia terhadap masalah Timor Timur sebenarnya telah diantisipasi oleh kalangan pengamat seperti Andrew McIntyre dalam seminar *Diverse Cultures, Converging Interest* (1995) yang menyatakan bahwa ada dua masalah pokok yang harus diperhatikan tentang Timor Timur dan implikasinya bagi hubungan Australia Indonesia di masa mendatang. *Pertama*, bagaimana kondisi Timor Timur, dan *kedua*, apakah negara-negara Barat lainnya yang secara geografis terletak lebih jauh, akan mengambil sikap yang semakin keras mengenai masalah Timor Timur.¹⁸

¹⁶ Reni Winata, *op. Cit.*

¹⁷ "Kebijakan Australia terhadap Timor Timur Berubah", *Kompas*, 13 Januari 1999, dan "Australia Ubah Posisinya pada Timor Timur, *Media Indonesia*, 13 Januari 1999.

¹⁸ Reni Winata, *Ibid.* Lihat Andrew McIntyre, "Diverse Culture Converging Interest", dalam Hadi Soesastro, Tim Mac. Donald (eds.), *Indonesia Australia Relation: Diverse Culture Converging Interest* (CSIS, Jakarta, 1995), hal 54.

Dalam perkembangannya, kondisi Timor Timur semakin buruk terutama pasca jajak pendapat. Negara-negara Barat juga mengecam keras atas kekerasan dan pelanggaran HAM di Timor Timur. Hal inilah yang menyebabkan John Howard yang konservatif segera mengubah kebijakan Australia terhadap Indonesia berkaitan dengan masalah Timor Timur.

Namun disamping dua hal diatas, sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi perubahan kebijakan Australia terhadap masalah Timor Timur adalah kepentingan pribadi Howard yang menggunakan isu Timor Timur untuk menarik simpati masyarakat Australia dalam rangka kampanye politiknya.¹⁷ Apalagi masalah Timor Timur merupakan isu sensitif bagi publik di Australia dan telah menjadi politik domestik Australia.

Pertama, bagi kalangan veteran Perang Dunia II yang pernah bertugas menghadang tentara Jepang di Timor Timur. Rakyat Timor Timur telah berjasa dalam membantu tentara Australia di tahun 1942 saat menghadapi tentara Jepang. Oleh karena itu kemerdekaan mereka perlu dibantu. Tidak sedikit tentara Australia yang mati di Timor Timur.

Kedua, dari segi geopolitik dan geostrategis, sesuai dengan lingkaran konsentris pertahanan Australia, kalangan militer memandang Indonesia (dan negara Asia Tenggara lainnya), Timor Timur dan Papua Nugini (serta negara Pasifik Selatan lainnya) sebagai "halaman depan". Ini termasuk sekaligus sebagai *our region, sphere of strategic military interest*.

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Reny Winata, Ketua Pusat Kajian Australia UI Jakarta pada 19 Juli 2000, Pukul 11.45 WIB di Pusat Kajian Australia-UI, Jakarta dan juga hasil wawancara penulis dengan Ikrar Nusa Bakti, Peneliti Senior LIPI pada 13 Juli 2000 Pukul 11.35 WIB di Jakarta. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Ganewati Wuryandari dalam artikelnya Agenda Tersembunyi Australia, Forum Keadilan No. 25, 26 September 1999.

Dengan kata lain, Australia membutuhkan buffer zone sebagai bagian dari Pertahanan Jauh ke Depan (*Forward Defense Strategy*).

Ketiga, bagi kalangan politisi, Indonesia dan Timor Timur bukan hanya penting bagi kesinambungan dan perubahan substansi dan gaya politik luar negeri Australia terhadap kawasan Asia tenggara, tetapi juga terkait dengan politik domestik Australia. Oleh karena itu isu Timor Timur bisa digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaannya.

Keempat, bagi media massa Australia, Timor Timur telah meninggalkan kenangan buruk dengan tewasnya lima wartawan Australia di Timor Timur. Oleh karena itu media massa Australia sering memberitakan hal-hal yang buruk tentang Indonesia dalam kaitannya dengan Timor Timur.

Kelima, bagi kalangan intelijen Australia, Timor Timur termasuk pos pertama anggota ASIS (*Australian Security Intelligence Service*) ditempatkan untuk memata-matai gerak-gerik Jepang ke Asia Tenggara dan Australia, bahkan sebelum ASIS secara resmi didirikan oleh Pemerintahan PM Robert Gordon Menzies pada 1950.

Keenam, bagi buruh dan rakyat Australia pada umumnya, masalah Timor Timur adalah masalah humanisme yang erat kaitannya dengan kemerdekaan, hak-hak asasi manusia dan demokrasi, yang merupakan *social ethos* bangsa Australia.¹⁸

Walaupun di negara-negara tetangganya (Asia) mendapatkan kecaman keras, namun di dalam negerinya dari kebijakan tersebut John Howard berhasil menaikkan 'pamor'-nya. Terbukti menurut hasil jajak pendapat surat kabar *The Australian* edisi 28 September 1999 menunjukkan

¹⁸ Ikrar Nusa Bakti, *Timor Timur di Antara Indonesia dan Australia*, dalam KONTAN, No. 51, Tahun III, 20 September 1999, np.

sebanyak 56% reponden menyatakan puas dengan kinerja Howard sebagai Perdana Menteri.¹⁹ Bahkan sejak Juli lalu, hampir semua jajak pendapat juga menunjukkan angka sekitar 50% untuk pernyataan yang kurang lebih sama.²⁰ Hasil jajak pendapat ini menunjukkan keberhasilan John Howard dalam mewujudkan keinginannya untuk menarik simpati masyarakatnya. Bahkan, Howard juga berhasil mendapatkan banyak pujian dari sekutu Baratnya atas keberhasilannya menjalankan misi di Timor Timur.

4.2 Eksternal: Pengaruh Amerika dalam Hubungan Indonesia dengan Australia

Berakhirnya era perang dingin telah memunculkan berbagai masalah baru dalam hubungan internasional, salah satunya adalah mengenai HAM (Hak Asasi Manusia).²¹ Isu ini berkembang menjadi komoditas kampanye politik internasional yang terpenting menggantikan isu persaingan antara ideologi komunis melawan liberal dalam era perang dingin.

Kecenderungan semakin dominannya agenda HAM dalam konstelasi politik internasional ini ditandai dengan makin meningkatnya perhatian internasional terhadap persoalan HAM. Agenda HAM berkembang menjadi kecenderungan kebijakan negara-negara di dunia, terutama negara-negara maju. Isu HAM pun semakin kompleks manakala negara-negara maju dengan kekuatan ekonomi dan politiknya menggunakan isu ini sebagai alat untuk menekan negara-negara lain, biasanya negara berkembang.

¹⁹ Howard Bangkitkan "Psikopat Nasionalis", Kompas 29 September 1999.

²⁰ Ibid.

²¹ Selain HAM isu yang berkembang dalam masyarakat internasional adalah demokratisasi, liberalisasi perdagangan dan lingkungan hidup.

Indonesia, sebagai negara berkembang, juga banyak mendapatkan tekanan dari dunia luar berkaitan dengan isu pelanggaran HAM ini. Namun meskipun isu pelanggaran HAM terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, pelanggaran di Timor Timur memperoleh perhatian utama masyarakat internasional. Hal ini selain karena telah terjadinya perubahan dalam konstelasi internasional juga karena status Timor Timur di PBB yang sampai tahun 1999 masih sebagai *non self-governing territory*, di bawah Portugal yang berperan sebagai *administrative power*. Bagi Portugal, Timor Timur masih merupakan salah satu dari Propinsi Seberang Lautan, sementara bagi Indonesia, Timor Timur merupakan propinsi ke-27.²²

Dalam masalah Timor Timur, pada awalnya Amerika "merestui" penggabungan Timor Timur oleh Indonesia pada Desember 1975. Walaupun sebenarnya Amerika memiliki kepentingan terhadap Timor Timur, namun karena Fretilin memiliki kecenderungan ke kiri, maka Amerika kemudian mendukung integrasi tersebut. Pengakuan integrasi itu dapat dipahami karena pada tahun 1975 merupakan tahun yang "buruk" bagi Amerika munculnya negara-negara "komunis" baru seperti Vietnam, Kamboja dan Laos. Dan Amerika Serikat tidak ingin Timor Timur juga menjadi negara yang berhaluan komunis. Dugaan lain dukungan Amerika Serikat kepada Indonesia adalah karena pentingnya Selat Ombai dan Wetar bagi lalu lintas kapal selam nuklir milik Amerika yang menghubungkan Samudera India dan Pasifik. Di samping latar belakang konflik ideologi antara Amerika dan Uni Soviet, Indonesia juga mempunyai arti penting bagi Amerika secara ekonomi

²² Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Hak Asasi Manusia: Kasus Indonesia dengan Timor Timur*, dalam Analisis CSIS, Tahun XXIX/2000, No. 2, Hal. 177.

sebagai pemasok minyak utama untuk industrinya, terutama ketika terjadi embargo minyak pada 1973.

Tetapi setelah perang dingin berakhir, kebijakan Amerika terhadap Indonesia cenderung dikaitkan dengan pelaksanaan HAM. Tampaknya Amerika sudah tidak memerlukan alasan ideologi lagi untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Hal tersebut sangat menyulitkan karena Amerika memiliki pengaruh kuat pada lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF dan Bank Dunia. Perkembangan ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain yang selanjutnya selalu menekan Indonesia dalam persoalan HAM.

Kecenderungan meningkatnya tekanan masyarakat Internasional terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia semakin menguat setelah Insiden Dili pada 12 November 1991.²³ Implikasi dari kejadian tersebut tidak hanya pada bidang politis tapi juga ekonomis.²⁴ Kecaman kepada Indonesia banyak bermunculan dari dunia Internasional, yang disertai dengan penangguhan bantuan ekonomi oleh Belanda, Kanada dan Denmark, sedangkan Amerika yang sejak awal mendukung integrasi Timor Timur menghapus pendanaan bagi pelatihan pendidikan militer internasional (IMET) senilai US\$ 2,4 juta dan pembatalan penjualan senjata ringan untuk Indonesia. Di samping itu, muncul pula tuntutan agar diberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur.

²³ *Ibid*, hal. 179.

²⁴ *Ibid*, hal. 180.

Pernyataan yang berisi kecaman pedas terhadap Indonesia dikemukakan oleh Claiborne Pell, seorang Senat Amerika Serikat yang berbunyi:

"Indonesia telah menunjukkan bahwa negara itu berada di luar arus besar dunia yang sedang berubah ke arah penghormatan yang besar terhadap HAM dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kekerasan di Timor Timur benar-benar menimbulkan kesangsian serius mengenai kemampuan Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang beradab, untuk menjadi juru bicara yang mempunyai kredibilitas bagi Gerakan Non Blok dalam lingkungan dunia yang sedang berubah Rakyat Timor Timur punya hak untuk menentukan nasib sendiri, dalam referendum yang disponsori PBB, yang akan menentukan integrasi mereka dengan Indonesia. Selama rakyat merasa ditindas, mereka akan melawan."²⁵

Sementara itu berbagai organisasi HAM dan LSM internasional juga banyak melakukan tekanan atas pelanggaran HAM Indonesia di Timor Timur. *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* adalah dua organisasi HAM internasional yang setiap tahun memberi laporan mengenai kondisi HAM di Timor Timur.²⁶ Kasus pelanggaran HAM sekecil apapun bisa terpantau oleh dua lembaga ini. Bahkan Komisi HAM PBB pun banyak mendapatkan data dari kedua lembaga independen tersebut.

Selain itu, di sejumlah negara muncul lembaga independen non-pemerintah yang mengadvokasi dan peduli terhadap masalah Timor Timur. Lembaga yang bergerak pada advokasi HAM, sosial-budaya, pembangunan dan demokratisasi di Timor Timur itu antara lain *East Timor Action Network* (ETAN) yang mempunyai cabang di seluruh negara bagian Amerika dan Kanada. *Action in Solidarity with Indonesia and East Timor* (ASIET), yang

²⁵ Bilveer Singh, *Timor Timur, Indonesia dan Dunia, Mitos dan Kenyataan*, dalam *ibid.*

²⁶ *Ibid.*.

mempunyai perwakilan seluruh kota besar di Australia. Ada pula *Australian for Free East Timor*, *Students Supporters for East Timor*, dan *Australian Coalition for East Timor (ACET)*. Di Selandia Baru sendiri ada *East Timor Independence Committe*.

Sedangkan di Eropa antara lain : *Committe of 100 (Finlandia)*, *Irlandia East Timor Solidarity (Dublin)*, *Norwegia East Timor Solidarity (Oslo)*, *Catholics Institute for International Relation (London)* dan *International Platform of Jurists for East Timor (Belanda)* yang merupakan organisasi parlemen internasional yang peduli masalah HAM dan demokratisasi di Timor Timur. Sementara di benua Asia, lembaga itu antara lain : *Free East Timor Japan Coalition (Jepang)*, *Asia Pasific Coalition for East Timor* dan *Philippine Solidarity for East Timor* di Filipina, *Korea East Timor Solidarity (Seoul)*, dan *Solidariti Timor Timur Malaysia (Malaysia)*.

Di Indonesia sendiri lembaga yang mengadvokasi masalah Timor Timur antara lain : PIJAR (Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi), SPRIM (Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Perjuangan Rakyat Maubere), KBMTT (Komite Bersama untuk Masyarakat Timor Timur), dan Solidamor (Solidaritas untuk Perjuangan Damai Timor Leste).

Suara-suara yang menuntut penegakan HAM di Timor Timur semakin menguat ketika situasi krisis terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat. Kecaman dan juga tekanan internasional terhadap Indonesia berkaitan dengan masalah Timor Timur semakin meningkat. Masyarakat Internasional menganggap bahwa pelanggaran HAM di Timor Ti mur sudah melampaui batas sehingga harus segera dilakukan upaya untuk menghentikannya.²⁷

²⁷ DK PBB: *Tentara Indonesia tak Mampu*, Kompas 12 September 1999.

Amerika Serikat mengambil sikap tegas menanggukkan semua kerjasama keamanan dan latihan militer, termasuk menanggukkan penjualan (perlengkapan) militer kepada Indonesia. AS mengancam bahwa hubungan AS-Indonesia tidak akan normal kembali sampai masalah Timtim dapat diatasi. Sikap AS ini kemudian diikuti oleh Inggris yang juga menanggukkan semua kontrak militernya dengan Indonesia. AS juga menuduh TNI berada dibalik kekejaman milisi sehingga mendesak agar pemerintah Indonesia mengakhiri kolusi antara miter Indonesia dengan milisi.³⁰

Kelompok negara kreditor Indonesia yang tergabung dalam Paris Club juga memutuskan untuk menanggukkan pembicaraan penjadwalan ulang utang Indonesia sebagai tindak lanjut dari sikap IMF dan Bank Dunia yang sudah lebih dahulu memutuskan penangguhan pencairan pinjaman Indonesia. Negara-negara yang tergabung dalam APEC, termasuk Australia, yang kebetulan sedang mengadakan KTT di Aucland, Selandia Baru, juga mengecam Indonesia yang dianggap tidak mampu mengendalikan situasi di Timor Timur pasca jajak pendapat.

Reaksi-reaksi internasional ini semakin memperburuk posisi Indonesia di forum Internasional. Keputusan Australia yang mengambil posisi berlawanan dengan Indonesia sejajar dengan sekutu Baratnya, membawa dampak yang sangat buruk bagi hubungan Indonesia Australia.

4.2 PERKEMBANGAN HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA

4.2.1 Perubahan Politik Dalam Negeri Indonesia

Menjelang dan terutama setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, politik Indonesia mengalami perubahan secara dramatis. Setiap aspek kehidupan politik berkembang dalam kecepatan yang tak pernah diduga

³⁰ "AS Desak Jakarta Akhiri Kolusi Militer Milisi", *Kompas*, 28 September 1999.

sebelumnya dan terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan politik yang sangat luas. Misalnya, munculnya banyak sekali partai politik dalam waktu singkat³¹, berakhirnya "keharusan" bagi pegawai negeri sipil untuk menegakkan asas monoloyalitas pada Golongan Karya, berkembangnya komite yang mengelola gerakan massa, pembebasan tahanan politik, berkembangnya kebebasan pers secara luar biasa, meluasnya kebebasan politik dan hal-hal lain yang bercirikan kebebasan. Dalam terminologi umum, proses perkembangan tersebut disebut *reformasi*.³²

Perubahan pemerintahan di Indonesia melalui gerakan reformasi yang menghendaki demokratisasi, berhasil memunculkan pemerintahan baru yang legitimate melalui Pemilihan Umum yang demokratis. Terbentuknya pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri secara teoritis menandai masuknya Indonesia ke tahapan transisi menuju demokrasi, sekaligus sebagai titik tolak terbentuknya "Indonesia Baru".³³ Dapat dikatakan demikian karena selama lebih dari tiga dekade Indonesia berada di bawah Orde Baru yang cenderung militeristik dan otoriter.

Pengertian tentang Indonesia yang umum terdapat di Australia selama ini antara lain³⁴:

- Indonesia dan rakyatnya cenderung dianggap oleh orang Australia sebagai militeristik, bersifat otoriter (atau mungkin bahkan fasis), berbuat

³¹ Menurut pendataan Litbang Kompas, hanya dalam waktu kurang dari sepuluh bulan (akhir Mei 1998 hingga awal Februari 1999), jumlah Partai politik yang berdiri mencapai 181 buah.

³² Eep Saifulah Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, Mizan, Jakarta, 2000, hal. xxvi.

³³ *Ibid*, hal. Xli.

³⁴ Jamie Mackie, "Dalam Pandangan Masing-masing: Cara Australia Memandang Indonesia", dalam *Melebarakan Cakrawala: Australia dan Indonesia Menuju Abad ke-21*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal. 369.

sewenang-wenang dan tidak konsisten dalam menerapkan hak asasi manusia dan hukum perundang-undangan (*rule of law*).

- Indonesia juga dipandang cenderung memiliki perilaku mengancam atau menindas tetangganya yang lebih kecil, bahkan berpolitik ekspansionis terhadap Irian Jaya dan Timor Timur.
- Bangsa Indonesia pada umumnya dianggap sangat korup dalam mengelola uang negara, teledor dalam menerapkan prosedur administrasi, tidak becus dalam memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi, dan juga secara teknologis ketinggalan, tidak efisien, malas dan ciri dinamikanya ketinggalan dengan Jepang atau Cina.
- Bangsa Indonesia dianggap sebagai muslim fanatik ataupun sangat mistis dan tidak mementingkan hal-hal duniawi.
- Bangsa Indonesia dipandang tidak cukup memiliki individualisme dan dinamika, karena tradisi kolektifisme dan kecenderungan mereka pada tatanan ekonomi yang dikuasai pemerintah.

Terbentuknya pemerintahan Indonesia Baru yang demokratis merupakan peluang untuk mengubah persepsi rakyat Australia terhadap Indonesia. Hal ini diakui oleh Dubes Australia untuk Indonesia, John McCarty :

"This is a country which has come very far in a short time. Indonesia has had to face problems of dimension which is scarcely perceptible to an Australian, problems which are earth shattering in their dimension. So I think we (Australians) have to respect what Indonesian have done so far.... I think we in Australia would want to deal with Indonesia in light."³⁵

³⁵Pidato John McCarthy, Duta Besar Australia untuk Indonesia dalam Acara Peringatan 50 Hubungan Indonesia Australia yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Australia-UI, tanggal 28 Januari 2000, di Hotel Borobudur, Jakarta.

Reformasi di Indonesia akan mempunyai pengaruh positif pada pandangan Australia terhadap Indonesia. Rakyat Australia secara keseluruhan tidak mendukung pemerintahan Indonesia yang semakin otoriter dan militeristik selama tiga dekade terakhir sehingga menimbulkan rasa simpati yang disebut 'a fair go' yaitu hak atas keadilan serta pemerataan kesejahteraan dan kesamaan kesempatan.³⁶

Dalam masalah Timor Timur, Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berhasil memutus mata rantai dengan masa lalu. Pemerintahannya membangun hubungan baik dengan Timor Timur serta menegakkan prinsip-prinsip dasar tentang hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia maupun bagi penduduk Timor Timur. Karenanya, Australia dan Indonesia tidak perlu lagi berlawanan perihal wacana tentang hak asasi manusia. Dan masalah Timor Timur dianggap sebagai masa lalu sehingga tidak perlu lagi menjadi penghalang hubungan Indonesia Australia.

Dalam masalah hubungan Indonesia Australia itu sendiri, Pemerintahan Baru RI di bawah Gus Dur memandang bahwa kelanjutan hubungan kedua negara sangat tergantung pada sikap Australia karena sikap Australia dianggap terlalu berlebihan bahkan 'kekanak-kanakan' dalam menanggapi masalah Timor Timur. Lebih lanjut Gus Dur menyatakan bahwa, apabila Australia ingin berkawan dengan 200 juta rakyat Indonesia, maka itu akan diterima orang-orang Indonesia. Kalau mereka mau memisahkan diri dengan kita, ya tidak apa-apa."³⁷

³⁶ Makalah Seminar dengan Tema: *Rebuilding Mutual Confidence and Understanding: The Way Ahead for Australia-Indonesia Relation*, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Australia-UI dan UIL di Hotel Borobudur, Jakarta pada 28 Januari 2001.

³⁷ Pernyataan Gus Dur sesuai mengumumkan susunan Kabinet Persatuan Nasional di Jakarta.

Perkembangan baru dari Pemerintah Baru Indonesia adalah pengiriman Arizal Affendi sebagai Dubes RI di Australia yang sempat ditunda akibat memburuknya hubungan Indonesia Australia berkaitan dengan masalah Timtim. Keputusan Pemerintah Indonesia ini disambut baik oleh Australia dan dianggap sebagai perkembangan yang positif.³⁵

4.2.2 Kebijakan Australia terhadap Indonesia Pasca Timor timur

Setelah Timor Timur resmi lepas dari Indonesia, pemerintah Australia nampak berupaya untuk memperbaiki hubungannya dengan Indonesia.³⁶ Kunjungan Menteri Luar Negeri Alexander Downer ke Indonesia merupakan salahsatu upaya tersebut.

Kunjunga Downer ke Jakarta pada 23 dan 24 Januari 2000 memiliki arti penting bagproses pemulihan hubungan Indonesia Australia. Downer merupakan pebat pertama Australia yang datang ke Jakarta setelah pemerintahan Iru RI terbentuk dan setelah hubungan Indonesia Australia mengalami ma terburuk.

Menurut Mer RI Alwi Shihab, hal tersebut menunjukkan keinginan Australia un segera memulihkan hubungan kedua negara. Dalam pembicaraan tara Presiden Abdurrahman Wahid, Downer dan juga Menlu Alwi Shihabrsebut tercapai kesepakatan bahwa hubungan yang akan dijalin antaradua negara selanjutnya adalah dengan melihat ke depan dan berupaya tuk membangun kembali hubungan yang saling menguntungkan.³⁷ Downer juga menyatakan sikap Australia yang mendukung keinginan Indonesia untuk mencegah diberlakukannya

³⁵ "Ristralia Sepakat Perbaiki Hubungan", *Suara Karya*, 22 Oktober 1999.

³⁶ "Alia Berusaha Perbaiki Hubungan dengan Indonesia", *Media Indonesia*, 30 Oktober 1999

³⁷ "Kunjungan Menlu Downer dan Prospek Pemulihan hubungan RI-Australia", *Kompas* 25 Jai 2000.

international tribunal (pengadilan internasional) dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pasca jajak pendapat di Timor Timur.³⁸

Pertemuan antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan John Howard di sela-sela upacara pemakaman mantan PM Jepang Keizo Obuchi di Tokyo Jepang pada 8 Juni 2000 juga menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati juga tentang pemulihan hubungan Indonesia Australia dengan lebih melihat ke depan.³⁹

Ada tiga tantangan yang akan dihadapi Australia dalam hubungannya dengan Indonesia selanjutnya, yaitu:⁴⁰

Pertama, meskipun ada harapan besar bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia, namun Australia perlu mengantisipasi segala kemungkinan dalam perubahan tersebut. Karena bagaimanapun juga proses transisi menuju demokrasi dari regime otoriter merupakan proses yang tidak mudah. Australia perlu bersikap seimbang: mendukung penerapan nilai-nilai universal tanpa bersikap menggurui bila segala sesuatunya berjalan dengan lambat. Kelangsungan hubungan antara Australia dengan Indonesia dan negara-negara dikawasan tergantung pada sikap Australia dalam menanggapi masalah-masalah tersebut. Karena bagaimanapun juga stabilitas politik, integrasi nasional, kemajuan ekonomi dan perkembangan demokrasi di Indonesia adalah kunci keterkaitan Australia dengan Asia.

Kedua, lengsernya Soeharto telah melemahkan posisi militer di Indonesia, dan kemerdekaan Timor Timur telah memunculkan ancaman disintegrasi di Indonesia yang mengancam persatuan dan kesatuan. Kepekaan dari pihak Australia sangat diperlukan khususnya untuk masalah Irian Jaya (Papua).

³⁸ Australia Dukung RI Cegah Tribunal, *Suara Karya*, 25 Januari 2000.

³⁹ "RI, Australia look ahead for close ties", *The Jakarta Post*, June 9, 2000.

⁴⁰ Hal Hill & Chris Manning, *loc.cit.* hal. 284., Dan Ikrar Nusa Bakti, "Indonesia-Australia Pasca Timor Timur", *TEMPO*, 25 Juni 2000.

Menurut Nancy Viviani dalam *Indonesia Update Conference* di Canberra, Australia perlu menyadari tentang perbedaan sejarah antara Irian Jaya dengan Timor Timur.

Ketiga, Kemerdekaan Timor Timur menuntut format politik baru dan juga bantuan pembangunan dari negara-negara tetangganya, yaitu Australia dan Indonesia. Bagaimanapun juga Australia dan juga Indonesia sangat berkepentingan dengan stabilitas politik dan ekonomi di Timor Timur agar wilayah tersebut tidak menjadi pusat pencucian uang (*money laundering*), penyelundupan orang dan penyebaran narkotik di Asia Tenggara.

Berkaitan dengan adanya beberapa tantangan yang dihadapi oleh Australia ditambah dengan kecurigaan-kecurigaan akibat sakit hati bangsa Indonesia terhadap sikap Australia dalam menanggapi masalah Timor Timur, maka Pemerintah Australia mengumumkan dokumen *The Defence Review 2000, Our Future Defence Force* yang merupakan dasar pembuatan *white paper* yang baru.⁴³

Dokumen ini menggarisbawahi tentang pentingnya stabilitas Indonesia bagi pertahanan nasional Australia. Dan Australia mendukung integritas nasional Indonesia.

Dokumen ini juga menegaskan bahwa masalah-masalah yang dihadapi Indonesia yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik dan sosial dan juga isu sparatis dan sektarian di beberapa tempat di Indonesia merupakan permasalahan dalam negeri Indonesia, meskipun Australia memiliki komitmen untuk membantu Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Hal ini tidak lain juga bertujuan untuk menjaga stabilitas

⁴³ Hal Hill & Chris Manning, *RI-Australia Ties: What Went Wrong*, loc.cit. hal. 284. Lihat juga Ikrar Nusa Bakti, "Indonesia-Australia Pasca Timor Timur", dalam *TEMPO*, 25 Juni 2000.

⁴⁴ "Australia assures RI on new defense paper", dalam *The Jakarta Post*, 26 Juni 2000.

kawasan Australia dan sekitarnya. Karena bagaimanapun juga kepentingan strategis Australia meliputi gugusan kepulauan dari Indonesia sampai Timor Timur, Papua New Guinea dan pulau-pulau di Pasifik Selatan.

4.2 Prospek Hubungan Indonesia Australia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur

Hubungan Indonesia Australia selalu mengalami pasang surut dan hubungan terburuk antara kedua negara terjadi pasca jajak pendapat di Timor Timur. Kelanjutan hubungan Indonesia Australia akan selalu mengikuti perkembangan keadaan dan juga upaya dari masing-masing pihak untuk memperbaiki hubungan bilateral tersebut dengan saling memahami perbedaan masing-masing. Dan pada prakteknya nanti perbedaan-perbedaan tersebut tidak perlu lagi menjadi hambatan untuk dibinanya hubungan antar negara yang bersahabat. Masing masing negara tidak perlu mengikuti arus perbedaan yang ada. Yang penting kemauan untuk memahami dan mengerti perbedaan sistem nilai mereka. Karena dengan pengertian dan pemahaman yang baik, sikap semena-mena dalam memandang dan menanggapi suatu permasalahan tidak akan muncul.

Apalagi hubungan Indonesia Australia selama ini tidak hanya bersifat negatif tapi juga ada segi-segi positifnya. Bagi Australia, Indonesia merupakan salah satu dari empat negaa terpenting bagi Australia disamping AS, Jepang dan Cina.⁴⁵ Australia sangat bergantung pada Indonesia secara geoekonomi dan geopolitik. Secara geoekonomi, Indonesia merupakan jalur laut dan udara utama Australia untuk berhubungan dengan negara lain. Secara geopolitik, Indonesia bisa digunakan sebagai *buffer state* Australia.

⁴⁵ Lihat White Paper:: Australia's Foreign and Trade Policy, In the National Interest, 1997, hal 57.

Indonesia adalah mitra dagang terbesar ke-10 dan terbesar ke-2 diantara negara ASEAN. Bagi Indonesia, Australia memiliki jasa yang besar dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Indonesia adalah penerima bantuan Australia terbesar kedua setelah Papua Nugini. Pada tahun 1998/1999 bantuan bilateral Australia kepada Indonesia mencapai AS\$127 juta. Australia juga merupakan salah satu negara pertama yang memberikan bantuan bagi krisis ekonomi Indonesia. Dan Australia merupakan penyumbang devisa Indonesia dari sektor pariwisata, di urutan kedua setelah Singapura.⁴⁶

Tentang masalah HAM yang masih sering dikaitkan dengan persoalan di Indonesia, terutama masalah Timor Timur, sesungguhnya semua negara yang telah menyetujui *Declaration of Human Rights*, termasuk Indonesia, sudah mempunyai komitmen untuk melaksanakannya. Namun tidak semua negara tersebut memiliki tolok ukur yang sama dalam menilai pelaksanaan HAM tersebut. Tolok ukur itu amat dipengaruhi oleh kedudukan individu dalam sistem sosial dan budaya suatu bangsa. Dalam masyarakat Paguyuban seperti Indonesia, hak individu dibatasi oleh hak-hak masyarakat, sementara dalam masyarakat modern seperti Australia hak individu bersifat lebih menonjol dan mutlak. Ketegangan antar negara akan muncul apabila suatu negara merasa berhak untuk mengajari pihak lain tentang bagaimana harus bersikap. Dan biasanya hal ini terjadi pada pihak yang merasa memiliki kebudayaan lebih tinggi. Sikap seperti inilah yang masih terdapat pada sebagian masyarakat Australia dalam memandang persoalan di Indonesia. Akan tetapi dengan pemahaman masing-masing budaya dengan baik, sedikit banyak akan mengurangi ketegangan hubungan antar negara.

⁴⁶ Australia Indonesia Relations at Glance 1998-1999

Munculnya kemauan baik dari para elit pemerintahan Indonesia dan Australia, juga mendorong terwujudnya kerjasama-kerjasama yang semakin konkrit. Peranan dari elit pemerintah (baik para menteri maupun kepala pemerintahan) menjadi penting karena faktor tersebut sangat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan (decision making process).

Namun demikian, faktor non elit juga harus diperhitungkan dan diikutsertakan dalam upaya menjalin kerjasama kedua negara. Menurut pengalaman terdahulu, pihak yang ingin menjalin hubungan dengan Indonesia cukup hanya mempertimbangkan kelompok elit saja. Akibatnya, kedua pemerintah mengenyampingkan pandangan serta sentimen publik masing-masing. Namun dengan pendekatan ini, hubungan kedua negara tidak cukup berakar dalam kedua masyarakat, baik Indonesia maupun Australia.

Akibat-akibat kejadian Timor Timur telah menunjukkan rapuhnya pendekatan ini. Kecurigaan publik Australia akan otoritarianisme dan aksi militer di Timor Timur telah mengguncangkan kepercayaan mereka terhadap Indonesia serta prospek hubungan kedua negara. Sebaliknya 'arogansi' Australia mengecewakan Indonesia dan menumbuhkan perasaan 'luka' di hati rakyat Indonesia. Oleh sebab itu tantangan terbesar bagi kedua negara adalah membangun kembali kepercayaan serta pemahaman bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, media, dan parlemen kedua belah pihak serta kelompok-kelompok lainnya.⁴⁷ Prioritas bagi Indonesia dan Australia adalah mengembangkan pemahaman serta niat baik masing-masing di kalangan kedua masyarakat yang lebih luas

⁴⁷ Hasil Seminar dengan Tema: *Rebuilding Mutual Confidence and Understanding: The Way Ahead for Australia-Indonesia Relation*, diadakan oleh Pusat Kajian Australia-UI dan AII, di Hotel Borobudur, Jakarta, tanggal 28 Januari 2000.

untuk menciptakan dasar hubungan yang lebih kokoh dan langgeng guna mendorong tercapainya kepentingan bersama kedua negara.

Disamping itu, faktor-faktor eksternal seperti perkembangan situasi politik, ekonomi dan pertahanan keamanan yang melibatkan negara-negara besar di Asia Pasifik juga perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat memberi dampak positif maupun negatif pada hubungan bilateral kedua negara. Jika kedua negara berada pada posisi yang sama dan memiliki kepentingan nasional yang bersamaan, maka kerjasama kedua negara di arena politik regional dan Internasional akan semakin erat. Jika kedua negara juga secara bersama merasakan kerugian sebagai akibat dari kebijakan ekonomi suatu negara besar, maka penggalangan kekuatan di antara keduanya akan terjadi. Namun demikian, jika kedua negara berada di dua kubu kepentingan yang berbeda, maka akan berpengaruh negatif pula bagi hubungan bilateral Indonesia Australia.

Kerjasama bilateral dapat menjadi sebuah bentuk kerjasama yang mapan apabila dari masing-masing aktor tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip yang ada akan tetapi juga memahaminya secara seksama. Ada tiga faktor yang menjadi landasan bagi Indonesia dan Australia untuk tetap menciptakan hubungan baik, yaitu:

Pertama, letak geografis. Pantai barat laut dan pantai utara Australia merupakan batas terdekat dengan wilayah Indonesia. Faktor ini mendorong kedua negara untuk selalu berusaha menghindari perbedaan mecolok dalam konsep masing-masing dalam mempertimbangkan strategi politik jangka panjang yang menyangkut hubungan kedua negara.

Kedua, perbedaan sejarah, pengalaman politik, ras, budaya dan struktur ekonomi politik.

Ketiga, perkembangan yang mengubah konfigurasi peta politik di Asia Tenggara pada dasawarsa 1970-an.⁴⁸

Bagaimanapun juga, dari sisi strategis, hubungan yang bersahabat antara dua negara bertetangga akan lebih menguntungkan daripada sikap yang saling bermusuhan, apalagi Indonesia dan Australia adalah dua negara yang memegang peran dominan dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik.



⁴⁸ Drs. Ign. Kristanyo H., *Sesudah Kasus David Jenkins, Bagaimana Hubungan Indonesia Australia*, dalam Philips Kitley (eds.), op. Cit. Hal. 313.

BAB V KESIMPULAN

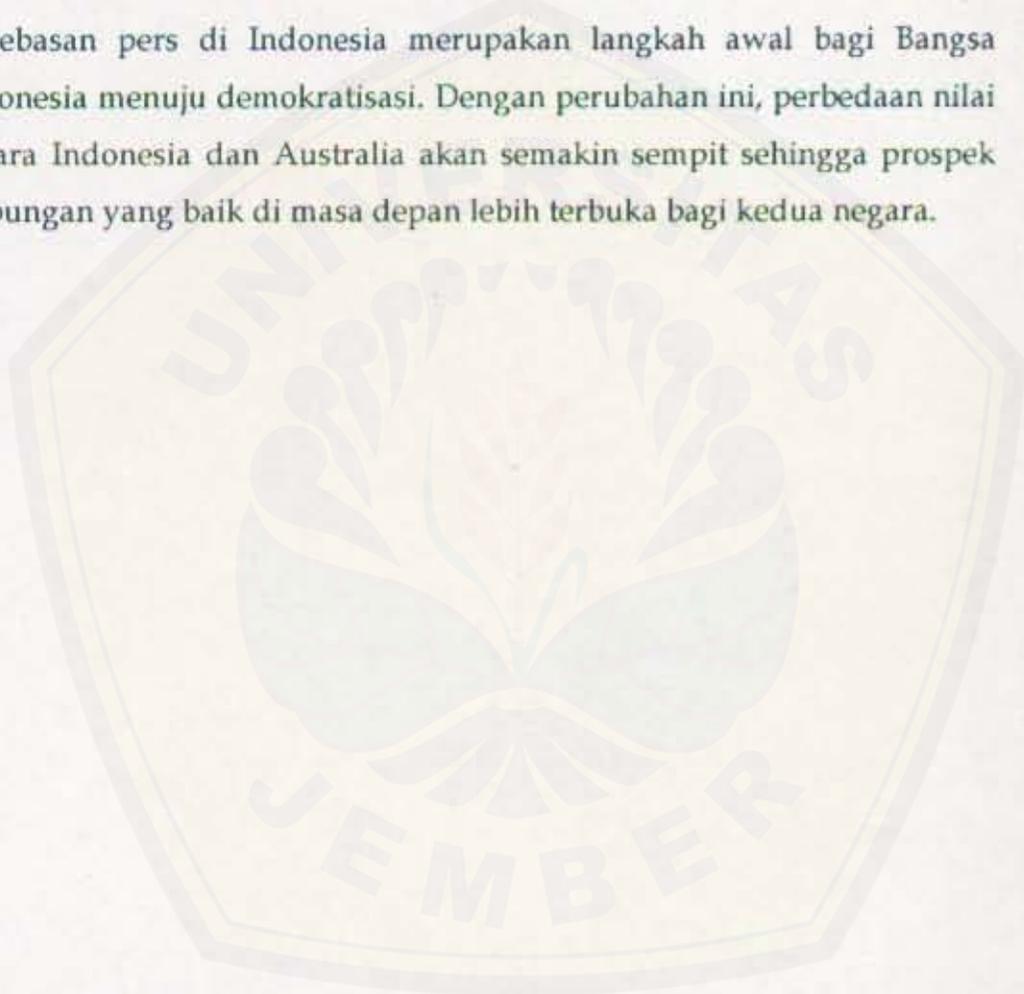
Dari pembahasan yang telah dilakukan serta berdasar pada permasalahan yang telah dirumuskan tentang prospek hubungan Indonesia Australia pasca jajak pendapat di Timor Timur, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia dan Australia adalah dua negara yang secara geografis letaknya berdekatan namun dalam segala hal keduanya berbeda, kecuali kedekatan geografinya. Di bidang ideologi Indonesia dan Australia sangat berbeda; Indonesia menganut ideologi Pancasila sedangkan Australia menganut ideologi Liberal. Di bidang politik, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, Australia menganut sistem Liberal. Dalam bidang ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi kekeluargaan, Australia menganut sistem ekonomi Liberal. Di bidang sosial budaya Indonesia menganut sistem sosial budaya kolektif yang lebih menitikberatkan pada kebersamaan, sedangkan Australia menganut sistem sosial budaya individualis. Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan pengerahan seluruh kekuatan rakyat menghadapi serangan dari luar dengan sifat defensif aktif, sedangkan Australia sistem pertahanan dan keamanannya menitikberatkan pada kekuatan laut dan udara dengan daya ofensif yang tinggi. Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali disebut sebagai perbedaan sistem nilai.

2. Berdasarkan pengalaman sejarah, hubungan Indonesia Australia selalu mengalami pasang surut. Hubungan baik terjalin pada saat Indonesia berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaannya pada saat Partai Buruh berkuasa di Australia. Namun pada masa selanjutnya hubungan kedua negara seringkali terganggu oleh masalah-masalah yang justru terjadi di Indonesia. Masalah tersebut antara lain masalah Irian Barat, masalah pemberontakan PRRI/Permesta, masalah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan yang terakhir masalah Timor Timur.
3. Masalah Timor Timur berdampak sangat buruk terhadap hubungan Indonesia Australia, utamanya pada pasca jajak pendapat. Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Perbedaan persepsi dari Australia dan Indonesia dalam memandang permasalahan yang ada. Hal ini tidak lepas dari perbedaan sistem nilai yang dimiliki oleh kedua negara.
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah Australia terhadap Indonesia berkaitan dengan masalah Timor Timur.
 - c. Dukungan Amerika Serikat dan juga dunia Internasional terhadap Australia dalam masalah Timor Timur yang sangat mempengaruhi kebijaksanaan yang diambil oleh PM John Howard dari Partai Liberal.
4. Hubungan Indonesia dan Australia pada masa selanjutnya sangat tergantung pada situasi dalam negeri masing-masing negara baik di Indonesia maupun di Australia, dan juga tergantung pada situasi politik Internasional. Berdasarkan sejarah, hubungan Indonesia Australia apabila yang berkuasa di Australia adalah Partai Buruh, hubungan

keduanya relatif lebih baik dibandingkan dengan apabila Partai Liberal yang berkuasa.

5. Perubahan politik dalam negeri Indonesia merupakan sebuah peluang untuk merubah persepsi rakyat Australia terhadap Indonesia yang sebelumnya dianggap otoriter dan militeristik. Terbentuknya pemerintahan baru secara demokratis dan semakin terbukanya kebebasan pers di Indonesia merupakan langkah awal bagi Bangsa Indonesia menuju demokratisasi. Dengan perubahan ini, perbedaan nilai antara Indonesia dan Australia akan semakin sempit sehingga prospek hubungan yang baik di masa depan lebih terbuka bagi kedua negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adil, Hilman. 1993. Hubungan Australia dengan Indonesia (1945-1962), Terjemahan ILV-LIPI. Jakarta : Djambatan.
- _____. 1997. Kebijakan Australia Terhadap Indonesia 1962-1966. Jakarta : CSIS.
- Bell, Desmond. 1990. Australia And The World : Prolouge And Prospect. Canberra Australia : Strategic And Difence Studies Center, ANU.
- Chauvel, Richard H. 1992. Budaya dan Politik Australia, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Chritley, Susan. 1995. Hubungan Australia dengan Indonesia : Faktor Geografi Politik dan Strategi Keamanan, Terjemahan Sugiarto Sriwibowo. Jakarta : Penerbit UI.
- Djalal, Hasyim. 1997. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa 1990. Jakarta : CSIS.
- Dougherty, James E. dan Robert L. Pfalaggarf, Jr. 1983. Beberapa Teori Hubungan Internasional, Terjemahan Amien Rais. Jogja : FISIP Universitas Gajah Mada.
- Fatah, Eep Saifulah. 2000. Zaman Kesempatan : Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru. Jakarta : Mizan.
- George, Margareth. 1986. Australia and Indonesia Revolution, Terjemahan Herman Sulistyو dan Wardah Hafidz. Jakarta : Panca Simpati.
- Gerungan. 1980. Psikologi Sosial. Bandung : Jemmars.
- Hadi, Sutrisno. 1993. Metode Research Jilid I. Jogjakarta : Andi Offset.

- Hardjono, Ratih. 1992. Suku Putihnya Asia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Khusyairi, Akhmad. 1995. Disertasi S3 : Politik Luar Negeri Australia di Bawah Pemerintahan Gough Whitlam dan Hubungannya dengan Indonesia. Jogjakarta : Universitas Gajah Mada.
- Khitley, Philips dkk. 1989. Australia di Mata Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1980. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Komaruddin. 1987. Metode Penulisan Skripsi dan Tesis. Bandung : Penerbit Angkasa.
- Mackie, Jamie. 1994. Melebarkan Cakrawala Australia Indonesia : Dalam Pandangan Masing-masing Cara Australia Memandang Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mc. Cleland, Charles A. 1986. Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem, Terjemahan Mien Jobhaar dan Iskak Zakir, Jakarta : CV. Rajawali.
- Mas'ood, Mochtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional : disiplin dan Metodologi. Jakarta : LP3ES.
- _____ dan Colin Andrews. 1997. Perbandingan Sistem Politik. Jogja : Gajah Mada University Press.
- Noor, Machmuddin dkk. 1977. Lahirnya Propinsi Timor Timur. Jakarta : Badan Penerbit Almanak RI.
- O'Hare, Martin dan Anthonie Reid. 1995. Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Plano, Jack C. Dkk. 1985. Kamus Analisa Politik. Jakarta : CV. Rajawali.
- Soesastro, Hadi. 1995. Indonesia-Australia Relations : Diverse Cultures Converging Interest. Jakarta : CSIS.
- Surakhmad, Winarno. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode dan Teknik. Bandung : Transito.
- Syafe'i, Inu Kencana. 1994. Sistem Politik Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- The Liang Gie. 1974. Ilmu Politik. Jogja : Gajah Mada University Press.
- Universitas Jember. 1988. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember.

B. JURNAL DAN MAJALAH

- Argapura, Vol. 18 No. 1 dan 2, 1998.
- Analisis CSIS, No. 8, 1985.
- _____, No. 11, 1986.
- _____, No. 2, 2000.
- Australian Journal of International Affairs, Vol. 49 No. 2, November 1995.
- _____, Vol. 54 No. 1, April 2000.
- Australia Journal of Politics and History, Vol. 46 Issues 2, 2000.
- Asia Pasific Book, 1983.
- Forum Keadilan, 12 September 1999.
- _____, 26 September 1999.
- Gatra, 18 September 1999.
- _____, 2 Oktober 1999.
- Jurnal Ilmu Politik, No. 6, 1995.
- Kontan, No. 51, Tahun III, 20 September 1999.

- Panji masyarakat, No. 24 Tahun III, 29 September 1999.
- Prisma, No. 9, September 1999.
- Tempo, 8 Februari 1999.
- _____, 26 September 1999.
- _____, 25 Juni 2000.
- The Indonesian Quaterly, Vol. XXVII No. 4 Fourth Quarter, 1999.

C. SURAT KABAR

- Jawa Pos, 6 September 1999.
- _____, 16 September 1999.
- Kompas, 3 September 1999.
- _____, 8 September 1999.
- _____, 12 September 1999.
- _____, 16 September 1999.
- _____, 17 September 1999.
- _____, 18 September 1999.
- _____, 23 September 1999.
- _____, 27 September 1999.
- _____, 28 September 1999.
- _____, 29 September 1999.
- _____, 30 September 1999.
- _____, 25 Januari 2000.
- Media Indonesia, 24 Mei 1999.
- _____, 9 September 1999.
- _____, 30 September 1999.
- _____, 30 Oktober 1999.

- Republika, 29 Oktober 1999.
- Suara Karya, 17 September 1999.
- Suara Karya, 22 Oktober 1999.
- _____, 25 Januari 2000.
- The Jakarta Post, January 26, 2000.
- _____, June 9, 2000.
- _____, June 26, 2000.

D. LAIN-LAIN

- Australia Indonesia Relations at Glance 1998-1999.
- Australia Selayang Pandang, 2000.
- Hasil Seminar dengan Tema *Rebuilding Mutual Confidence and Understanding : The Way Ahead for Australia-Indonesia Relation*, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Australia dan Australia Indonesia Insitute, di Hotel Borobudur Jakarta, pada 28 Januari 2000.
- Naskah Pidato John McCharty, Duta Besar Australia untuk Indonesia, dalam Peringatan 50 Tahun Hubungan Indonesia Australia dan Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Australia dan Australia Indonesia Institute, di Hotel Borobudur Jakarta, pada 28 Januari 2000.
- *White Paper : Australia's Foreign and Trade Policy*, In The National Interest, 1997.
- <http://www.dfa-deplu.go.id/news.htm>



Lampiran 1.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1976.
TENTANG
PENGESEHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR
KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa delegasi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur telah mengajukan petisi kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang menyatakan kehendaknya secara resmi untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di wilayah Timor Timur, telah diperoleh keyakinan, bahwa Rakyat Timor Timur benar-benar mempunyai kehendak yang kuat dan bebas untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa kehendak Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur tersebut dalam huruf a telah diterima oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia dan karena itu perlu ditetapkan undang-undang yang mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.

Pasal 1

Mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Timor.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di wilayah Timor Timur.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juli 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juli 1976.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976 NOMOR 35.

Career News on Indonesia: New Information, Speeches and Statements: Press Releases
View and Postings: Media Coverage of Indonesia: General Background on Indonesia:
International Relations: Special Events: Consular and Visa Policies:
Home: About the Department: Other Links: Quadra

Terjemahan tidak resmi

**PERSETUJUAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL
MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR**

Pemerintah Indonesia dan Portugal,

Mengingat resolusi-resolusi Majelis Umum 1514 (XV) 1541 (XV), 2625 (XXV) dan resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan yang relevan yang diterima Dewan Keamanan dan Majelis Umum mengenai masalah Timor Timur;

Memperhatikan usaha berkelanjutan dari Pemerintah Indonesia dan Portugal sejak bulan Juli 1983, melalui Jasa baik Sekretaris Jenderal, untuk mencari suatu penyelesaian yang adil, menyeluruh dan dapat diterima secara internasional terhadap masalah Timor Timur;

Mengingat persetujuan tanggal 5 Agustus 1998 untuk melakukan, dibawah naungan Sekjen PBB, perundingan mengenai suatu status khusus berdasarkan suatu otonomi yang luas bagi Timor Timur tanpa mempengaruhi posisi dasar masing-masing Pemerintah terhadap status akhir Timor Timur;

Setelah membahas suatu kerangka konstitusional untuk otonomi Timor Timur berdasarkan suatu rancangan yang diajukan oleh PBB, sebagaimana telah diamendkir oleh Pemerintah Indonesia;

Mencatat posisi Pemerintah Indonesia bahwa otonomi khusus yang diusulkan akan ditetapkan hanya sebagai suatu penyelesaian akhir terhadap masalah Timor Timur, dengan sepenuhnya mengakui kedaulatan nasional Indonesia atas Timor Timur;

Mencatat posisi Pemerintah Portugal bahwa suatu rejim otonomi bersifat transisional, yang tidak memerlukan pengakuan atas kedaulatan Indonesia atas Timor Timur atau penghapusan Timor Timur dari daftar wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri di Majelis Umum, sementara menunggu suatu keputusan akhir mengenai masalah Timor Timur oleh rakyat Timor Timur melalui suatu penentuan nasib sendiri di bawah naungan PBB;

Memperhatikan bahwa meskipun Pemerintah Indonesia dan Portugal mempunyai posisi prinsip masing-masing mengenai usulan tentang otonomi khusus yang telah disiapkan, kedua pihak sepakat bahwa adalah perlu untuk melanjutkan proses perdamaian dan oleh karena itu Pemerintah Indonesia dan Portugal sepakat bahwa Sekjen PBB perlu untuk mengkonsultasikan kerangka konstitusional mengenai otonomi sebagaimana terlampir pada persetujuan pokok ini sebagai annex kepada rakyat Timor Timur;

Memperhatikan bahwa Pemerintah Indonesia dan Portugal telah meminta Sekretaris Jenderal untuk merancang suatu cara dan prosedur konsultasi melalui penentuan pendapat secara langsung, rahasia dan universal.

Sepakat sebagai berikut:

Pasal 1

Meminta Sekretaris Jenderal untuk mengajukan rancangan kerangka konstitusional yang diusulkan terlampir yang mengatur tentang suatu otonomi khusus bagi Timor Timur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada rakyat Timor Timur, baik yang berada di dalam maupun di luar Timor Timur, untuk memperoleh pertimbangan dan penerimaan atau penolakan mereka melalui suatu konsultasi berdasarkan suatu penentuan pendapat yang langsung, rahasia dan universal.

Pasal 2

Meminta Sekretaris Jenderal untuk menempatkan, segera setelah penandatanganan Persetujuan ini, suatu misi PBB yang layak di Timor Timur agar beliau dapat melaksanakan penentuan pendapat tersebut

11/17/99

secara efektif.

Pasal 3

Pemerintah Indonesia akan bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Timor Timur agar penentuan pendapat dapat dilaksanakan secara adil dan damai dalam suasana yang bebas dari intimidasi, kekerasan dan campurtangan dari pihak manapun.

Pasal 4

Meminta Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan hasil penentuan pendapat termaksud kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum, serta memberitahukannya kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal dan rakyat Timor Timur;

Pasal 5

Jika Sekretaris Jenderal menentukan, atas dasar hasil penentuan pendapat dan sesuai dengan persetujuan ini bahwa, kerangka konstitusional bagi otonomi khusus yang diusulkan diterima oleh rakyat Timor Timur, maka Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah konstitusional yang diperlukan bagi pelaksanaan kerangka konstitusional tersebut, dan Pemerintah Portugal harus mulai menempuh prosedur di PBB yang diperlukan untuk mengkuarkan Timor Timur dari daftar Majelis Umum mengenai Wilayah-wilayah yang belum Berpemerintahan Sendiri dan menghapus masalah Timor Timur dari agenda Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB.

Pasal 6

Jika Sekretaris Jenderal menentukan, atas dasar hasil penentuan pendapat dan sesuai dengan persetujuan ini, bahwa kerangka konstitusional bagi otonomi khusus yang diusulkan tersebut tidak diterima oleh rakyat Timor Timur, maka Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah konstitusional yang diperlukan untuk memutuskan hubungannya dengan Timor Timur, dan dengan demikian mengembalikan berdasarkan hukum Indonesia status Timor Timur seperti sebelum 17 Juli 1975, dan Pemerintah Indonesia dan Portugal dan Sekretaris Jenderal akan menyetujui untuk suatu pemindahan kekuasaan di Timor Timur kepada PBB secara tertib dan damai. Sekretaris Jenderal setelah mendapatkan mandat legielatif yang diperlukan, akan menempuh prosedur yang memungkinkan Timor Timur memulai proses transisi menuju kemerdekaan.

Pasal 7

Selama masa interim antara selesainya penentuan pendapat dan dimulainya pelaksanaan opsi yang manapun, dari hasil penentuan pendapat, kedua pihak meminta Sekretaris Jenderal untuk memelihara suatu kehadiran PBB yang memadai di Timor Timur.

Ditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999.

Ttd

Alli Alatas
Menteri Luar Negeri RI

Ttd

Jaimie Gama
Menteri Luar Negeri Portugal

Diaksikan oleh
Ttd

Kofi A. Annan
Sekjen PBB

Lampiran 3.

• Current News on Indonesia • New Information • Speeches and Statements • Press Releases
• Views and Positions • Media Coverage of Indonesia • General Background on Indonesia
• International Relations • Special Events • Consular and Visa Services
• Home • About this Department • Other Links • Guestbook

Terjemahan tidak resmi

PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR PERSETUJUAN MENGENAI PENGATURAN KEAMANAN

Pemerintah Indonesia dan Portugal dan Sekretaris Jenderal

Sepakat bahwa

1. Suatu iklim yang aman tanpa adanya kekerasan atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan penentuan pendapat secara bebas dan adil di Timor Timur. Tanggung Jawab untuk menjamin adanya iklim semacam itu dan untuk pemeliharaan tertib hukum umumnya berada di pundak otoritas keamanan Indonesia yang layak. Netralitas penuh dari Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Indonesia sangatlah penting dalam hal ini.
2. Komisi Perdamaian dan Stabilitas yang dibentuk di Dili tanggal 21 April 1999 harus dapat segera berfungsi. Komisi tersebut dengan bekerjasama dengan PBB, akan menyusun suatu aturan perilaku untuk masa sebelum dan sesudah konsultasi, yang harus ditaati oleh semua pihak, menjamin adanya peletakan senjata serta mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai perlucutan senjata.
3. Sebelum dimulainya pendaftaran, Sekretaris Jenderal akan menentukan berdasarkan penilaian yang obyektif, bahwa situasi keamanan yang diperlukan bagi pelaksanaan proses penentuan pendapat secara damai.
4. Hanya polisi yang akan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan tertib hukum. Sekretaris Jenderal, setelah menerima mandat yang diperlukan, akan menyediakan sejumlah pejabat polisi sipil yang akan bertindak sebagai penasehat Polisi Indonesia dalam melaksanakan tugas mereka dan pada saat penentuan pendapat, untuk mengawasi pengawalan kartu-kartu suara dari dan menuju tempat-tempat pemungutan suara.

Ditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999,

Ttd

Ttd

Ttd

Alli Alatas
Menteri Luar Negeri RI

Kofi A. Annan
Sekjen PBB

Jaime Gama
Menteri Luar Negeri Portugal

Current News on Indonesia • New Information • Speeches and Statements • Press Releases
• Views and Positions • Media Coverage of Indonesia • General Background on Indonesia
• International Relations • Special Events • Consular and Visa Services
• Home • About this Department • Other Links • Guestbook



Terjemahan tidak resmi

**PERSETUJUAN MENGENAI MODALITAS
UNTUK PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT TIMTIM
MELALUI PEMUNGUTAN SUARA SECARA LANGSUNG**

Pemerintah Indonesia dan Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB sepakat bahwa,

Segara setelah tercapainya persetujuan antara kedua Pemerintah tersebut yang meminta Sekjen PBB melakukan penentuan pendapat rakyat Timor Timur apakah mereka menerima atau menolak kerangka konstitusional bagi otonomi yang diusulkan, PBB akan memulai persiapan bagi penyelenggaraan penentuan pendapat tersebut, melalui penggelaran personil yang memadai di Timor Timur untuk melaksanakan berbagai tahapan dari proses penentuan pendapat tersebut. Persiapan untuk pemungutan suara di luar Timor Timur juga akan dimulai di lokasi-lokasi konsentrasi utama/besar orang-orang Timor Timur di luar Timor Timur.

A. Tanggal Penentuan Pendapat

Pemungutan suara akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 1999 di dalam atau di luar Timor Timur.

B. Pernyataan Yang Akan Diajukan Kepada Pemilih

Pertanyaan yang akan diajukan oleh Sekretaris Jenderal kepada pemilih adalah:

"Apakah anda menerima otonomi khusus bagi Timor Timur dalam Menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia?"

ATAU

"Apakah anda menolak otonomi khusus bagi Timor Timur yang akan Menolak mengakibatkan berpisahya Timtim dari Indonesia?"

C. Hak Memberikan Suara

Orang-orang dibawah ini yang telah berusia 17 tahun, berhak memberikan suara dalam penentuan pendapat:

- a. Orang yang lahir di Timor Timur

- b. Orang yang lahir di luar Timor Timur, tetapi paling tidak salah satu dari orang tuanya lahir di Timor Timur, dan
- c. Orang yang suami atau istrinya termasuk dalam dua kategori tersebut di atas.

D. Jadwal Proses Penentuan Pendapat (Dalam periode waktu yang saling bersilang)

Jadwal tahap-tahap operasional proses penentuan pendapat akan diatur kurang lebih sebagai berikut :

Rencana operasional/penggetaran	10 Mei - 15 Juni
Program pemberian informasi kepada publik/pendidikan pemilih	10 Mei - 5 Agustus
Persiapan dan Pendaftaran	13 Juni - 17 Juli
Pengumuman daftar pemilih dan pengajuan Keberatan/Keputusan terhadap pengajuan keberatan dan keluhan-keluhan	18 Juli - 23 Juli
Kampanye Politik	20 Juli - 6 Agustus
Periode tenang	6 - 7 Agustus
Pemungutan Suara	8 Agustus

E. Tahap – tahap operasional

a. Penyebaran informasi

- PBB akan menyediakan naskah persetujuan Pokok dari dokumen otonomi yang akan dipungut suaranya dalam bahasa-bahasa: Tetun, Indonesia, Portugis, dan Inggris.
- PBB akan menyebarluaskan dan menjelaskan isi Persetujuan Pokok dan dokumen otonomi secara imparial dan faktual di dalam dan di luar Timtim.
- PBB akan menjelaskan kepada pemilih proses dan prosedur pemungutan suara dan implikasi dari pilihan "menerima" atau "menolak".
- Stasiun-stasiun radio dan surat kabar-surat kabar di Timor Timur maupun media Indonesia dan Portugal akan dimanfaatkan didalam penyebaran informasi ini. Sarana-sarana penyebaran lainnya yang layak akan digunakan pula bila diperlukan.

b. Pendaftaran

- Pendaftaran di dalam dan di luar Timor Timur/Timtim akan dilakukan secara terus menerus dalam waktu 20 hari.

- Dua ratus pusat pendaftaran akan dibuka di Timtim untuk tujuan ini.
- Di luar Timtim, tempat-tempat pendaftaran khusus akan dibuka di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Ujung Pandang, Sydney, Darwin, Perth, Melbourne, Lisbon, Maputo, Macau dan New York dengan kemungkinan penyesuaian sesuai keperluan. PBB dapat menggunakan jasa "The Australian Electoral Commission" untuk pemungutan suara di Australia dan "International Organization for Migration (IOM) di Portugal dan tempat lainnya.
- Daftar-daftar pendaftaran akan dipamerkan selama lima hari pada akhir masa pendaftaran di tiap-tiap pusat pendaftaran, kantor wilayah dan di markas besar di Dili. Keberatan-keberatan terhadap daftar-daftar tersebut harus disampaikan kepada kantor-kantor wilayah guna mendapatkan keputusan final dari Komisi Pemilihan Sebelum hari pemungutan suara.

c. Kampanye

- Pendukung dan penentang usulan otonomi akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara secara damai dan demokratis selama jangka waktu yang ditentukan untuk tujuan ini.
- Akan terdapat suatu aturan perilaku untuk kampanye yang akan diusulkan oleh PBB dan dibahas dengan para pendukung dan penentang proposal otonomi.
- PBB akan menyediakan sarana untuk memberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi kedua pihak untuk menyebarkan pandangan mereka kepada publik.
- Pejabat Pemerintah Indonesia dan Portugal tidak akan berpartisipasi dalam kampanye untuk mendukung salah satu opsi yang ada.
- Pejabat Pemerintah Timor Timur dapat berkampanye dalam kapasitas pribadi. Semua kegiatan kampanye itu akan dilakukan sesuai dengan Aturan Perilaku tanpa menggunakan dana dan sumber pemerintah atau menggunakan jabatannya untuk melakukan tekanan.

d. Pemungutan Suara di Timtim

- Pemungutan suara di Timor Timur akan dilaksanakan di sekitar 700 tempat pendaftaran/pemungutan suara yang ditempatkan di 200 pusat pemungutan suara

e. Pemungutan Suara di Luar Timtim

- Pemungutan suara akan dilakukan di tempat-tempat pemungutan suara yang akan dilakukan di lokasi-lokasi yang sama dengan pusat-pusat pendaftaran tersebut diatas

f. Peninjau

- Indonesia dan Portugal berhak mengirinkan wakil-wakil mereka untuk mengamati seluruh tahapan kegiatan proses penentuan pendapat baik di dalam maupun di luar Timtim
- Peninjau internasional akan dapat mengamati proses penentuan pendapat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disusun oleh PBB guna mengatur kehadiran mereka.

F. PENDANAAN

Sekjen PBB akan meminta persetujuan Dewan Keamanan untuk kegiatan ini guna menjamin adanya pendanaan yang dibebankan kepada negara-negara anggota. Kontribusinya sukarela yang ada akan disalurkan melalui suatu Dana Perwalian yang akan dibentuk untuk tujuan ini.

G. KEAMANAN

Otoritas Indonesia akan menjamin adanya suatu iklim yang aman bagi suatu proses penentuan pendapat secara bebas dan adil dan akan bertanggung jawab terhadap keamanan personil PBB. Sejumlah petugas keamanan PBB akan digelar guna menjamin keamanan dan keselamatan personil dan harta milik PBB. Sejumlah polisi sipil internasional akan berada di Timor Timur untuk menjadi penasehat Polisi Indonesia selama tahap-tahap kegiatan penentuan pendapat dan pada saat penentuan pendapat, mengawasi pengawalan kartu-kartu suara dan kotak suara ke dan dari tempat-tempat pemungutan suara.

Ditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999

Ttd	Ttd	Ttd
Ali Alatas	Kofi A. Annan	Jaime Gama
Menteri Luar Negeri RI	Sekjen PBB	Menteri Luar Negeri Portugal

RESOLUSI NO. 1264 TAHUN 1999 DEWAN KEAMANAN PBB

Sumber: KOMPAS, 16 September 1999

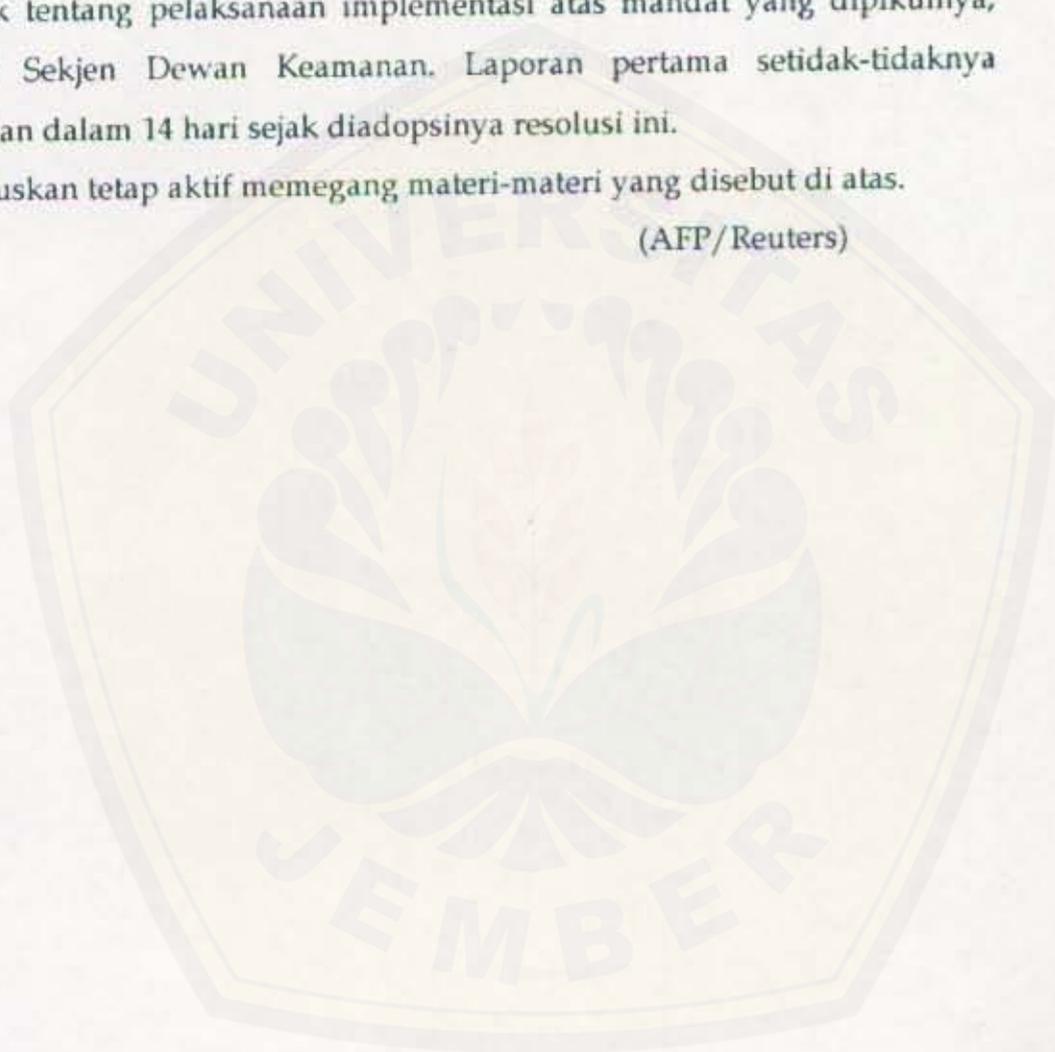
1. Mengecam seluruh tindak kekerasan di Timtim, mendesak untuk segera diakhiri tindakan tersebut, dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas tindakan itu diseret ke pengadilan.
2. Menekankan perlunya segera dikoordinasikan bantuan kemanusiaan serta pentingnya memberi akses penuh, aman dan tanpa dihalang-halangi pada organisasi kemanusiaan. Menghimbau semua pihak untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi seperti itu sehingga mereka bisa memberi jaminan perlindungan terhadap penduduk sipil yang beresiko, pengembalian pengungsi dengan selamat, serta penyampaian bantuan kemanusiaan yang efektif.
3. Memberi wewenang pembentukan sebuah pasukan multinasional di bawah struktur kepemimpinan terpadu, untuk menindaklanjuti permintaan Pemerintah Indonesia yang disampaikan pada Sekjen PBB pada 12 September 1999, dengan tugas-tugas sebagai berikut: memulihkan perdamaian dan keamanan di Timtim, untuk melindungi dan mendukung Misi PBB di Timtim (Unamet) dalam mengemban tugasnya, dan memberi wewenang negara-negara yang berpartisipasi dalam pasukan multinasional untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu demi terpenuhinya mandat ini.
4. Menyambut baik komitmen yang diungkapkan Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan pasukan nasional dalam seluruh aspek implementasi mandat ini. Juga mengupayakan koordinasi antara pasukan multinasional dengan Pemerintah Indonesia.
5. Menggarisbawahi tanggung jawab berkesinambungan Pemerintah Indonesia sesuai kesepakatan (New York) 5 Mei 1999, Indonesia juga bertanggung

jawab atas terlaksananya mandat pada pasukan multinasional seperti tertera di paragraf 3 di atas, terjaganya perdamaian dan keamanan di Timtim pada fase sementara sejak setelah hasil penentuan pendapat diumumkan sampai awal implementasi hasil penentuan jajak pendapat, serta menjamin keamanan bagi personel dan staf Unamet.

6. Menyambut baik tawaran negara-negara anggota untuk mengorganisasi, memimpin dan menyumbang pasukan multinasional ke Timtim. Menghimbau negara-negara anggota untuk memberi kontribusi lebih jauh untuk personel, peralatan dan sumber-sumber daya lainnya. Mengundang negara-negara anggota untuk membantu menginformasikan kepemimpinan pasukan multinasional serta Sekjenya.
7. Menekankan bahwa tanggung jawab penguasa Indonesia adalah untuk mengambil langkah sesegera mungkin dan seefektif mungkin untuk menjamin kepulangan para pengungsi ke Timtim dengan aman.
8. Mengingatkan artikel 6 Kesepakatan 5 Mei 1999 yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia serta Portugal beserta Sekjen PBB agar menyetujui pengaturan pemindahan kekuasaan secara damai dan tertib di Timtim ke PBB, serta meminta kepemimpinan pasukan multinasional untuk bekerja sama erat dengan PBB untuk membantu dan mendukung hal-hal di atas.
9. Menekankan bahwa biaya (pengiriman maupun operasi) pasukan ditanggung oleh negara-negara yang sedia berpartisipasi, serta meminta Sekjen untuk membentuk dana gabungan sehingga memungkinkan dialokasikannya dana bagi negara atau operasi yang diperlukan.
10. Menyetujui bahwa pasukan multinasional hendaknya dikirim secara kolektif ke Timtim, sampai diganti sesegera mungkin oleh sebuah operasi penjagaan perdamaian PBB, serta mempersilakan Sekjen untuk membuat rekomendasi secepatnya untuk operasi penjagaan perdamaian PBB, serta mempersilakan Sekjen untuk membuat rekomendasi secepatnya untuk operasi penjagaan perdamaian pada Dewan Keamanan.

11. Mempersilakan Sekjen untuk melakukan perencanaan dan persiapan bagi sebuah pemerintahan transisi di bawah PBB di Timtim, memasukkan di dalam proses itu operasi penjagaan perdamaian PBB yang akan dikirim pada fase implementasi hasil penentuan pendapat (Fase III). Serta membuat rekomendasi sesegera mungkin pada Dewan Keamanan.
12. Meminta kepemimpinan pasukan multinasional untuk memberi laporan periodik tentang pelaksanaan implementasi atas mandat yang dipikulnya, melalui Sekjen Dewan Keamanan. Laporan pertama setidaknya dilakukan dalam 14 hari sejak diadopsinya resolusi ini.
13. Memutuskan tetap aktif memegang materi-materi yang disebut di atas.

(AFP/Reuters)



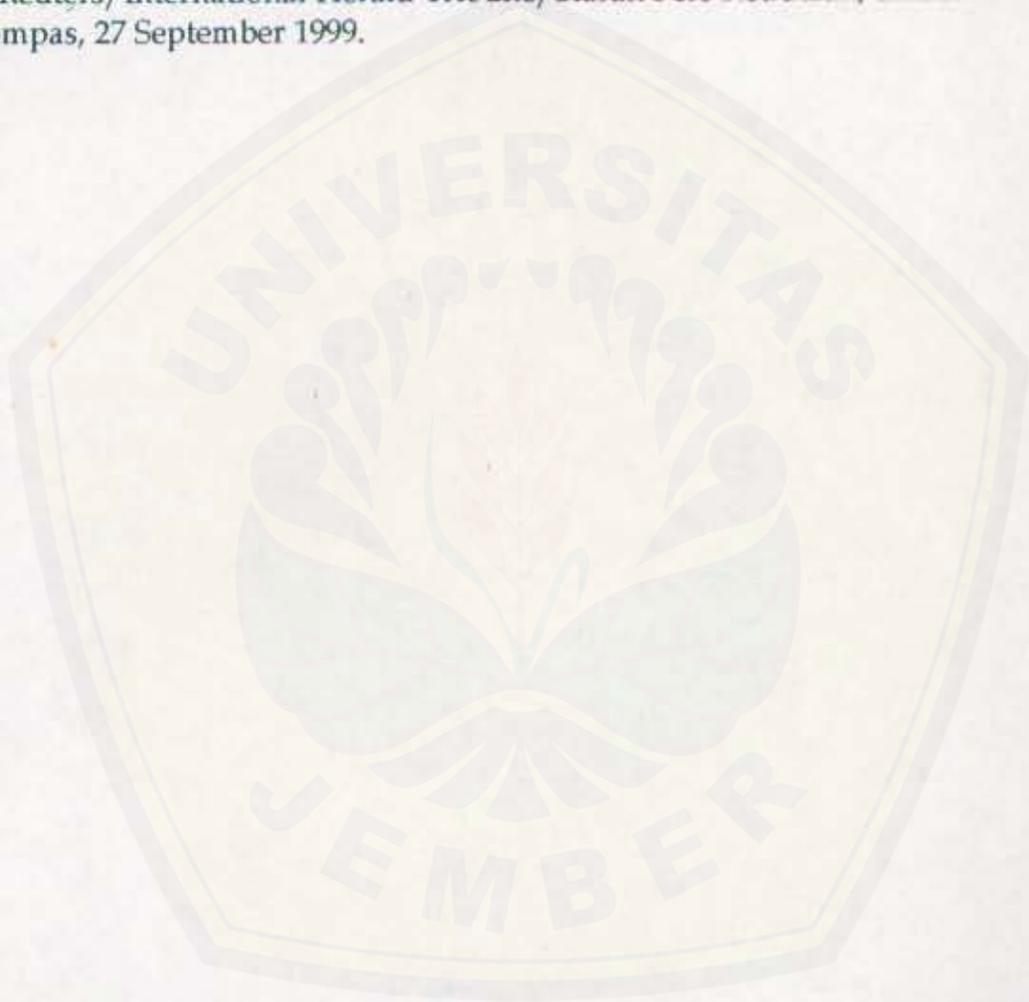
Lampiran 6.

SUMBANGAN BERBAGAI NEGARA DALAM INTERFET

- **Australia**, menyumbang sampai 4500 personel militer. Selain Hercules, juga angkutan laut dengan *katamaran* berkecepatan tinggi yang memuat 500 personel dengan perlengkapan penuh. Disiagakan pula enam *fregat* dan tiga kapal perusak, semuanya dilengkapi peluru kendali.
- **Argentina**, 50 pasukan.
- **AS**, Sekitar 200 personel militer, setengahnya akan bertugas di darat Timtim. Disediakan pula dukungan dari Armada Pasifik. AS juga membantu angkutan pasukan dari negara lain dan membantu Interfet dengan logistik, komunikasi dengan intelijen.
- **Bangladesh**, menawarkan pasukan.
- **Brasil**, 30 sampai 50 polisi militer.
- **Fiji**, menawarkan pasukan.
- **Filipina**, Tim pendahulu 240 orang, terutama unit teknik medis dan kedokteran gigi dan 1200 personel nontempur lain.
- **Finlandia**, Menyumbang 1 juta dolar AS untuk operasi ini.
- **Inggris**, mengirim kapal perusak HMS Glasgow dari Singapura. Menyumbangkan 5 juta dolar AS untuk memulihkan operasi PBB di Timtim. Sekitar 270 pasukan Gurkha asal Nepal, beberapa diantaranya berbicara bahasa Melayu, termasuk gelombang pertama pasukan yang mendarat di Timtim.
- **Italia**, 600 personel militer, termasuk satu kelompok taktis 200 penerjun, pesawat transpor dan satu unit amfibi di kapal yang dilengkapi fasilitas rumah sakit dan helikopter.
- **Jepang**, dana bagi bantuan kemanusiaan dan untuk mengangkut pasukan dari negara Asia.
- **Kanada**, 600 pasukan, juga *HMCS Protector*, kapal logistik atau pesawat transpor hercules.
- **Korea Selatan**, 500 pasukan.
- **Malaysia**, 30 personel militer.
- **Norwegia**, 5 perwira.
- **Pakistan**, menawarkan pasukan.
- **Perancis**, 500 pasukan dan mengirim sebuah fregat, yakni *Vendemiaure* dan kapal induk pengangkut helikopter dari *Toufon* dan tiga pesawat angkut *Transall* dan *Hercules*, serta pesawat disertai perlengkapan rumah sakit.
- **RRC**, menawarkan polisi sipil.

- **Selandia Baru**, 800 pasukan udara, laut dan darat, dengan pengiriman awal sebanyak 420. Juga menyediakan *Fregat Te Kaha*, sebuah kapal suplai dan dua pesawat angkut Herkules.
- **Singapura**, personel medis dan dukungan logistik.
- **Swedia**, 10 perwira polisi sipil dan bantuan 1,2 juta dolar AS.
- **Thailand**, 1025 pasukan.

Sumber: Reuters/International Herald Tribune/Siaran Pers Kedutaan, dalam Kompas, 27 September 1999.





Lampiran 8.

PUSAT KAJIAN AUSTRALIA
Universitas Indonesia

Fakultas Sastra Gedung V
Kampus Universitas Indonesia
Depok 16424
Telp. (62-21) 7863428
Fax (62-21) 7863429

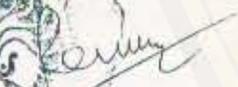
SURAT KETERANGAN
No. 083/PT.02/PKA/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Dyah Estu Kurniawati/96-1182/HI
Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Alamat : Jl. Jawa IV/15 B Jember
Judul Penelitian : Hubungan Indonesia Australia Pasca Jajak
Pendapat di Timor Timur

Telah merampungkan penelitiannya di Pusat Kajian Australia, Universitas Indonesia.

Demikian surat keterangan ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Dr. Reni Winata
Kepala Pusat Kajian Australia
Universitas Indonesia



Lampiran 9.



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Dyah Estu Kurniawati

Status : Mahasiswa

Alamat : Jl. Jawa IV/15B Jember

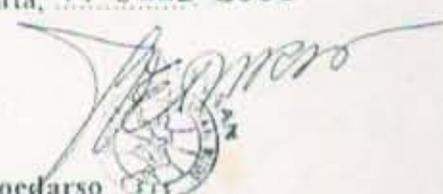
telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang:

"Hubungan Indonesia Australia
Pasca Jajak Pendapat
di Timor Timur."

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 17 Juli 2000


Soedarso
Kepala Perpustakaan

SURAT KETERANGAN

Dengan ini diterangkan bahwa orang yang tersebut di bawah ini :

N a m a : DYAR ESTU KURNIAWATI / 96 - 1182 / H I .

Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.

A l a m a t : Jln. Jawa IV / 15 B Jember

dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

" HUBUNGAN INDONESIA AUSTRALIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR ",
telah mengadakan penelitian/research di Perpustakaan Puslitbang
Politik dan Kewilayahan-LIPI selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal
13 Juli 2000.

Harap yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Jakarta, 13 Juli 2000

Kasubag Dokinfo PPW-LIPI,



[Signature]
Amet Husni

NIP. 320001702